Isu-Isu Kritis

Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah

Editor:
Sam M. Chan
Prof. Emzir

® GI

ISU-ISU KRITIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ERA OTONOMI DAERAH

ISU-ISU KRITIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ERA OTONOMI DAERAH

Editor:
Prof. Dr. Emzir, M.Pd.
Drs. Sam M. Chan, M.Si.

GHALIA INDONESIA
Anggota IKAPI

Isu-Isu Kritis Kebijakan Pendidikan
Era Otonomi Daerah

Editor Ahli:
Prof. Dr. Emzir, M.Pd.
Drs. Sam M. Chan, M.Si.
Editor: Asep Jamaludin
Desain Cover: Ghalia Indonesia
Desain Isi: Bambang A

Penerbit Ghalia Indonesia, Oktober 2010
Jl. Rancamaya Km. 1 No. 47,
Warung Nangka, Ciawi - Bogor 16720
Telp.: (0251) 8240628 (hunting) Fax.: (0251) 8243617
e-mail: editorialperti@gmail.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Prof. Dr. Emzir, M.Pd. dan Drs. Sam Muchtar Chaniago, M.Si. (Editor)
Isu-Isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, Cet. 1
Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010
viii + 176 hlm; 155 mm x 230 mm
ISBN: 978-979-450-597-7

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah dan menganugerahi berbagai nikmat yang tiada tara kepada kita, sehingga bisa merampungkan berbagai kumpulan karya ini.

Sejatinya, perkembangan pendidikan untuk mencapai mutu pendidikan yang berkualitas senantiasa dikawal oleh seluruh lapisan masyarakat di tanah air—khususnya oleh para praktisi yang bergelut langsung dengan dunia pendidikan. Pendidikan yang bermutu semestinya dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat bangsa Indonesia. Kebijakan pendidikan di Indonesia semestinya mendukung atas terjaminnya hak-hak warga dalam hal perolehan pendidikan bermutu, khususnya dalam konteks otonomi daerah. Oleh karena itu, pemberlakuan kebijakan pendidikan dalam konteks otonomi daerah yang diterapkan melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 dan disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, selayaknya dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan sebaik mungkin.

Salah satu faktor yang juga menjadi dukungan dalam keberhasilan pendidikan adalah peran bahasa. Bangsa Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau dan berbagai suku bangsa, perbedaan letak geografis dan perbedaan suku bangsa tersebut secara logis mengakibatkan pula terjadinya perbedaan budaya dan adat istiadat, termasuk di dalamnya adalah bahasa. Adanya multibudaya serta multibahasa tersebut mengakibatkan ketidakefektifan dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan yang jauh dari ibukota. Proses pembelajaran tersebut semakin kompleks sehingga benturan kebahasaan pada siswa berujung pada ketidakefektifan pembelajaran.

Buku yang merupakan kumpulan tulisan dari beberapa penulis ini sedapat mungkin menghadirkan isu-isu kritis mengenai kebijakan pendidikan di era otonomi daerah yang tengah menghangat akhir-akhir ini. Kajian-kajian serta isu-isu kritis yang disuguhkan dalam buku ini terbagi atas dua bagian, pada bagian pertama, disuguhkan isu-isu kritis seputar kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia; dan pada bagian kedua, disuguhkan isu-isu kritis mengenai pendidikan bahasa. Beberapa isu-isu kritis pendidikan yang disajikan dalam buku ini meliputi; *konsep mutu dalam kebijakan pendidikan, faktor strategis yang mempengaruhi mutu pendidikan dasar, manajemen berbasis sekolah, isu mengenai pendidikan non-formal, pendidikan anak usia dini, pendidikan kewiraan di perguruan tinggi, konsep pembelajaran bermakna, pendidikan imersi, kebijakan pembelajaran bahasa di perguruan tinggi, serta implementasi pendidikan dwibahasa.*

Akhir kata, semoga kajian-kajian dalam buku ini dapat melahirkan ide-ide brilian bagi para insan pendidikan, sehingga upaya menuju kualitas pendidikan yang bermutu dapat terealisasi dengan baik, dan merata.

Jakarta, Oktober 2010

Prof. Dr. Emzir, M.Pd.
Drs. Sam M. Chan, M.Si.

Daftar Isi

Isu-Isu Kritis 9

Kebijakan Pembelajaran Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi sebagai Mata Kuliah Umum *(Sam Mukhtar Chaniago)*

Isu-Isu Kritis 10

Penggunaan Bahasa Asing, Perencanaan dan Reformasi Bahasa Indonesia, serta Pendidikan Dwibahasa *(Dr. Ganjar Hwia)*

Isu-Isu Kritis 11

Penggunaan Bahasa Asing dalam Konteks Pendidikan Bahasa di Indonesia *(Suwartono)*

Bagian 1

Isu-Isu Kritis Bidang Pendidikan

Menyoal Konsep Mutu dalam Kebijakan Pendidikan

Oleh:
Dr. Alek
(Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah)

A. Pendahuluan

Perbincangan mengenai mutu dan kebijakan pendidikan di negara kita yang tercinta ini seolah menjadi topik yang tidak akan pernah habis dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa mutu menjadi sebuah ikon yang sangat dikejar dan didambakan oleh setiap orang terutama dalam kaitannya dengan pendidikan. Berbagai upaya, strategi, dan usaha-usaha lain telah dilakukan, bahwa begitu penting dan urgennya di setiap kali pergantian penguasa tertinggi negara hingga menteri yang menangani pendidikan pun berubah pula arah dan kebijakan pendidikan yang diterapkannya, dan sangat sulit ditemukan adanya menteri sebagai nakhoda di departemen pendidikan yang meneruskan kebijakan-kebijakan yang masih dianggap relevan dan kemungkinana besar masih dalam proses menuju pada sebuah realisasi sesuai tujuan, strategi, dan rancangan yang telah dibuat sebelumnya.

Konsep mutu dalam kebijakan pendidikan di Indonesia masih dipahami sebagai sesuatu yang dianggap alasan utama bagi suatu lembaga pendidikan, pertanyaannya adalah "apa parameter yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya mutu suatu lembaga pendidikan? Indikator-indiktor apa yang menjadi parameter untuk menilai mutu pendidikan kita? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketercapaian dan kegagalan dalam mencapai mutu pendidikan di berbagai tingkat dan jenjang pendidikan yang ada di Indonesia?

B. Hakikat Mutu

Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali memperbincangkan masalah mutu. Kita tidak menyadari bahwa belum terdapat kesepakatan di kalangan para pakar mengenai mutu. Mutu merupakan suatu konsep yang didasarkan pada ilusi dan bermakna individual. Oleh karena itu, mutu memiliki makna yang sangat beragam dan berlainan bagi setiap orang dan kriterianya pun berubah secara terus menerus tergantung pada konteksnya. Mutu merupakan suatu terminologi yang subjektif dan relatif yang dapat diartikan dengan berbagai cara di mana setiap definisi dapat didukung oleh argumentasi yang sama baiknya.

Sebagai langkah awal dari tulisan ini perlu mengetengahkan tentang rumusan atau konsep/definisi mutu pendidikan. Konsep mutu pendidikan masih bersifat parsial dan individual. Mutu pendidikan adalah berkembangnya potensi anak didik. Pendidikan dikatakan bermutu apabila anak didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan menurut Suryadi, mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga-lembaga pendidikan dan satuan pendidikan dalam mengelola dan mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar. Lembaga-lembaga pendidikan dalam hal ini adalah lembaga formal dan non-formal, lebih lanjut Suryadi[1] mengungkapkan bahwa pendidikan yang bermutu ialah dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaruan dan perubahan.

Memperhatikan dua pendapat di atas, nampak yang satu menekankan kepada berkembangnya potensi peserta didik, dan yang satu lainnya lebih menekankan kepada kemampuan lembaga-lembaga pendidikan dan satuan pendidikan, pendapat yang lebih lengkap dikemukakan oleh Soedijarto[2] bahwa pendidikan yang bermutu yaitu suatu sistem pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan pada berbagai jenjang dan jenis yang memiliki kemampuan, nilai, dan sikap, baik kemampuan intelektual, profesional dan emosional dan memiliki sikap jujur, berdisiplin, dan beretos kerja yang tinggi, rasional, kreatif, memiliki rasa tanggung jawab kemanusiaan, kemasyarakatan dan kebangsaan serta berakhlak mulia,

---

[1] Ace Suryadi & H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar* (Bandung: Rosdakarya, 1994), hlm. 163.

[2] Soedijarto, *Mutu Pendidikan sebagai Kebutuhan*. Makalah disampaikan pada Workshop "Profesionalisme Guru Berprestasi Tingkat Nasional" di Semarang, Denpasar, 5 Juni 2004 dan Denpasar, 22 Juni 2004. Diskusi Panel "Potret Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam" di Jakarta, 1 Juli 2004.

beriman dan bertakwa. Namun demikian, menurut Tilaar bahwa pendidikan yang berkualitas bukan hanya pendidikan yang mengembangkan intelegensi akademik, tetapi perlu mengembangkan seluruh spektrum intelegensi manusia yang meliputi berbagai aspek kebudayaan[3]

Kemudian menurut Slamet[4], untuk bisa menghasilkan mutu, terdapat empat usaha mendasar yang harus dilakukan dalam lembaga pendidikan, yaitu: (1) menciptakan situasi "menang-menang" (*win-win solution*) dan bukan situasi "kalah-menang" di antara pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan (*stakeholder*); (2) perlunya ditumbuhkembangkan motivasi intrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu; (3) setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang, sehingga penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan bukanlah suatu proses perubahan jangka pendek, tetapi usaha jangka panjang yang konsisten dan terus menerus; (4) dalam menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, harus dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil mutu.

Dengan demikian, untuk menghasilkan mutu sesuai harapan, komunikasi yang dibangun terutama antara pimpinan dengan bawahannya harus saling menguntungkan satu sama lain dalam meraih mutu yang dicita-citakan oleh suatu lembaga pendidikan. Setiap orang dalam lembaga pendidikan harus tumbuh motivasi, bahwa hasil kegiatannya akan mencapai mutu tertentu yang meningkat terus menerus, terutama sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna/langganan. Mengacu kepada beberapa pendapat, tidak terdapat definisi tentang mutu pendidikan yang dijelaskan secara rinci. Demikian juga pada materi kebijakan yang tertuang dalam GBHN 1999-2004, dicantumkan bahwa salah satu misinya adalah "perwujudan sistem pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu, guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia".

Hal yang sama juga dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, beberapa kali dicantumkan kata mutu, di antaranya:

---

[3] H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 14.

[4] Slamet, Margono, *Filosofi Mutu dan Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu Terpadu*, (Bogor: IPB Bogor, 1999), hlm. 23.

1) BAB III Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan pasal 4 ayat (6) pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan; 2) BAB IV Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah, bagian kesatu pasal 5 ayat (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bagian Ketiga pasal 11 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; 3) BAB XI Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pasal 41 ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu; 4) BAB XVI Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi. Pada Bagian Kesatu pasal 57 ayat (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan pada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, walaupun enam kali disebut kata mutu, tidak ditemukan satupun definisi yang menjelaskan tentang mutu pendidikan. Selain kata mutu, terdapat beberapa kata kualitas, yang menampakkan bahwa mutu seperti bagian dari kualitas. Seperti tercantum dalam GBHN "Perwujudan sistem pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu" dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia". Frase "Perwujudan sistem pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu..." dan frase "...dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia" memiliki makna bahwa kualitas manusia Indonesia akan berkembang apabila pendidikan nasional bermutu.

Selanjutnya untuk mencapai standar mutu menurut PP No. 19 Tahun 2005 dan merupakan penjabaran dari UU No. 20 Tahun 2003 sebagaimana dikutip oleh Tilaar[5] bahwa terdapat delapan standar pendidkan nasional, antara lain: 1) standar isi, 2) standar proses, 3) Standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, dan 8) standar penilaian pendidikan.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk merumuskan definisi mutu pendidikan tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan selain

---

[5] H.A.R. Tilaar, *Standar Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 169-170.

pendidikan merupakan suatu sistem dan pendidikan mencakup banyak aspek yang saling berkaitan. Selanjutnya, rumusan mutu yang akan digunakan dalam tulisan ini didasarkan kepada tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 2, bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Atas dasar tujuan pendidikan tersebut di atas, maka rumusan definisi mutu pendidikan adalah kesesuaian antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan yang dicapai. Indikator keberhasilannya adalah berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Adapun indikator tersebut di atas, secara konseptual dirumuskan dalam GBHN menjadi 4 (empat) aspek penting yakni: 1) aspek agama yang meliputi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; 2) aspek intelektual, meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi; 3) aspek politik, yaitu menjadi warga negara yang cinta tanah air, berkesadaran hukum, dan berkesadaran lingkungan dan 4) aspek individual terdiri dari fisik dan mental. Aspek fisik yaitu sehat dan etos kerja yang tinggi, sedangkan aspek mental meliputi mandiri dan berdisiplin.

Dengan demikian, pendidikan dikatakan bermutu apabila peserta didik memenuhi standar kriteria yang telah diuraikan di atas. Untuk memenuhi kriteria dan standar di atas, maka diperlukan berbagai upaya untuk mengukur agar tujuan pendidikan dapat terjamin ketercapaiannya.

Untuk mengukur hal-hal yang telah dirumuskan di atas, maka dari berbagai pendapat ahli yang telah merumuskan konsep mutu, pendapat Juran lebih mendekati untuk memenuhi kriteria pengukuran. Menurut Juran, bahwa dalam upaya peningkatan mutu diperlukan tiga elemen, yaitu: 1) *quality planning*; 2) *quality control*; 3) *quality improvement.* Dalam tulisan ini, pendapat Juran diadopsi dengan penambahan satu elemen yaitu: *quality implementation*. Sehingga menjadi empat elemen yaitu: 1) *quality planning*; 2) *quality implementation;* 3) *quality control*;

dan 4) *quality improvement.* Hal ini diperlukan agar pada waktu implementasi, *quality implementation* berperan penting.[6]

Kualitas perencanaan (*quality planning)* adalah kualitas perencanaan di mana prosesnya dimulai dengan mengidentifikasikan tujuan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan. Kualitas pelaksaan (*quality implementation)* merupakan proses pelaksanaan kegiatan, berfungsi agar kegiatan berjalan tidak keluar dari apa yang telah direncanakan. Kualitas kontrol atau *quality control* merupakan suatu upaya di mana proses pendidikan benar-benar diperiksa dan dievaluasi serta dibandingkan dengan tujuan yang harus dicapai. Di samping itu, kontrol akan berfungsi untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau permasalahan-permasalahan yang membutuhkan pemecahan. *Quality improvement* adalah kualitas perbaikan yang dilakukan agar mekanisme yang sudah mapan dipertahankan sehingga mutu dapat dicapai. Selanjutnya, keempat elemen tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk mengukur tentang mutu pendidikan nasional. Ketercapaian keempat elemen di atas dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu: 1) kebijakan, 2) infrastuktur, dan 3) anggaran keuangan (*budget*).

C. Konsistensi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik, bahkan sebagaimana menurut Pressman dan Wildavsky dalam Sutton dan Levinson[7], bahwa hari ini pendidikan adalah pusat wilayah kebijakan publik. Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, dalam makalah akhir ini adalah kebijakan sebagai keputusan tetap dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Konsistensi ditinjau berdasarkan hirarki kebijakan.

Kebijakan berdasarkan hirarki terdiri dari 1) *policy level*, 2) *organization level*, dan 3) *operational level.* Dalam sistem negara demokrasi seperti Indonesia, kebijakan pada *policy level* adalah Tap MPR Nomor IV Tahun 1999 dan undang-undang, direpresentasikan oleh MPR RI dan DPR RI. Pada *organization level* yaitu PP, Kepres dan Kepmen, direpresentasikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Terakhir pada *operational level* yaitu peraturan pelaksanaan direpresentasikan oleh direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah Depdiknas.

---

6 Joseph M. Juran, *Quality Planning and Analysis*. Third Edition (New York: McGraw Hill Inc, 1993) page 32.

7 Margaret Sutton & Bradley A.U. Levinson, *Policy as Practice Toward a Comparative Sosiocultural Analysis of Educational Policy* (London: Ablex Publishing, 2001) page 4.

Dari gambaran tersebut, dapat diartikan bahwa apapun yang dirumuskan oleh kebijakan pada *policy level* dalam bentuk peraturan perundangan, implikasinya akan sampai pada tingkat *organization level* dan kepada tingkat yang paling bawah, yakni unit-unit operasional pada *operational level.*

Di samping itu, dapat dikatakan pula bahwa rentang pilihan serta kemungkinan tindakan bagi pelaku-pelaku kebijakan pada *operational level* ditentukan oleh *institutional arrangements* pada tingkat di atasnya, yaitu *organizational level* dan *policy level.* Perilaku yang dapat diobservasi pada *operational level* yaitu pola interaksi akan menghasilkan produk yang akan dilihat oleh masyarakat.

Selanjutnya, upaya untuk menghasilkan manusia yang berkualitas seperti yang diuraikan di atas, diselenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang selanjutnya ditetapkan dalam suatu kebijakan berupa UU Nomor 20 Tahun 2003. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN tersebut menetapkan fungsi pendidikan yang diperankan oleh seluruh lapisan bangsa dan menetapkan tujuan pendidikan yang dapat dicapai. Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Tujuannya adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar: 1) menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2) berakhlak mulia, 3) sehat, 4) berilmu, 5) cakap, 6) kreatif, 7) mandiri, dan 9) menjadi warga negara yang demokratis serta 9) bertanggung jawab.

Upaya untuk membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang diharapkan, ditetapkan jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Untuk pendidikan dasar dan menengah dijelaskan pada pasal 17 dan 18. Pasal 17 adalah sebagai berikut: ayat (1) pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah; ayat (2) pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 18 adalah sebagai berikut: ayat (1) pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar; ayat (2) pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan; ayat (3) pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal tersebut di atas, mengandung makna bahwa pendidikan menengah merupakan sekolah menengah pertama dan madrasah tsanwiyah yang termasuk ke dalam kategori pendidikan dasar, juga termasuk ke dalam kategori pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Di samping itu tujuan pendidikan dasar dan menengah dalam pasal tersebut tidak dinyatakan secara jelas.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 36 ayat (1) ditetapkan bahwa kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (2) kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik; (3) kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (a) peningkatan iman dan takwa; (b) peningkatan akhlak mulia; (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (f) tuntutan dunia kerja; (g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (h) agama; (i) dinamika perkembangan global; dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan; (4) ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah disusun wajib dengan memuat: (a) pendidikan agama; (b) pendidikan kewarganegaraan; (c) bahasa; (d) matematika; (e) ilmu pengetahuan alam; (f) ilmu pengetahuan sosial; (g) seni dan budaya; (h) pendidikan jasmani dan olah raga; (i) keterampilan/kejuruan; dan (j) muatan lokal.

Namun, apabila kurikulum dirancang dan dirumuskan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka kurikulum akan mencakup ke dalam empat aspek: 1) agama, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia; 2) intelektual, yaitu memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi; 3) politik atau kewarganegaraan, yaitu menjadi warga negara yang demokratis; dan 4) individual yang mencakup fisik dan mental, yaitu: sehat, cakap, kreatif, dan mandiri.

Materi di atas sasarannya bagi peserta didik pada tingkat dasar dan menengah tidak tampak, mengingat tujuan pendidikan dasar dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tidak dinyatakan dengan jelas. Berbeda dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 yang menyatakan dengan jelas pada Pasal 13 ayat (1), bahwa pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah, dan Pasal 15 ayat (1) pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

Pada kurikulum pendidikan dasar dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, dicantumkan mata pelajaran pendidikan Pancasila, membaca dan menulis, ini menunjukkan agar peserta didik memperoleh penanaman ideologi bangsa dan memiliki pengetahuan dasar serta keterampilan dasar sebagai bekal untuk mengembangkan dirinya di masyarakat dan mempersiapkan dirinya melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, hal tersebut tidak dicantumkan.

Selanjutnya, kurikulum yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, ketercapaiannya tergantung kepada kemampuan kompetensi atau profesionalisme seorang pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 39 ayat (1), ayat (2) yaitu: ayat (1) tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan; ayat (2) pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) yaitu: ayat (1) pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: (a) penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai; (b) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (c) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; (d) perlindungan hukum

dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan (e) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Ayat (2) pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Figur jabatan profesional seorang pendidik dan tenaga kependidikan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, sebagaimana dikemukakan oleh Soedijarto dalam jurnal pendidikan adalah jabatan yang memerlukan pendidikan lanjutan dan pelatihan khusus (*advanced education and special training*). Hal ini tidak lain karena jabatan profesional adalah jabatan yang memerlukan kemampuan merencanakan, kemampuan mengelola, kemampuan mengendalikan, kemampuan memonitor, kemampuan menilai, dan kemampuan mendiagnosis.[8] Untuk guru yang berderajat profesional di samping kemampuan-kemampuan tersebut, diperlukan tambahan kemampuan memberikan bimbingan dan kepemimpinan yang didasarkan atas pemahamannya atas peserta didik, penguasannya. atas ilmu pengetahuan sebagai bahan ajar, dan teknologi pendidikan. Namun, dalam beberapa keputusan menteri pendidikan nasional menunjukkan input dan proses pengangkatan sebagai guru dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, pemenuhan kebutuhan guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran yang sesuai dengan bidang keahlian, menteri menetapkan pengangkatan guru dari lulusan perguruan tinggi non-lembaga pendidikan tenaga keguruan. Ditambah adanya Kepmen tentang pengangkatan guru bantu. Adanya pengangkatan guru bantu menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Dalam Pasal 39 disebutkan, bahwa pendidik merupakan tenaga profesional, di mana tujuan kurikulum akan tercapai apabila kurikulum dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan kaidah kependidikan secara akademik dan profesional dan dilaksanakan oleh guru yang memiliki kemampuan profesional.

---

[8] Soedijarto, *Kurikulum, Sistem Evaluasi, dan Tenaga Pendidikan sebagai Unsur Strategis dalam Penyelenggaraan Sistem Pengajaran Sekolah*. Dalam Jurnal Pendidikan Penabur No. 03/Th III/Desember 2003. html http:www1. bpkpenabur.or.id/jurnal/03/089-107.pdf. hlm. 17.

Selain itu, seperti telah dikemukakan di atas, bahwa untuk mencapai pendidikan yang bermutu, selain kebijakan pendidikan dan *budget*, kurikulum dan sarana sebagai bagian dari infrastuktur, menjadi faktor penentu keberhasilan tujuan pendidikan nasional.

Sarana dan prasarana dicantumkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pada Pasal 45 ayat (1) bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana dan prasarana diperlukan guna memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, baik fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik.

Dalam kebijakan dan program pelaksanaan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, kriteria dan standar sarana prasarana yang dapat memenuhi keperluan pendidikan dan pertumbuhan serta perkembangan potensi fisik tidak dinyatakan dengan jelas. Selanjutnya, sebagai upaya untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan sebagai agen perubahan *(agent of change)* kehidupan bermasyarakat dan bebangsa ke arah yang lebih baik adalah dilakukannya evaluasi. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yaitu Pasal 57 ayat (1) evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan ayat (2) evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada-jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.

The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation mendefinisikan "*evaluation is the systematic assessment of the worth or merit of some object*".[9] Evaluasi sebagai suatu upaya sistematis, berkesinambungan, mengumpulkan, dan memroses informasi untuk menghasilkan kesimpulan tentang nilai dan manfaat suatu objek, akan dapat memberikan alternatif pendekatan yang lebih banyak dalam memberikan informasi kepada pendidikan. Hasil evaluasi dapat memperbaharui semua komponen pendidikan ke arah yang lebih baik, membantu proses pengembangan, implementasi, perbaikan, dan menambah pengetahuan serta membantu mendapat dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.

---

[9] Daniel L. Stufflebeam & Anthony J. Shienkfield, *Systematic Evaluation* (Netherland: Kluwer Nijhoff Publishing, 1986) page 3.

Peran dan tujuan evaluasi dalam pendidikan, adalah untuk: 1) membuat kebijakan dan keputusan; 2) menilai hasil yang dicapai para pelajar; 3) menilai kurikulum; 4) memberi kepercayaan pada sekolah; dan 6) memperbaiki materi dan program pendidikan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan telah dicapai. Tujuan ini bersifat kolektif, karena peserta didik tidak berhasil dengan sendirinya dalam menyerap kurikulum tanpa peran guru yang profesional. Demikian juga guru, tidak dapat berhasil tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk tercapainya proses pembelajaran yang menyenangkan.

Evaluasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pendidikan nasional berdasarkan keputusan menteri dilakukan oleh satu kebijakan, yaitu berupa model evaluasi dengan bentuk Ujian Akhir Nasional (UAN). Kebijakan dalam Kepmen tampak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menetapakan Pasal 58, bahwa evaluasi belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik. Pada Pasal 59, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sementara itu, pada Pasal 61, ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian diselenggarakan oleh yang satuan pendidikan yang terakreditasi.

Di samping itu, ditetapkannya model evaluasi berbentuk UAN yang mengevaluasi mata pelajaran pada aspek kognitif menimbulkan pertentangan dengan kriteria dan standar yang akan dipenuhi. Kemudian, desentralisasi pendidikan sebagai konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah tidak dibarengi dengan ketentuan perundang-undangan yang khusus mengatur desentralisasi pendidikan.

Demikian halnya ketika dikeluarkan ketentuan mengenai pendidikan dalam UUD 1945 pasal 31, selain konsekuensi infrastuktur, muncul pula konsekuensi *budget* dengan ditetapkannya anggaran untuk pendidikan sebanyak 20% dari total dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Namun, sebagai upaya memenuhi kebutuhan pendidikan masih belum terwujud. Hal ini ditemukan dalam perhitungan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara, bahwa alokasi dana untuk sektor pendidikan dan kebudayaan masih jauh dari apa yang diharapkan.[10]

---

10 Munawar Sholeh, *Politik Pendidikan, Membangun Sumber Daya Bangsa dengan Peningkatan Kualitas Pendidikan* (Jakarta: Institute for Public Education, 2005). page 119.

Apabila mengacu kepada UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 yang telah menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, maka anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari 368,8 triliun adalah berjumlah sebesar 73,6 triliun. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan sebagaimana yang diuraikan presiden Megawati sebesar 14,93 triliun tidak lebih dari 4 persen dari total APBN. Demikian juga dalam UU Nomor 36 Tahun 2004[11] tentang APBN Tahun 2005 Pasal 5, menetapkan bahwa jumlah anggaran belanja negara Tahun 2005 ditetapkan sebesar 397.769.309.661.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah). Sektor pendidikan mendapat alokasi sebesar 24.225.543.000.000,00 (dua puluh empat triliun dua ratus dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah. Jumlah tersebut hanya 6 % (persen) dari APBN, padahal seharusnya dana yang disediakan sebesar 20 % dari APBN, yakni sebesar 79 triliun rupiah.

Dengan demikian, inkonsistensi terjadi pada tingkat *policy level,* demikian juga antara *policy level* dengan *organization level* dan *operational level* yang memperlihatkan adanya inkonsistensi. Beberapa kebijakan pada *policy level* tidak diorganisir dan direalisasikan pada *organization level.* Demikian juga beberapa kebijakan pada *organization level,* tidak dilaksanakan pada *operasional level.*

D. Dampak Kebijakan terhadap Mutu Pendidikan di Indonesia

Menurut Simon, keputusan yang dicapai pada tingkat lebih tinggi dalam hirarki organisasi, tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap kegiatan-kegiatan di bawahnya, kecuali apabila keputusan-keputusan itu disalurkan ke bawah.[12] Dalam hal ini, pengaruh akan tampak secara nyata apabila suatu keputusan yang ditetapkan menimbulkan perubahan pada setiap aspek perilaku.

Untuk mencapai visi pendidikan dengan mutu yang tinggi dan dengan cakupan yang luas ,diperlukan kebijakan yang konsisten agar mutu pendidikan dapat dicapai. Legislatif (DPR-RI) mengeluarkan Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang intinya adalah menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi

---

[11] Depdiknas, *Jurnal Hukum dan HAM Bidang pendidikan* (Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi, 2005) hlm. 132.

[12] Herbert A. Simon, *Administrative Behavior, A Study of Decicion-Making Prosses in Administrative Organization*, Fourt Edition (New York: The Free Press, 1997), page 7.

manajemen pendidikan. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tantangan dan perubahan, baik kehidupan lokal sebagai konsekuensi otonomi daerah (UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999), nasional dan global.

Departemen Pendidikan Nasional tampak berusaha untuk memenuhi target kebijakannya dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan yang menarik diperhatikan adalah kebijakan melalui Kepmen Nomor 005/IV/2004 tentang Pertukaran Kepala Sekolah Kawasan Timur Indonesia dengan Kawasan Barat Indonesia. Diknas berusaha untuk menjawab persoalan ketimpangan pemerataan pendidikan yang terjadi antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Namun, ketimpangan antara perkotaan dan pedesaan serta antara tingkat pendapatan penduduk maupun antar *gender* tidak berhasil dikeluarkan kebijakannya.

Secara ringkas, dapat diuraikan bahwa kebijakan yang dibuat sudah cukup terarah, hanya saja bila dikaitkan dengan luas cakupan aspek yang ditargetkan, yaitu agama (terdapat 3 aspek), intelektual (terdapat 2 aspek), politik (terdapat 3 aspek), dan personal yang mencakup fisik dan mental (terdapat 4 aspek), masih sangat jauh dari memadai.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsep mutu pendidikan dalam tulisan ini adalah kesesuaian antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan yang dicapai. Indikator keberhasilannya adalah berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Indikator tersebut di atas, dirumuskan menjadi empat aspek penting yakni: 1) aspek agama yang meliputi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; 2) aspek intelektual, meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi; 3) aspek politik, yaitu menjadi warga negara yang cinta tanah air, berkesadaran hukum, dan berkesadaran lingkungan dan 4) aspek individual terdiri fisik dan mental fisik. Aspek fisik yaitu sehat dan etos kerja yang tinggi, sedangkan aspek mental meliputi mandiri dan berdisiplin. Aspek mental ini akan dituangkan ke dalam tabel berikut.

Tabel
Matriks Aspek dan Indikator Mutu Pendidikan

☞ Beriman ☞ Bertakwa ☞ Berakhlak mulia	☞ Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)	☞ Cinta Tanah Air ☞ Berkesadaran Hukum dan Lingkungan	☞ Sehat ☞ Mandiri ☞ Etos Kerja ☞ Disiplin

Sumber: Tap MPR Nomor IV/MPR/1999

Keempat aspek tersebut, dalam implementasi kebijakannya saling mempengaruhi dan saling mendominasi satu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dikenali satu persatu. Kemudian secara operasional, keempat aspek ini menjadi kriteria dan standar untuk mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu.

Dengan demikian, pendidikan dikatakan bermutu apabila peserta didik memenuhi kriteria dan standar di atas. Untuk mengukur kriteria dan standar, diperlukan empat elemen, yakni: 1) kualitas perencanaan *(quality planning)*; 2) kualitas pelaksanaan *(quality implementation)*; 3) kualitas kontrol *(quality control)*; dan 4) kualitas perbaikan *(quality improvement)*. Namun, keempat elemen tersebut ketercapaiannya dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu: 1) kebijakan; 2) infrastuktur, dan 3) anggaran keuangan *(budget)*.

Sebagaimana telah disampaikan di atas, pada bagian konsistensi kebijakan, indikasi adanya inkonsistensi kebijakan terjadi, baik dari segi hierarki maupun dari segi sistem dan komponen kebijakan. Hal ini karena setiap kali terjadi pergantian kepala negara, secara otomatis membawa konsekuensi tersendiri termasuk di dalamnya pergantian menteri pendidikan nasional (baca: Juwono Sudarsono, Yahya Muhaimin, Malik Fadjar, dan Bambang Sudibyo). Jika kita perhatikan secara seksama, dari keempat menteri pada pemerintahan yang berbeda, telah memberi pengaruh yang berbeda-beda pula dalam pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan. Perbedaan visi dan pemahaman terhadap arah pembangunan pendidikan memberikan pengaruh terhadap mutu pendidikan nasional.

Pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijakan yang tidak konsisten pada setiap periode pergantian pemerintah berikut menterinya, akan dengan sendirinya berdampak baik secara langsung maupun secara tidak langsung, seperti pada infrastruktur dan anggaran pendidikan yang kesemuanya berdampak pada mutu pendidikan secara umum.

Jika ditinjau secara keseluruhan, infrastruktur pembangunan pendidikan dalam PROPENAS prioritasnya sangat kecil jika dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya. Walaupun komponen gaji bertambah dengan adanya pengangkatan guru-guru bantu, namun porsi pembangunan pada beberapa tahun terakhir relatif kecil pertumbuhannya. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dalam beberapa tahun terakhir, khususnya yang berkaitan dengan anggaran pembangunan untuk bidang pendidikan antara tahun 2002-2007 adalah: tahun anggaran 2002-2003 berjumlah 6,45%, tahun anggaran 2003-2004 berjumlah 6,6%, tahun anggaran 2004-2005 berjumlah 6,6%, 2005-2006 berjumlah 9%, dan 2006-2007 berjumlah 11%.

Jumlah anggaran untuk pembangunan pendidikan tersebut porsinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan amanat Undang-Undang 1945 yang telah menetapkan anggaran sebesar 20 persen dari total APBN. Kecilnya anggaran tersebut memberikan pengaruh yang cukup luas kepada mutu pendidikan.

Upaya meningkatkan infrastuktur pendidikan masih hanya sebatas retorika, kalaupun itu sudah banyak dilakukan, di dalamnya tidak sedikit dijumpai praktek-praktek yang justru kontraproduktif dengan amanat dan tujuan pendidikan itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan Soedijarto dalam tulisannya, bahwa untuk mencapai tujuan, perlu dirancang dan dikembangkan seperangkat infrastuktur. Namun, bila infrastruktur tidak dirancang dengan seksama, maka akan menjadikan fungsi sekolah dan tujuan pendidikan yang telah digariskan menjadi rumusan abstrak yang sering hanya dijadikan bahan retorika pejabat.

E. Penutup

Berdasarkan paparan yang dikemukakan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa simpulan.

1. Kriteria dan standar mutu yang digunakan dalam kebijakan pendidikan di Indonesia tidak mengacu kepada pemahaman konsep mutu yang seutuhnya (*integrated*) dan disepakati secara akademis. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan yang cukup berarti, sehingga kemudian mutu yang seharusnya mengacu kepada definisi kesesuaian antara tujuan dengan hasil yang dicapai sangat sulit dicapai.
2. Konsistensi kebijakan masih lebih dominan berdasarkan hierarki, terutama pada tingkat pengambil kebijakan. Sedangkan inkonsistensi terjadi antara

kebijakan pada tingkat pengambil kebijakan dan kebijakan pada tingkat organisasi dan tingkat pelaksana di departemen yang paling bawah.

3. Konsep mutu belum mengacu kepada konsep mutu yang benar-benar solid, karena tidak mempertimbangkan dan memperhatikan komponen-komponen yang berkepentingan dalam kependidikan, sehingga antara pemerintah dan semua pihak serta *stakeholders* tidak terjadi inkonsistensi.
4. Para pengambil atau pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah masih memandang sektor pendidikan sebagai sektor yang dinomorduakan daripada sektor lain, seperti sektor ekonomi, politik, dan lain-lain.

F. Rekomendasi

Berdasarkan uraian, pembahasan, dan simpulan yang dikemukakan, maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut.

1. Untuk mencapai mutu pendidikan nasional sesuai yang diharapkan, kebijakan pendidikan perlu memperhatikan berbagai aspek pendukung, dan setiap kebijakan yang diambil perlu diawali dengan analisis kebutuhan, perencanaan yang matang yang didukung penelitian dan studi yang memadai agar tidak terkesan bahwa setiap kebijakan yang dibuat hanya retorika para pejabat sekaligus sebagai bukti adanya gerakan dan terlaksananya program.
2. Dalam tahap pelaksanaan amanat UUD 1945 dan UUSPN No. 20 Tahun 2003 harus konsisten, jujur, dan amanah, sehingga pada akhirnya dapat memberikan pengaruh dan dampak yang positif bagi upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional dan senantiasa terhindar dari penyakit *'korupsi'* dan kebiasaan yang bersifat amoral dan merugikan masyarakat bangsa.
3. Dalam membuat dan mengambil kebijakan tentang pendidikan agar mengikutsertakan para pakar pendidikan, semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yang berkompoten, pemerhati pendidikan untuk memberi masukkan, pertimbangan, dan arah kebijakan yang benar-benar propendidikan agar mencapai tujuan yaitu pendidikan yang bermutu (*quality education*). Semoga...!

Daftar Pustaka

Suryadi, Ace. & H.A.R. Tilaar. *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar.* Bandung: Rosdakarya, 1994.

Stufflebeam, Daniel L.A. & Anthony J. Shienkfield, *Systematic Evalation.* Netherland: Kluwer Nijhoff Publishing, 1986.

Depdiknas. *Jurnal Hukum dan HAM Bidang pendidikan.* Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi, 2005.

Tilaar, HAR. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional.* Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

———, *Standar Pendidikan Nasional.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Simon, Herbert A. *Administrative Behavior, A Study of Decicion-Making Prosses in Administrative Organization*, Fourt Edition. New York: The Free Press, 1997.

Juran, Joseph M. *Quality Planning and Analysis.* Third Edition (New York: McGraw Hill Inc, 1993) p. 32.

Sutton, Margaret. & Bradley A.U. Levinson, *Policy as Practice Toward a Comparative Sosiocultural Analysis of Educational Policy.* London: Ablex Publishing, 2001.

Sholeh, Munawar. *Politik Pendidikan*, Membangun Sumber Daya Bangsa dengan Peningkatan Kualitas pendidikan. Jakarta: Institute for Public Education, 2005.

Slamet, Margono. *Filosofi Mutu dan Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu Terpadu.* Bogor: IPB Bogor, 1999.

Soedijarto. "Mutu Pendidikan sebagai Kebutuhan" *Makalah disampaikan pada Workshop "Profesionalisme Guru Berprestasi Tingkat Nasional"* di Semarang, 5 Juni 2004 dan Denpasar, 22 Juni 2004. Diskusi Panel "Potret Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam" di Jakarta, 1 Juli 2004.

———, "Kurikulum, Sistem Evaluasi, dan Tenaga Pendidikan sebagai Unsur Strategis dalam Penyelenggaraan Sistem Pengajaran Sekolah." Dalam *Jurnal Pendidikan Penabur No. 03/Th III/Desember 2003.* html http:www1.bpkpenabur.or.id/jurnal/03/089-107.pdf. p. 17.

Faktor-Faktor Strategis yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Oleh:

Dr. Mohammad Siddiq
(Universitas Negeri Jakarta)

A. Pendahuluan

Di awal abad ke-21 saat ini, telah terjadi perubahan yang sangat fundamental dan ekstensif di lingkungan strategis pendidikan, termasuk perguruan tinggi di Indonesia. Perubahan fundamental itu terutama dilihat dari faktor penentu kemajuan suatu negara. Ketika revolusi industri mulai bergulir di Eropa, maka peranan teknologi menjadi sangat strategis sekali. Negara-negara kaya dan maju, keunggulannya terletak pada kapasitas teknologi yang dimilikinya. Tetapi, ketika arus globalisasi ekonomi dan revolusi teknologi informasi bergulir demikian cepat di akhir abad ke-20, telah terjadi pergeseran dalam tuntutan dan kebutuhan fundamental bagi suatu negara untuk menjadi negara yang maju dan kuat. Hasil studi yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2000 di 150 negara menunjukan, bahwa kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu: (1) *innovation and creativity* 45%, (2) *networking* 25%, (3) *technology* 20%, dan (4) *natural resources* 10%.

Tiga faktor pertama menempatkan sumber daya manusia sebagai faktor yang sangat strategis. Artinya, tuntutan dan kebutuhan utama ke depan adalah mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi, kemampuan dalam membangun jaringan kerjasama, kreatif dan inovatif mengembangkan dan mendayagunakan teknologi, sekaligus kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Globalisasi ekonomi terjadi semakin ekstensif, ditandai oleh pergeseran orientasi pengembangan ekonomi dari kawasan Eropa ke kawasan Asia Pasifik, di mana Indonasia mempunyai posisi geo-ekonomi yang sangat penting dan strategis. Mulai tahun 2003, Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya secara penuh memasuki era AFTA (*Asean Free Trade Area*) dengan segala implikasi yang harus dihadapi–siap ataupun tidak siap. Dalam era perdagangan bebas dewasa ini, telah terjadi polarisasi perdagangan. Alan Rugman (2000) menyebut, bahwa telah terjadi pertarungan tiga kekuatan yaitu Asia, Uni Eropa, dan NAFTA. Artinya, ketiga kekuatan itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi global, persaingan sumber daya manusia, dan pengembangan pendidikan yang harus relevan dengan tuntutan perkembangan itu.

Perubahan fundamental penting lainnya adalah pergeseran paradigma pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi melalui pelaksanaan otonomi daerah termasuk dalam otonomi bidang pendidikan. Di era otonomi ini, pembangunan pendidikan menghadapi sejumlah tantangan. Terdapat kekhawatiran bahwa pelaksanaan otonomi daerah justru akan menimbulkan ketidakpastian dalam standar mutu (*uncertainty about standards of achievement*) dan bahkan menimbulkan disparitas mutu pendidikan antar daerah. Di samping itu, setiap daerah masih menghadapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kemampuan sekolah dalam menjamin anggaran sekolah, sumber daya manusia yang bermutu, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah dalam jumlah yang mencukupi dan yang memenuhi syarat, manajemen sekolah yang harus kuat, dan partisipasi orangtua siswa serta masyarakat yang harus tinggi.

Menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan strategis pendidikan tersebut, maka pertanyaan fundamental yang harus dijawab adalah sejauh mana lembaga pendidikan, baik pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi, mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, profesional, dan kompetitif? Pertanyaan fundamental tersebut tidak mudah untuk dijawab, karena secara nasional Indonesia menghadapi tiga agenda besar masalah pendidikan yaitu masalah mutu dan relevansi pendidikan, manajemen pendidikan, dan masalah pemerataan pendidikan. Masalah mutu pendidikan yang rendah masih tetap menjadi agenda penting. Bahkan, mutu pendidikan yang rendah dinilai sebagai salah satu penyebab keterpurukan nasional, baik keterpurukan moral, sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Y.B. Soebroto, *Kompas*,

24 Januari 2003). Rendahnya mutu pendidikan tersebut ditunjukkan oleh indikator hasil ujian akhir nasional SMU tahun 2001/2002 yang memberikan gambaran cukup memprihatinkan. Secara nasional, jumlah nilai rata-rata ujian akhir nasional SMU kelas IPA adalah 4,40, IPS 4,27, dan Bahasa 4,63. Nilai untuk setiap daerah dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Nilai Rata-Rata Ujian Akhir Nasional SMU Tahun 2001/2002

No.	PROVINSI	IPA	IPS	BAH	No.	PROVINSI	IPA	IPS	BAH
1	DKI	5.13	4.36	5.41	12	Jambi	4.42	4.37	4.92
2	Bali	4.76	3.97	4.27	13	Jabar	4.42	4.37	4.92
3	Lampung	4.81	4.07	5.63	14	Sulut	4.30	4.25	4.01
4	DIY	4.81	4.07	5.63	15	Sumut	4.27	4.76	4.74
5	Sulsel	4.79	3.94	4.29	16	Sulteng	4.25	3.95	4.31
6	Malut	4.70	3.70	4.29	17	Sumsel	4.21	3.94	5.17
7	Sultra	4.61	3.95	4.25	18	Banten	4.21	4.35	4.60
8	Gorontalo	4.61	3.59	4.08	19	Kalbar	4.19	4.42	4.06
9	Kaltim	4.69	4.02	4.43	20	NTB	3.80	3.71	3.91
10	Kalsel	4.44	3.87	4.26	21	Kalteng	3.78	3.74	4.52
11	Riau	4.43	3.65	4.74	22	NTT	3.16	3.41	3.10

Sumber: Laporan Hasil Ujian Akhir Nasional

Selanjutnya, pada tabel 2 memberikan gambaran tentang nilai rata-rata hasil ujian akhir nasional kelompok mata pelajaran SMU tahun 2001/2002. Mata pelajaran utama untuk kelompok IPA yaitu fisika, kimia, biologi, dan matematika, yang nilai rata-ratanya adalah 3,74. Kelompok IPS dengan mata pelajaran ekonomi, sosiologi, dan tatanegara nilai rata-ratanya adalah 3,98, sedangkan kelompok bahasa dengan mata pelajaran sastra, bahasa asing, dan sejarah budaya, nilai rata-ratanya adalah 4,60. Perolehan nilai yang demikian rendah mempunyai implikasi yang sangat penting, yaitu lulusan tidak kompetitif dalam merebut peluang-peluang pasar kerja, dan kecendrungan semakin rendahnya mutu input ke perguruan tinggi. Hal ini berarti akan menimbulkan beban sosial dan beban pendidikan yang sangat berat, baik bagi masyarakat maupun bagi perguruan tinggi. Bagi perguruan tinggi, implikasi tersebut akan

berdampak pada rendahnya tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perguruan tinggi. Dalam kondisi yang demikian ini akan sulit untuk menjadi suatu perguruan tinggi yang tangguh.

Permasalahan yang perlu dikaji lebih jauh adalah: (1) variabel-variabel atau faktor-faktor strategis apakah yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan dasar dan menengah, dan (2) langkah-langkah strategis apakah yang diperlukan dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dalam mendukung terwujudnya perguruan tinggi yang tangguh.

Tabel 2
Nilai Rerata Mata Pelajaran Menurut Bidang Studi

IPS		IPA		BAHASA	
Mata Pelajaran	Rerata Nilai	Mata Pelajaran	Rerata Nilai	Mata Pelajaran	Rerata Nilai
Pkn	5.03	Pkn	5.61	Pkn	5.24
B.Indonesia	4.90	B. Indonesia	5.65	B.Indonesia	4.47
B. Inggris	3.59	B. Inggris	4.62	B. Inggris	4.29
Ekonomi	3.63	Fisika	3.44	Sastra	4.40
Sosiologi	4.53	Biologi	4.02	B. Asing	4.55
Tatanegara	3.79	Kimia	4.27	Sej. Budaya	4.86
		Matematika	3.25		

Sumber: Laporan Hasil Ujian Akhir Nasional

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor strategis yang mempengaruhi mutu pendidikan dasar dan menengah sebagai salah satu isu kritis dalam pendidikan.

B. Dimensi-Dimensi Mutu Pendidikan

Masalah mutu pendidikan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Para ahli mendefinisikan mutu pendidikan secara sederhana yaitu target khusus dari tujuan-tujuan pendidikan (Don Adams dan David Chapman, 2002: 1). Tetapi, terdapat pandangan yang melihat mutu pendidikan secara lebih komprehensif. Adams menulisnya sebagai berikut.

> *"More comprehensive views are also found, and interpretation of quality may be bassed on an institution's or program's reputation, the extent to which schooling has*

influenced change in student knowledge, attitudes, values, and behavior, or a complete theory or ideology of acquisition and application of learning" (Adams 1998).

Mencermati pandangan yang demikian luas, tampak bahwa kajian terhadap masalah mutu pendidikan akan sangat terkait dengan begitu banyak variabel dan sangat multidimensi. Don Adams dan David Chapman (2002) menyebut dua dimensi penting yaitu *demographic* dan *economic contextual influences*. Julian R. Betts (1999) melalui kaji petik terhadap berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh Betts 1995; Grogger 1996, Hanushek, Kain and Rivkin 1998, Rizzuto and Wachtel 1980, Card and Krueger 1992, menekankan dimensi ekonomi dalam arti ukuran terhadap mutu pendidikan harus dapat diukur, tidak hanya dilihat dari efektivitas proses pendidikan dan mutu guru, tetapi juga sejauh mana hasil pendidikan itu memberikan dampak ekonomi, baik dalam bentuk pekerjaan maupun pendapatan yang diperoleh lulusan.

Dalam perspektif global, David Chapman dan Carol A Carrier (1990) melihat dimensi teknologi dalam arti intervensi teknologi terhadap proses pendidikan. Dalam hubungan ini, indikator yang dilihat adalah kemampuan mendayagunakan teknologi meningkatkan mutu pendidikan, baik proses maupun hasil pendidikan itu sendiri. Dalam perspektif yang lebih spesifik, Achmad Sanusi (1994) menyebutkan tiga dimensi mutu pendidikan, khusus mutu hasil belajar, yaitu: (1) dimensi mutu mengajar yang sangat terkait dengan faktor-faktor kemampuan dan profesionalitas guru, sehingga kajian terhadap mutu pendidikan akan berarti harus mengkaji masalah mutu guru dan mutu proses pendidikan, (2) dimensi bahan ajar yang berbicara masalah kurikulum dalam arti sejauh mana kurikulum suatu institusi pendidikan relevan dengan kebutuhan anak di masyarakat dan kebutuhan lingkungan pendidikan yang berubah demikian cepat, (3) dimensi hasil belajar. Dimensi yang terakhir ini mencakup perolehan nilai-nilai hasil belajar maupun dalam cakupan yang luas yaitu perolehan lapangan pekerjaan dan sekaligus perolehan pendapatan setiap lulusan.

Kesulitannya ialah, akan muncul berbagai interpretasi mengenai indikator dan kebermaknaan pendidikan yang bermutu. Don Adams dan David Chapman dalam buku *"The Quality of Education: Dimensions and Strategis"* mencoba merumuskan dimensi-dimensi mutu pendidikan dengan menulis sebagai berikut.

"Education quality apparently my refer to inputs (numbers of teachers, amount of teacher training, number of textbooks), processes (amount of direct instructional time, extent of active

learning), outputs (test scores, graduation rates), and outcomes (performance in subsequent employment)" (Don Adams dan David Chapman, 2002: 1)

Pemikiran yang dikemukakan oleh Don Adams dan David Chapman menunjukkan sejumlah variabel strategis yang mempengaruhi mutu pendidikan, sekaligus dimensi-dimensi mutu pendidikan itu sendiri. Don Adams dan David Chapman ingin menunjukkan bahwa, membahas mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai mutu guru, mutu proses instruksional, mutu fasilitas yang tersedia, mutu hasil belajar, dan bahkan *performace indicators* lulusan ketika bekerja. Mengenai mutu guru, Don Adams dan David Chapman mengemukakan sejumlah faktor seperti *"teacher status, recruitment and deployment, preservice, in-service, and continuing training, incentives for teacher roles and teacher quality"*. (2002:27-29)

Di samping faktor guru, Don Adams dan David Chapman ternyata menempatkan kurikulum sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi mutu proses instruksional, dan mutu hasil belajar serta kinerja lulusan. Mereka mengemukakan sejumlah faktor kurikulum, yaitu: (1) *curriculum not well developed*, (2) *teacher do not accept or do not receive the curriculum*, (3) *too much to leam, and* (4) *poor alignment of textbookks with curriculum*. (2002:30-31)

C. Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Faktor-faktor strategis yang mempengaruhi mutu pendidikan dasar dan menengah dalam tulisan ini lebih difokuskan pada beberapa faktor, yaitu: (1) faktor kurikulum, (2) faktor guru, dan (3) faktor ekonomi pendidikan.

1. Faktor Kurikulum

Kurikulum adalah variabel yang sangat strategis, karena melalui kurikulum pengalaman belajar ditata. Dalam hubungan ini, beberapa masalah penting yang harus dijawab oleh kurikulum yang bermutu adalah: (1) relevansi kurikulum dengan kebutuhan anak dan perubahan yang terjadi di lingkungan strategis pendidikan, (2) proses dan pengalaman belajar yang hendak ditata dalam rangka pembentukan kognisi, afeksi maupun keterampilan psikomotorik, (3) beban muatan kurikulum yang juga terkait erat dengan tuntutan sosio-kultural-ekonomi masyarakat, dan (4) kelayakan kurikulum untuk dapat

diimplementasi, seperti ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan dan laboratorium.

Kritik tajam ditujukan pada kurikulum nasional yang berlaku hingga saat ini, karena kurikulum nasional tersebut dinilai kurang relevan, kurang memberi pengalaman belajar kepada siswa untuk membentuk kompetensi, dan lebih *content oriented*. Dilihat dari total alokasi waktu satu tahun, ternyata kurikulum yang berlaku selama ini merupakan yang tertinggi bila dibandingkan dengan Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Di Indonesia, seorang siswa menghabiskan waktu untuk belajar di kelas selama 1.428 jam pelajaran, di Korea Selatan 1.156 jam, di Jepang 1.050 jam, dan di Cina 1.124 jam (*Pembaruan, 15 Juli 2000*). Artinya, terdapat indikasi bahwa efektivitas belajar dan mutu proses pembelajaran tidak berjalan seiring dengan alokasi waktu yang tersedia untuk belajar. Indikasi bahwa proses pembelajaran berlangsung tidak efektif, ditunjukkan pula oleh data rasio guru dan siswa yang cenderung tidak efisien. Data tahun 2000/2001 menunjukkan, bahwa secara nasional rasio guru-siswa berada pada angka 1:14, dan rasio kelas-siswa 1:41. Dalam kondisi ideal normatif tersebut, seorang guru seyogianya dapat secara efektif dan produktif mengembangkan dan meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelas.

2. Faktor Guru

Faktor guru adalah faktor yang sangat mempengaruhi terutama dilihat dari kemampuan guru mengajar serta kelayakan guru itu sendiri. Data Pusat Statistik Pendidikan Balitbang Depdiknas 2000/2001 menunjukkan, bahwa persentase guru yang layak mengajar terhadap jumlah guru yang ada secara nasional adalah 63.79%. Artinya, masih terdapat sekitar 36.21% guru SMA yang tidak layak mengajar, baik dilihat dari kompetensi maupun kualifikasi pendidikannya. Perhatian yang belum sungguh-sungguh terhadap sumber daya pendidikan khususnya guru-guru baik dalam hal peningkatan mutu, kesejahteraan, dan kedudukan sosialnya, proses pendidikan dan perkembangan masyarakat akan lebih memperlebar kesenjangan kualitas guru-guru itu sendiri. Di masyarakat, jabatan guru tidak sepopuler jabatan seorang dokter, demikian juga pendapat seorang guru. Tidaklah mengherankan jika calon mahasiswa yang unggul lebih memilih perguruan tinggi (universitas/institut) favorit daripada LTPK. Calon mahasiswa dengan mutu yang rendah pada akhirnya akan mempengaruhi pula mutu luaran LTPK itu sendiri.

3. Faktor Ekonomi

Di samping faktor kurikulum dan guru, dalam situasi perekonomian yang belum pulih sepenuhnya, maka kemampuan dukungan dana, sarana dan prasarana masih merupakan kendala terbesar pada sebagian besar sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dari laporan *Human Development Report* (H.A.R. Tilaar, 2000:4) disebutkan bahwa dalam kurun waktu 1995-1997 angka *Expenditure on Education* (% total *Government Expenditure*) Indonesia adalah 7.9 %. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir menurun, dan tidak lebih dari 6%, berada di bawah negara-negara sesama anggota ASEAN, seperti Singapore 23.4%, Philipines 12.2%, dan Malaysia 15.4%.

D. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Memperkuat Kurikulum

Misi pendidikan dasar dan menengah ialah menyiapkan landasan-landasan nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang kuat bagi setiap peserta didik. Landasan-landasan itu merupakan modal manusia (*human capital*) yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan baru, nilai baru, keterampilan dan keahlian baru yang diperlukan untuk hidup bersama dan membangun masyarakatnya. Pengetahuan dan keahlian-keahlian itu berkembang sedemikian cepat seiring dengan tahap perubahan dan perkembangan mayarakat yang membutuhkannya.

Kurikulum adalah instrumen pendidikan yang sangat penting dan strategis dalam menata pengalaman belajar siswa, dalam meletakkan landasan-landasan pengetahuan, nilai, keterampilan dan keahlian, dan dalam membentuk artribut kapasitas yang diperlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Saat ini, memang telah dilakukan upaya-upaya untuk semakin meningkatkan relevansi kurikulum dengan melakukan revisi dan uji coba kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kurikulum uji coba tersebut didasarkan pada pendekatan, yaitu: (1) penguasaan aspek kognitif dalam bentuk kemampuan, (2) penguasaan aspek afektif yang lebih komprehensif, dan (3) penguasaan aspek keterampilan dalam bentuk kapasitas profesional. Kompetensi itu hendaknya dapat membentuk suatu kapasitas yang utuh dan komprehensif, sehingga tidak diredusir menjadi keterampilan siap pakai.

Michel, (2002), Charles Quengly (2000) mengemukakan kompetensi yang berada dalam suatu keutuhan dan komprehensif dengan kapasitas lainnya. Kompetensi mensyaratkan tiga elemen dasar, yaitu *basic, knowledge, skill (intellectual skill, participation skill)*, dan *disposition*. Melalui proses pembelajaran yang efektif, dari tiga elemen dasar ini dapat dibentuk kompetensi dan komitmen untuk setiap keputusan yang diambil. Kapasitas ini harus menjadi muatan utama kurikulum dan menjadi landasan bagi pengembangan proses pembelajaran dalam rangka pembentukan kompetensi.

2. Memperkuat Kapasitas Manajemen Sekolah

Dewasa ini, telah banyak digunakan model-model dan prinsip-prinsip manajemen modern, terutama dalam dunia bisnis untuk kemudian diadopsi dalam dunia pendidikan. Salah satu model yang diadopsi adalah *school based management*. Pricilla Wohlstetter menjelaskan konsep *school based management* sebagai berikut.

> *"School-based manajement (SBM) is a strategy to improve education by transferring significant decision-making authority from state and district offices to individual schools. SBM provides principals, teachers, students, and parents greater control over the education process by giving them responsibility for decision about the budget, personnel, and the curriculum. Through the involvement of teachers, parents, and other community members in these key decision, SBM can create more effective learning environments for children"* (Priscilla Wohlstetter, 2002).

Dalam rangka desentralisasi di bidang pendidikan, model ini mulai dikembangkan untuk diterapkan. Diproposisikan bahwa manajemen Berbasis Sekolah (MBS): (1) akan memperkuat rujukan preferensi nilai yang dianggap strategis dalam arti memperkuat relevansi, (2) memperkuat partisipasi masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pendidikan, (3) memperkuat preferensi nilai pada kemandirian dan kreativitas baik individu maupun kelembagaan, dan (4) memperkuat dan mempertinggi kebermaknaan fungsi kelembagaan sekolah.

Model MBS tersebut tidak dengan begitu saja dapat diterapkan. Untuk keberhasilan implementasi model manajemen tersebut, masih diperlukan upaya-upaya validasi terutama validasi sosio kultural, ekonomi, dan politik serta kemampuan suatu daerah untuk mengadopsi suatu inovasi. Keberlakuan prinsip-prinsip yang digunakan bagi diterapkannya MBS di Indonesia masih perlu diuji, sejauh mana prinsip-prinsip itu dapat diterapkan di setiap daerah

di Indonesia yang sangat pluralistik. Potensi dan keunggulan-keunggulan nilai budaya dan sistem masyarakat serta pranata-pranata terutama pranata pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat, di samping potensi ekonomi yang dimiliki, perlu disinergikan ke dalam prinsip-prinsip manajemen modern sehingga dapat menjadi model manajemen yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kemampuan institusi pendidikan untuk menjawab tantangan global, otonomi daerah, dan kemajuan iptek.

3. Meningkatkan Kemampuan Tenaga Kependidikan

a. Memperkuat Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan

Dalam jangka panjang, agenda utama dalam upaya memperkuat sumber daya tenaga kependidikan ialah dengan memperkuat sistem pendidikan tenaga kependidikan. Konversi 10 IKIP menjadi universitas, diharapkan akan memperkuat fungsi kelembagaan kependidikan dalam mempersiapkan tenaga kependidikan yang bermutu, dalam arti lulusan yang berkeahlian baru yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Keahlian baru itu adalah modal manusia (*human invesment*), dan memerlukan perubahan dalam sistem pembelajarannya. Menurut Thurow (Sularso, 2002), di abad ke-21 perolehan keahlian itu memerlukan perubahan dalam proses pembelajaran, karena alasan: (1) keahlian yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan akan semakin tinggi dan berubah sangat cepat, (2) keahlian yang diperlukan sangat tergantung pada teknologi dan inovasi baru, maka banyak dari keahlian itu harus dikembangkan dan dilatih melalui pelatihan dalam pekerjaan, dan (3) kebutuhan akan keahlian itu didasarkan pada keahlian individu.

Dengan latar belakang demikian, maka sistem pendidikan tenaga kependidikan yang hendak ditingkatkan ditantang untuk selalu mengembangkan pendekatan-pendekatan baru yang lebih efektif dan produktif dalam memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa. Artinya, pembenahan itu sudah harus dilakukan dengan semakin meningkatkan relevansi kurikulum, proses pembelajarannya, sistem pendukung, serta investasi yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran itu.

b. Meningkatkan Mutu Mengajar Melalui Program Inovatif Berbasis Kompetisi

Selama ini, sekolah terutama guru masih sangat terbatas dalam melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Di sisi lain, upaya untuk memperkuat kemampuan mengajar telah diupayakan melalui berbagai jenis penataran, pendidikan,

ataupun pelatihan-pelatihan. Melalui berbagai kegiatan tersebut, dikenalkan pula inovasi-inovasi pembelajaran. Tetapi dari pengalaman empirik, tampaknya upaya-upaya itu belum secara signifikan membawa perubahan dalam arti peningkatan mutu hasil belajar.

Dengan pengalaman seperti itu, maka ke depan guru-guru ditantang untuk mengembangkan inovasi pembelajaran secara kompetitif. Inovasi-inovasi yang sangat diperlukan ialah inovasi dalam mengembangkan desain pembelajaran, pengembangan bahan ajar, pengembangan strategi dan metode pembelajaran, pengembangan sistem evaluasi, maupun pengembangan MBS. Kebutuhan akan inovasi itu dapat dilihat dalam dua hal, yaitu untuk kepentingan *inventions* dan untuk kepentingan perubahan kultural sekolah, sehingga terbangun suatu kultur yang (1) berorientasi inovasi, (2) menumbuhkan kebutuhan untuk terus maju dan meningkat, (3) membutuhkan prestasi, (4) menjadikan inovasi sebagai suatu kebutuhan.

c. Mengoptimalkan Fungsi-Fungsi Tenaga Kependidikan

Selama ini yang berperan utama di sekolah adalah guru. Seorang guru melaksanakan berbagai fungsi, baik fungsi mengajar, konselor, teknisi, maupun pustakawan. Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu terdapat guru mengajar bukan berdasarkan bidang keahliannya. Kondisi ini jelas kurang menguntungkan bagi terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu. Padahal untuk terselenggaranya suatu proses pendidikan yang baik, diperlukan fungsi-fungsi kependidikan yang saling mendukung, sehingga dapat dicapai suatu hasil yang maksimal.

d. Pengembangan Kapasitas Pendanaan Sekolah Berbasis Persaingan

Kapasitas pendanaan sekolah menjadi salah satu implikasi penting bagi implementasi otonomi daerah dan desentralisasi di bidang pendidikan. Dalam konteks itu, sekolah ditantang untuk mampu mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan kapasitas pendanaannya sendiri. Di sisi lain, sekolah adalah suatu institusi nirlaba, dan berbeda dengan badan usaha lain yang berorientasi keuntungan. Di samping itu, pengalaman empirik memberikan data kepada kita bahwa selama ini pendanaan merupakan salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh semua sekolah, baik swasta maupun negeri.

Ke depan, terdapat kecendrungan bahwa subsidi langsung dari pemerintah semakin berkurang. Di perguruan tinggi, saat ini terdapat kecendrungan

pergeseran sumber pendanaan dari *governance* ke *management*. Berbagai proyek kompetitif seperti QUE, DUE, TPSDP, dan peluang BHMN untuk perguruan tinggi mengindikasikan kecendrungan pergeseran dan perubahan tersebut. Pada tingkat sekolah, indikasi tersebut dapat dibaca pada berkembangnya konsep dan paradigma MBS.

Implikasi penting dari perubahan tersebut ialah pengelolaan sumber-sumber pendanaan harus didasarkan pada prinsip selektivitas, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang tinggi. Selektivitas berarti kebutuhan investasi yang diperlukan untuk suatu proses pendidikan di sekolah harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, objektif, serta memenuhi asas kebutuhan dan pengembangan. Untuk itu, perubahan tersebut harus melalui suatu proses penilaian yang komprehensif, objektif, dan kompetitif. Efisiensi, efektivitas, dan produktivitas adalah bagian dari indikator penting yang menjadi dasar pengambilan keputusan, sejauh mana kegiatan dan investasi yang diperlukan memenuhi persyaratan penilaian.

E. Penutup

Desentralisasi di bidang pendidikan telah menjadi salah satu agenda utama pemerintah, dan tentunya dengan segala konsekuensi logis diterapkannya kebijakan tersebut. Pertanyaannya ialah, sejauh mana pemerintah telah menempatkan atau menjadikan isu peningkatan mutu pendidikan sebagai agenda strategis pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Agenda strategis tersebut harus menjadi keputusan politik pemerintah yang umumnya tercermin dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah. Secara konstitusional telah ditetapkan, bahwa pemerintah diwajibkan mengalokasikan dana untuk pendidikan sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah sudah memiliki landasan konstitusional yang memberi kewajiban impreatif untuk memberikan prioritas dalam keputusan-keputusan politik yaitu meningkatkan dukungan dana di sektor pendidikan.

Agenda prioritas tersebut selain dari investasi pendidikan adalah sarana prasarana, bahan dan peralatan, peningkatan kesejahteraan guru dan sistem promosi. Dalam hubungan ini, maka prinsip selektivitas, objektivitas, dan persaingan, harus menjadi landasan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesejahteraan dan sistem promosi tenaga kependidikan.

Daftar Pustaka

Adams, D. 1998. *Defining Educational Quality: Educational Planning.* Jurnal of Educational Planning, 11(2) 3-18).

Adams, Don dan David Chapman. 2002. *The Quality of Education: Dimensions and Strategies.* Asia Development Bank.

Rugman, Alan. 2000. *The End of Globalization.* Random Haose.

Betts, Jullian R,. 1999. *Returns to Quality of Education,* Departement of Economics. University of California: San Diego.

Chapman, David dan Carol A Carrier. 1990. *Improving Educational Quality: A Global Perspective.* Greenwood Publishing Group, Incorporated.

Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah. Laporan Hasil Ujian Akhir Nasional 2001/2002, www.pdk.go.id/infouan.

Michel. 2002. *Dimensi-dimensi Kapasitas Warga Negara,* Materi pada Training of Trainer Pendidikan Kewarganegaraan. Kerjasama Center for Civic Education Callabassas USA dengan Departemen Pendidikan Nasional RI: Yogyakarta.

Wohlstetter, Priscilla. 2002. *School-Based Management,* University of Southem California: The Finance Center of the Consortium for Policy Research in Education.

Pusat Statistik Pendidikan, Badan Penelitian dan pengembangan Departemen Pendidikan Nasional; www.pdk.go.id.

Sanusi, Achmad. 1994. *Dimensi-dimensi Hasil Belajar.* Program pascasarjana IKIP Bandung.

Tilar, H.A.R. 2000. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.* Lembaga Manajemen Universitas Negeri Jakarta.

Manajemen Berbasis Sekolah: *Strategi Jitu Meningkatkan Mutu Pendidikan*

Oleh:

Dr. Fairul Zabadi

(Pusat Bahasa)

A. Pendahuluan

Sejak beberapa waktu terakhir, kita dikenalkan dengan pendekatan baru dalam manajemen sekolah yang dikenal sebagai Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*, selanjutnya disingkat MBS). Di mancanegara, seperti Amerika Serikat, pendekatan ini sebenarnya telah berkembang cukup lama. Pada tahun 1988 American Association of School Administrators, National Association of Elementary School Principals, dan National Association of Secondary School Principals, menerbitkan dokumen berjudul *school based management, a strategy for better learning* (Bailey, 1991: 17). Munculnya gagasan ini dipicu oleh ketidakpuasan atau kegerahan para pengelola pendidikan atas keterbatasan wewenang yang mereka miliki untuk dapat mengelola sekolah secara mandiri. Mereka umumnya merasa nirdaya, karena terperangkap dalam ketergantungan berlebihan pada konteks pendidikan yang ditetapkan pemerintah. Akibatnya, peran utama mereka sebagai pemimpin pendidikan semakin dikerdilkan dengan rutinitas birokrasi yang menumpulkan kreativitas berinovasi.

Di Indonesia, gagasan penerapan MBS ini muncul sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai paradigma baru dalam pengelolaan sekolah. Sekolah selama ini hanyalah kepanjangan tangan birokrasi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan politik pendidikan (Sumarno, dkk., 2000: 9). Para pengelola sekolah sama sekali tidak memiliki banyak kelonggaran untuk mengoperasikan sekolahnya secara mandiri. Semua kebijakan tentang

penyelenggaran pendidikan di sekolah umumnya diadakan di tingkat pemerintah pusat atau sebagian di instansi vertikal, dan sekolah hanya menerima apa adanya. Kepala sekolah dan guru harus melaksanakannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Anggaran pendidikan mengalir dari pusat ke daerah, menelusuri saluran birokrasi dengan begitu banyak simpul yang masing-masing menginginkan bagian. Tidak heran jika nilai akhir yang diterima di tingkat paling operasional telah menyusut lebih dari separuhnya.

Untuk menyelaraskan pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dengan otonomi di sektor pendidikan, pengelolaan pendidikan diarahkan pada MBS. Konsep kebijakan ini dirumuskan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada warga sekolah (guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Kebijakan ini diharapkan dapat diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia.

Sehubungan dengan itu, untuk mengatasi terjadinya stagnasi di bidang pendidikan karena penerapan manajemen sentralistik selama ini, selain diperlukan paradigma baru di bidang manajemen pendidikan melalui MBS, juga diperlukan strategi jitu dalam menerapkan MBS yang ditengarai dapat memecahkan kebuntuan dalam pengelolaan pendidikan sehingga mutunya menjadi lebih baik. Dalam tulisan ini akan diuraikan strategi jitu pengelolaan MBS yang menurut penulis mampu meningkatkan mutu pendidikan umumnya dan mutu pembelajaran khususnya. Selain itu, akan diuraikan juga konsep dasar dan tujuan MBS, isu-isu dalam MBS, penyelesaian (strategi jitu dalam penerapan), kesimpulan, dan implikasi.

B. Konsep Dasar dan Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

1. Konsep Dasar

Praktik penyelenggaraan sistem pendidikan berbasis pusat atau secara sentralistik, selama ini telah mengingkari hakikat sekolah itu sendiri. Sentralisasi pendidikan telah membuat pemikiran makro, agregat, dan pukul rata mendominasi kebijakan pendidikan yang banyak menghasilkan keseragaman jenis sekolah. Sekolah menjadi subordinat dari birokrasi-birokrasi di atasnya, dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah menjadi bagian dari aktivitas-aktivitas rantai panjang birokrasi. Dengan kata lain, secara metodologis manajemen sentralistik telah terbukti tidak berhasil meningkatkan mutu pendidikan.

Sehubungan dengan itu, Tilaar (2004: 13) mengatakan bahwa masalah akuntabilitas pendidikan yang selama ini telah mengasingkan pendidikan dari masyarakat, akan dapat diatasi melalui penerapan pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*) dan manajeman pendidikan berbasis sekolah (*school based education management*) yang merupakan perwujudan nyata dari demokratisasi dan desentralisasi pendidikan. Pendidikan yang kita inginkan ialah pendidikan yang memberdayakan setiap anggota masyarakat untuk dapat berprestasi setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan dirinya.

Wahyudi (2006: 47) mengatakan bahwa wujud perubahan paradigma pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi itu menandakan adanya kesadaran baru, bahwa proses pembangunan pendidikan harus melibatkan unsur masyarakat sesuai dengan prinsip partisipasi berbasis masyarakat (*community based management)* dan konsep MBS yang kini sedang bergulir.

Bailey (1991: 26) mengatakan, bahwa MBS merupakan suatu bentuk pengaturan di mana kekuasaan pengambilan keputusan sekolah bergeser dari pemerintah pusat ke sekolah sendiri, sebagai tempat yang paling dekat dengan proses belajar mengajar. Implementasi MBS akan melahirkan sekolah yang semakin fleksibel, dalam wujud sekolah akan makin mudah memberikan tanggapan terhadap gejala-gejala dan problem yang muncul. Tanggapan-tanggapan sekolah akan tergantung pada bagaimana persepsi warga sekolah menghadapi gejala atau problem tersebut. Sekolah akan dapat dengan cepat mengambil keputusan sebagai wujud tanggapan tersebut.

Sementara itu, Meeste (2002: 18) mengungkapkan bahwa implementasi MBS diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas sekolah. Akuntabilitas sekolah berkaitan dengan adanya kaitan erat, antara dana yang dikeluarkan dan hasil atau dampak yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan dengan dana tersebut. Komite sekolah ataupun *stakeholder* yang lain dapat memonitor pengeluaran dana dari bukti-bukti pengeluaran yang ada. Implementasi MBS bukan untuk MBS itu sendiri, melainkan merupakan sarana untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu, tujuan implementasi MBS sudah jelas, yaitu meningkatkan mutu lulusan. MBS harus dapat menghasilkan berbagai perubahan yang pada akhirnya mutu lulusan meningkat. Perubahan-perubahan yang ada, merupakan sasaran antara perubahan dan tujuan akhir. Namun, tanpa muncul perubahan pada sasaran antara perubahan pada tujuan akhir tidak akan mungkin terwujud.

Slamet (2000: 8) mengatakan, bahwa esensi MBS adalah otonomi dan pengambilan keputusan partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan (kemandirian), yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Jadi, otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi/menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaftif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri.

Melalui pola MBS, sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) yang lebih besar dalam mengelola manajemennya sendiri. Kemandirian tersebut di antaranya meliputi; penetapan sasaran peningkatan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan rencana peningkatan mutu dan melakukan evaluasi peningkatan mutu. Selain itu, sekolah juga memiliki kemandirian dalam menggali partisipasi kelompok yang berkepentingan dengan sekolah, di sinilah letak ciri khas MBS. Dimensi-dimensi perubahan pola manajemen pendidikan dari yang lama ke pola yang baru menuju MBS dapat digambarkan sebagai berikut.

Manajemen Berbasis Pusat	Menuju	MBS
Subordinasi	→	Otonomi
Pengam. kep. terpusat	→	Pengam. kep. partisipasi
Ruang gerak kaku	→	Ruang gerak luwes
Pendekatan birokratik	→	Pendekatan profesional
Sentralistik	→	Desentralistik
Diatur	→	Motivasi diri
Over-regulasi	→	Deregulasi
Mengontrol	→	Mempengaruhi
Mengarahkan	→	Memfasilitasi

Sumber: Pena Pendidikan, September 2006

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep dan implementasi MBS lebih dekat dengan sistem pendidikan organik. Dengan kewenangan para aktor sekolah dalam mengambil keputusan, maka akan mendorong munculnya interaksi antaraktor lebih serius dan bertanggung jawab. Dengan adanya interaksi yang serius dan bertanggung jawab, maka akan mewujudkan proses pendidikan yang efektif. Meningkatnya akuntabilitas dan kehadiran interaksi yang positif ini akan diwujudkan pada proses yang semakin efisien. Dengan demikan, keberadaan proses yang efektif dan efisien akan meningkatkan produktivitas.

Keputusan yang diambil oleh sekolah akan mendorong munculnya inisiatif dan kreativitas warga sekolah. Mereka akan senantiasa mencari ide untuk menghadapi problem yang ada, karena mereka sadar betul, bahwa di tangan merekalah pengambilan keputusan dilakukan, dan dampak keputusan akan berbalik pada mereka sendiri. Oleh karena itu, keputusan baik akan berdampak baik pula bagi diri mereka sendiri. Seiring dengan itu, perlu dilakukan penyesuaian dini dari pola lama manajemen pendidikan menuju pola baru manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi yang demokratis.

2. Tujuan MBS

MBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan, dan sumber daya, untuk meningkatkan mutu sekolah. Slamet (2000: 15) mengatakan bahwa melalui kemandirian tersebut, maka sekolah diharapkan dapat menjadi:

a. sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya daripada lembaga lain;
b. sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk me majukan lembaganya;
c. sekolah lebih mengetahui sumber daya yang dimilikinya dan masukan pendidikan yang akan dikembangkan serta didayagunakan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik;
d. sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada, umumnya, sehingga sekolah akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan;
e. sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah yang lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orangtua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.

Apakah penerapan MBS langsung bisa mencapai tujuan utamanya? Menurut Drury dan Levin (1994), MBS belum bisa secara langsung meningkatkan pencapaian prestasi belajar siswa, tetapi MBS memiliki potensi untuk meningkatkannya. MBS secara nyata memberi kontribusi terhadap empat keluaran (*output*) pendidikan, yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk personel, meningkatkan profesionalisme guru, implementasi reformasi kurikulum dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan.

Sebagai salah satu gagasan yang diterapkan untuk meningkatkan pendidikan umum, tujuan akhir MBS adalah meningkatkan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran murid. Dengan demikian, MBS bukan sekadar cara demokratis melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan itu tidak berarti banyak jika keputusan yang diambil tidak membuahkan hasil lebih baik.

C. Isu-Isu dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

Kegalauan hati para pejabat negara tentang randahnya mutu pendidikan, ditindaklanjuti pemerintah dengan menerapkan pendidikan yang bersifat desentralisasi yaitu melalui MBS, seiring dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Meskipun demikian, dalam penerapannya banyak isu dan persoalan yang belum terselesaikan. Berikut ini disajikan empat isu yang sering dibicarakan tidak hanya oleh mereka yang terkait dalam dunia pendidikan, tetapi juga khalayak.

1. Meningkatkan Mutu Pendidikan

Meskipun belum ada hasil penelitian ilmiah yang mengatakan bahwa penerapan MBS dapat meningkatkan hasil belajar siswa, data di lapangan menunjukkan, bahwa daerah atas kabupaten yang sudah mulai menerapkan MBS menunjukkan hasil pembelajaran yang lebih baik dari daerah atau sekolah yang belum menerapkan MBS. Angka keseluruhan kelulusan siswa SD yang mencapai 98 % tersebut jika diamati lebih seksama, angka yang bagus justru diperoleh oleh daerah yang sebagian besar sekolahnya sudah menerapkan MBS walaupun belum secara utuh (sekolah tersebut sudah berani menginovasi putusan dan aturan pemerintah). Data berikut memperlihatkan bahwa kota Ambon, Jambi, Kediri, dan Yogyakarta yang lebih dari 50% sekolahnya sudah menerapkan MBS ternyata kelulusan siswa sekolah dasarnya lebih baik daripada daerah yang dalam proses pembelajarannya masih bersifat sentralistis.

Kabopaten/Kota	Nilai	Kabupaten	Nilai
Kab. Palopo	7,85	Kab. Muko-Muko	5,36
Kab. Takalar	7,51	Kab. Bima	5,33
Kota Ambon	7,50	Kab. Bengkayang	5,31
Kab. Pare-Pare	7,41	Kab. Pontianak	5,29
Kota Jambi	7,35	Kab. Sambas	5,29
Kota Kediri	7,35	Kab Sintang	5,22
Kab. Goa	7,33	Kab. Tolkara	5,19
Kota Surakarta	7,30	Kab. Puncak Jaya	5,04
Kota Yogyakarta	7,28	Kab Yahukimo	4,93

Sumber: Pena Pendidikan, September 2006

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa, daerah yang sebagian besar sekolahnya telah menerapkan MBS (Ambon (7,50), Jambi (7,35), Kediri (7, 35), dan Yogyakarta (7,28), ternyata memiliki nilai yang lebih baik daripada daerah yang sebagian sekolahnya belum menerapkan MBS (Kabupaten Muko-Muko, Bima, Bengkayang, Pontinanak, Sambas, Sintang, Tolkara, Puncak Jaya, dan Yohukimo).

2. Sekolah Berbasis Kebutuhan

Sekolah Qariyah Thayyibah di Salatiga, Jawa Timur, merupakan sekolah yang dalam penerapan MBS berdasarkan pada kebutuhan siswa. Berdasarkan kebutuhan siswanya, sekolah tersebut melakukan inovasi dan merancang sendiri kurikulum pembelajarannya. Sekolah ini bukanlah sekolah eksperimen pendidikan (sekolah percontohan) seperti yang biasa terdapat di kota besar. Di seantero Salatiga, bahkan Jawa Timur, sekolah yang pada mulanya hanya memiliki 92 siswa ini mulai harum namanya sebagai sekolah alternatif. Di sekolah tersebut para siswa tak peduli pada ujian akhir nasional. Begitu juga ujian kejar paket A, B, atau C. Kebanyakan para siswa yang tidak mengikuti ujian tersebut bukan karena tidak mampu, tetapi mereka menganggap ujian tersebut tidak menguji kemampuan siswa yang sesungguhnya.

Di Sekolah Qariyah Thayyibah tersebut juga tidak ada ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Sistem penilaian diganti dalam bentuk laporan atau evaluasi yang dibuat tiap siswa berbentuk karya tulis ilmiah untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Hasil evaluasi tersebut kemudian didiskusikan dengan guru dan teman. Dalam belajar pun mereka tidak selalu berada di dalam kelas, jika mereka bosan, mereka dapat mengusulkan kepada gurunya untuk belajar di luar kelas atau alam terbuka.

Sebelum masuk kelas, siswa sudah membawa bahan pelajaran tertentu. Materi itu dapat dari pengalaman pribadi atau diperoleh ketika berselancar di internet yang disediakan selama 24 jam. Di dalam kelas, salah seorang siswa menjadi moderator diskusi dan siswa lain berdiskusi dengan seru. Guru berfungsi sebagai mediator yang pada saat tertentu mengarahkan jalannya diskusi.

Sekolah yang menurut penulis "sangat berani" ini berkembang dengan pesat. Para siswa pun tidak hanya berasal dari daerah Salatiga, tetapi juga ada yang berasal dari Cilacap, Cirebon, Tumenggung, bahkan Jakarta. Mereka ada yang tinggal di pondok pesantren dan ada pula yang tinggal di rumah penduduk. Kemampuan siswa sekolah ini tidak kalah dengan kemampuan siswa sekolah formal lainnya. Misalnya, Rasih, salah seorang siswa berusia 15 tahun, pernah diundang beberapa kali oleh PT. Agra Cinal Bengkulu untuk menjadi fasilitator dalam pelatihan metode pembelajaran. Remaja putri yang fasih berbahasa Inggris ini juga pernah berpidato di depan 90 orang kepala sekolah berprestasi di Jakarta. Kefasihan berbahasa Inggris ditindaklanjuti Rasih dengan membuat terjemahan biografi tokoh gerilya legendaris Che Guevera. (Sumber, *Tempo,* 12 Oktober 2006)

3. Peran Pemerintah Pusat, Daerah, dan Dewan Sekolah

Apa pengaruh penerapan MBS terhadap kewenangan pemerintah pusat (Depdiknas), dinas pendidikan daerah, dan dewan sekolah? Pertanyaan ini sering muncul dalam beberapa pertemuan ilmiah tentang otonomi pendidikan dan MBS.

Penerapan MBS dalam sistem pemerintahan yang masih cenderung terpusat tentu akan banyak pengaruhnya. Perlu diingat, bahwa penerapan MBS akan sangat sulit jika para pejabat pusat dan daerah masih bertahan untuk menggenggam sendiri kewenangan yang seharusnya didelegasikan ke sekolah. Bagi para pejabat yang haus kekuasaan seperti itu, MBS adalah ancaman besar.

MBS menyebabkan pejabat pusat dan kepala dinas serta seluruh jajarannya lebih banyak berperan sebagai fasilitator pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Dalam rangka pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah pusat tentu saja masih menjalankan politik pendidikan secara nasional. Pemerintah pusat menetapkan standar nasional pendidikan yang mencakup standar kompetensi, standar fasilitas dan peralatan sekolah, standar kepegawaian, standar kualifikasi guru, dan sebagainya. Penerapan standar

disesuaikan dengan keadaan daerah. Standar ini kemudian diterapkan oleh pemerintah daerah (dinas pendidikan) dengan melibatkan sekolah-sekolah di daerahnya. Namun, pemerintah pusat dan daerah harus lebih rela untuk memberi kesempatan bagi sekolah yang telah siap untuk menerapkan MBS secara kreatif dan inovatif. Jika tidak, sekolah akan tetap tidak berdaya dan guru akan terpasung kreativitasnya untuk berinovasi. Pemerintah harus mampu memberikan bantuan jika sekolah tertentu mengalami kesulitan menerjemahkan visi pendidikan yang ditetapkan daerah menjadi program pendidikan yang berkualitas tinggi. Pemerintah daerah juga masih bertanggung jawab untuk menilai sekolah berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Dalam rangka penerapan MBS di Indonesia, kantor dinas pendidikan kemungkinan besar akan terus berwenang merekrut pegawai potensial, menyeleksi pelamar pekerjaan, dan memelihara informasi tentang pelamar yang cakap bagi keperluan pengadaan pegawai di sekolah. Kantor dinas pendidikan juga sedikit banyaknya masih menetapkan tujuan dan sasaran kurikulum, serta hasil yang diharapkan berdasarkan standar nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, sedangkan sekolah menentukan sendiri cara mencapai tujuan itu. Sebagian daerah boleh jadi akan memberi kewenangan bagi sekolah untuk memilih sendiri bahan pelajaran (buku misalnya), sementara sebagian yang lain mungkin akan masih menetapkan sendiri buku pelajaran yang akan dipakai dan yang akan digunakan seragam di semua sekolah.

Sejak awal, pemerintah (pusat dan daerah) haruslah sportif atas gagasan MBS. Mereka harus mempercayai kepala sekolah dan dewan sekolah untuk menentukan cara mencapai sasaran pendidikan di masing-masing sekolah. Penting artinya memiliki kesepakatan tertulis yang memuat secara rinci peran dan tanggung jawab dewan pendidikan daerah, dinas pendidikan daerah, kepala sekolah, dan dewan sekolah. Kesepakatan itu harus dengan jelas menyatakan standar yang akan dipakai sebagai dasar penilaian akuntabilitas sekolah. Setiap sekolah perlu menyusun laporan kinerja tahunan yang mencakup "seberapa baik kinerja sekolah dalam upayanya mencapai tujuan dan sasaran, bagaimana sekolah menggunakan sumber dayanya, dan apa rencana selanjutnya."

4. Tantangan di Lapangan

Dalam menerapkan MBS, pihak-pihak berkepentingan sering menghadapi beberapa tantangan di lapangan, baik yang bersifat akademis maupun yang non-akademis. Tantangan-tantangan tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Tidak berminat untuk terlibat

Sebagian orang tidak menginginkan kerja tambahan selain pekerjaan yang sekarang mereka lakukan. Mereka tidak berminat untuk ikut serta dalam kegiatan yang menurut mereka hanya menambah beban. Anggota dewan sekolah harus lebih banyak menggunakan waktunya dalam hal-hal yang menyangkut perencanaan dan anggaran. Akibatnya, kepala sekolah dan guru tidak memiliki banyak waktu yang tersisa untuk memikirkan aspek-aspek lain dari pekerjaan mereka. Tidak semua guru akan berminat dalam proses penyusunan anggaran atau tidak ingin menyediakan waktunya untuk urusan itu.

b. Tidak efisien

Pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif adakalanya menimbulkan frustrasi dan seringkali lebih lamban dibandingkan dengan cara-cara yang otokratis. Para anggota dewan sekolah harus dapat bekerja sama dan memusatkan perhatian pada tugas, bukan pada hal-hal lain di luar itu. Setelah beberapa saat bersama, para anggota dewan sekolah kemungkinan besar akan semakin kohesif. Di satu sisi, hal ini berdampak positif karena mereka akan saling mendukung satu sama lain. Di sisi lain, kohesivitas itu menyebabkan anggota terlalu kompromis hanya karena tidak merasa enak berlainan pendapat dengan anggota lainnya. Pada saat inilah dewan sekolah mulai terjangkit pikiran kelompok. Ini berbahaya karena keputusan yang diambil kemungkinan besar tidak lagi realistis.

c. Memerlukan pelatihan

Pihak-pihak yang berkepentingan kemungkinan besar sama sekali tidak atau belum berpengalaman menerapkan model yang rumit dan partisipatif ini. Mereka kemungkinan besar tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang hakikat MBS sebenarnya dan bagaimana cara kerjanya, pengambilan keputusan, komunikasi, dan sebagainya.

d. Kebingungan atas peran dan tanggung jawab baru

Pihak-pihak yang terlibat kemungkinan besar telah sangat terkondisi dengan iklim kerja yang selama ini mereka geluti. Penerapan MBS mengubah peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan. Perubahan yang mendadak kemungkinan besar akan menimbulkan kejutan dan kebingungan, sehingga mereka ragu untuk memikul tanggung jawab pengambilan keputusan.

5. Kesulitan Koordinasi

Setiap penerapan model yang rumit dan mencakup kegiatan yang beragam mengharuskan adanya koordinasi yang efektif dan efisien. Tanpa itu, kegiatan yang beragam akan berjalan sendiri ke tujuannya masing-masing yang kemungkinan besar sama sekali menjauh dari tujuan sekolah. Apabila pihak-pihak yang berkepentingan telah dilibatkan sejak awal, mereka dapat memastikan bahwa setiap hambatan telah ditangani sebelum penerapan MBS. Dua unsur penting adalah pelatihan yang cukup tentang MBS dan klarifikasi peran serta tanggung jawab dan hasil yang diharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, semua yang terlibat harus memahami apa saja tanggung jawab pengambilan keputusan yang dapat dibagi, oleh siapa, dan pada level mana. Anggota masyarakat sekolah harus menyadari bahwa adakalanya harapan yang dibebankan kepada sekolah terlalu tinggi. Pengalaman penerapannya di tempat lain menunjukkan bahwa daerah yang paling berhasil menerapkan MBS telah memfokuskan harapan mereka pada dua maslahat: meningkatkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan menghasilkan keputusan lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa penerapan MBS masih belum sesuai dengan prosedur yang sebenarnya. Ada sekolah yang menerapkan MBS secara setangah-setengah, dan ada pula sekolah yang menerpakan MBS secara berlebihan. Oleh karena itu, kegagalan dalam mengimplementasikan MBS selama ini tampaknya disebabkan antara lain oleh faktor berikut.

a. Sekadar mengadopsi model apa adanya tanpa upaya kreatif.
b. Kepala sekolah bekerja berdasarkan agendanya sendiri tanpa pemperhatikan aspirasi seluruh anggota dewan sekolah.
c. Kekuasaan pengambilan keputusan terpusat pada satu pihak dan cenderung semena-mena.
d. Menganggap bahwa MBS adalah hal biasa dengan tanpa usaha yang serius akan berhasil dengan sendirinya.

D. Penyelesaian: Strategi Jitu Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah

Kita belum memiliki pengalaman untuk mengaitkan penerapan MBS dengan prestasi belajar murid. Di Amerika Serikat (David Peterson, ERIC_ Digests, downloaded April 2002), upaya mengaitkan MBS dengan prestasi

belajar murid masih problematis. Salah satu studi yang dilakukan dengan menelaah ratusan dokumen justru menunjukkan bahwa dalam banyak contoh, MBS tidak mencapai tujuan yang ditetapkan. Studi itu menunjukkan bahwa peningkatan prestasi murid tampaknya hanya terjadi di sejumlah sekolah yang dijadikan pilot studi dan dalam jangka waktu tidak lama pula. Hasil MBS di daerah perkotaan masih belum jelas benar. Di sekolah daerah pinggiran kota Maryland menunjukkan adanya peningkatan prestasi murid dalam nilai tes, terutama di kalangan orang Amerika keturunan Afrika setelah menerapkan lima langkah rencana reformasi, termasuk MBS. Namun, di tempat lain, seperti Dade County, Florida, setelah menerapkan MBS selama tiga tahun, prestasi murid di sekolah dalam kota justru menurun.

Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Indonesia. Penerapan MBS yang belum merata di semua wilayah nusantara masih dipertanyakan keberhasilannya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah yang kelihatannya '*nakal*', tidak selalu patuh mengikuti petunjuk pemerintah, bahkan kadang-kadang terkesan membandel, merupakan sekolah yang sebenarnya telah menerapkan MBS. Kepala sekolah dan gurunya menganggap petunjuk tersebut kurang sesuai dengan kondisi nyata sekolahnya. Mereka yakin, bahwa peraturan dari pusat bukan peraturan '*mati*' yang tak dapat diubah sesuai kondisi sekolah itu sendiri. Peraturan pemerintah, secara cerdas mereka terjemahkan menjadi suatu hal yang mendorong untuk bertindak kreatif. Kepala sekolah dan para guru secara kritis mengevaluasi petunjuk pemerintah dan melakukan penyesuaian agar bermanfaat secara optimal bagi pengembangan sekolahnya. Sekolah yang seperti ini ternyata memiliki profil yang kuat, mandiri, inovatif, dan memberikan iklim yang kondusif. Kondisi itu memacu motivasi warganya untuk mengembangkan sikap kritis dan kreatif. Sekolah memiliki kerangka akuntabilitas yang kuat dengan memberikan pelayanan yang bermutu kepada siswa dan warganya. Orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi secara aktif karena sekolah dapat memenuhi kebutuhan mereka, menghargai ide mereka, dan responsif terhadap aspirasi mereka.

Sebagai penyelesaian terhadap pelaksanaan MBS yang belum dapat memenuhi tujuannya, penulis menawarkan empat strategi, yaitu: (1) ciptakan sekolah yang efektif dan mandiri, (2) galakkan kembali komite sekolah (dewan sekolah), (3) tingkatkan kinerja guru, kepala sekolah, dan dewan pengawas, dan (4) terapkan langkah dan syarat yang tepat.

1. Ciptakan Sekolah yang Efektif dan Mandiri

Strategi jitu dalam penerapan MBS tersebut akan sangat optimal dalam mencapai sasaran apabila sudah tercipta sekolah yang efektif (*effective school*), yaitu sekolah yang memiliki: (1) visi dan misi yang jelas dan target mutu yang harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara lokal, (2) keluaran yang selalu meningkat setiap tahun, (3) lingkungan yang aman, tertib, dan menyenangkan bagi warga sekolah, (4) seluruh personil sekolah memiliki visi, misi, dan harapan yang tinggi untuk berprestasi secara optimal, (5) sistem evaluasi yang kontinyu dan komprehensif terhadap berbagai aspek akademik dan nonakademik, (6) pengembangan staf secara terus-menerus sesuai dengan perkembanan IPTEK, (7) pemanfaatan hasil evaluasi, dan (8) komunikasi dan dukungan intensif orangtua. Untuk lebih jelasnya, gambaran sekolah yang efektif dapat dilihat pada bagan berikut.

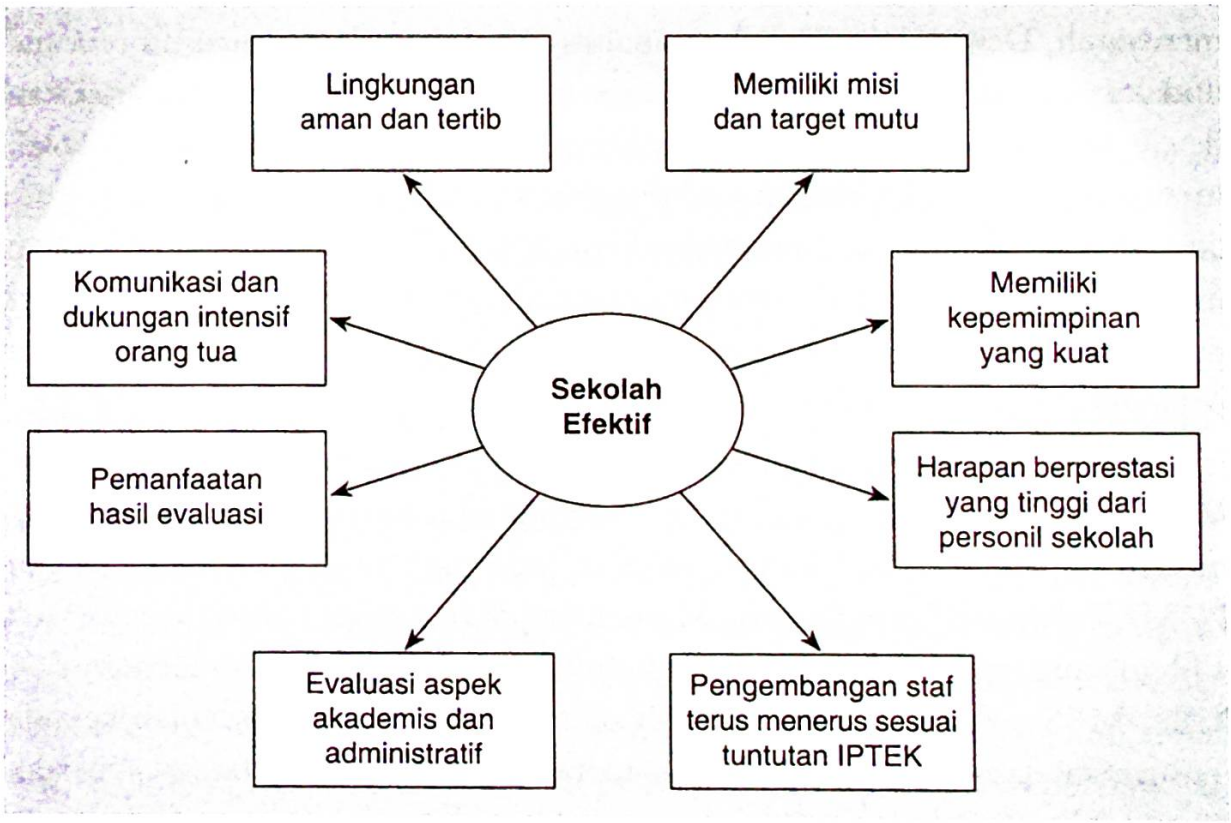

Dengan demikian, secara bertahap akan terbentuk sekolah yang mandiri, yaitu sekolah yang tingkat ketergantungannya pada pemerintah rendah, bersifat adaptif dan antisipatif, memiliki jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, gigih, berani mengambil risiko), bertanggung jawab terhadap masukan manajemen

dan sumber dayanya, memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja, komitmen yang tinggi pada dirinya, dan prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya.

2. Galakkan Kembali Dewan Sekolah (Komite Sekolah)

Di Amerika Serikat, dewan sekolah (di tingkat distrik) berfungsi untuk menyusun visi yang jelas dan menetapkan kebijakan umum pendidikan bagi distrik yang bersangkutan dan semua sekolah di dalamnya. MBS di Amerika Serikat tidak mengubah pengaturan sistem sekolah, dan dewan sekolah masih memiliki kewenangan dengan berbagi kewenangan itu. Namun, peran dewan sekolah tidak banyak berubah.

Di Amerika Serikat, kebanyakan sekolah memiliki apa yang disebut dewan manajemen sekolah (*school management council*). Dewan ini beranggotakan kepala sekolah, wakil orang tua, wakil guru, dan di beberapa tempat juga anggota masyarakat lainnya, staf administrasi, dan wakil murid di tingkat sekolah menengah. Dewan ini melakukan analisis kebutuhan dan menyusun rencana tindakan yang memuat tujuan dan sasaran terukur yang sejalan dengan kebijakan dewan sekolah di tingkat distrik. Di beberapa distrik, dewan manajemen sekolah mengambil semua keputusan pada tingkat sekolah. Di sebagian distrik yang lain, dewan ini memberi pendapat kepada kepala sekolah, yang kemudian memutuskannya. Kepala sekolah memainkan peran yang besar dalam proses pengambilan keputusan, apakah sebagai bagian dari sebuah tim atau sebagai pengambil keputusan akhir.

Meskipun kita belum memiliki pengalaman dengan dewan sekolah, komite sekolah pernah kita terapkan yang kemudian kita lupakan. Oleh karena itu, menghidupkan kembali komite sekolah (ada juga yang menyebut dengan PGMP, Persatuan Guru Pemuda Masyarakat) di Indonesia tampaknya menjadi pilihan yang tepat seiring dengan kebutuhan sekolah yang sudah menerapkan MBS. MBS yang maksudnya adalah mengembalikan peran sekolah kepada masyarakat dapat diwujudkan dengan mengikutsertakan orangtua siswa melalui komite sekolah dalam pengelolaan pendidikan. Kerja sama yang baik antara sekolah dan warga masyarakat akan dapat memecahkan kebuntuan, khususnya jika ada kekurangan dana dalam menjalankan ekstrakurikuler.

Peran strategis komite sekolah sebagai wadah untuk menyalurkan peran serta masyarakat sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat befungsi sebagai mitra kerja yang dapat diajak berembug untuk membicarakan masalah masa depan sekolah, sebagai pendukung bagi peningkatan mutu pendidikan, sebagai pengawas pendidikan di sekolah, sebagai mediator antara orang tua, sekolah, dan masyarakat (Sidi, 2003).

Dengan demikian, komite sekolah dapat berfungsi sebagai alat untuk melibatkan para wali murid dalam berbagai prakarsa untuk pengembangan sekolah. Para orang tua murid lebih termotivasi dan berkeinginan untuk memberikan sumbangan dalam kegiatan pengembangan sekolah apabila mereka diberi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kegiatan belajar-mengajar. Adanya kerja sama yang baik dan tanggung jawab bersama terhadap peningkatan mutu pendidikan, akan menggiring komite sekolah tersebut selayaknya dihuni oleh orang-orang profesional, paling tidak mereka yang memahami masalah pendidikan, bukan orang kaya semata.

3. Tingkatkan Kinerja Guru, Kepala Sekolah, dan Dewan Pengawas

Pelaku-pelaku utama di sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan pengawas merupakan penentu keberhasilan sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, kinerja mereka harus ditingkatkan agar sasaran MBS dapat terpenuhi.

Di dalam menjalankan tugasnya kepala sekolah adalah seorang pemimpin atau seorang manajer yang perlu mengetahui tugas-tugas manajemen. Kepala sekolah harus membuat perencanaan sekolah setiap tahun. Perencanaan tersebut mencakupi tujuan yang akan dicapai materi belajar, baik yang bersifat akademis maupun yang bersifat praktis, serta perencanaan tenaga pendidik. Selain itu, kepala sekolah juga harus melakukan pengawasan dan penilaian, serta pegendalian terhadap semua kegiatan belajar-mengajar sesuai dengan program yang telah ditetapkan setiap hari. Misalnya, jika ada guru yang kurang disiplin, kurang memberikan nilai-nilai pendidikan atau kurang menguasai ilmu yang diajarkan, maka kepala sekolah perlu mengambil tindakan perbaikan. Kepala sekolah dapat juga mengadakan pertemuan setiap hari setelah jam sekolah untuk memebicarakan berbagai hal sekaitan dengan tugas supervisi.

Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas fungsi sekolah adalah seorang yang profesional. Artinya, seorang guru dituntut untuk dapat melaksanakan tugas pengajaran dan edukasi. Di dalam melaksanakan tugas pengajaran, guru harus menguasai ilmu yang diajarkan, metode pegajaran,

dan mengenal anak didiknya, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Untuk itu, guru harus dapat menjadi dokter yang mampu melakukan diagnosis untuk menemukan kelemahan-kelemahan siswa sebelum mengajarkan ilmu yang telah dikuasainya. Dengan demikian, seorang guru dalam menjalankan tugasnya harus mampu:

a. berkomunikasi dengan baik kepada seluruh siswa atau khalayak,
b. melakukan pengajian sederhana dalam mengenal anak,
c. menulis hasil kajian,
d. menyiapkan sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran,
e. menyusun dan menyajikan materi ajar secara kongrit, dan
f. melaksanakan penelian secara objektif sesuai dengan taksonomi Blom dan mengoreksinya setiap hari.

Untuk itu, kreativitas dan profesionalisme guru sangat dibutuhkan. Etika dan dedikasi guru yang tinggi sangat dituntut agar MBS dapat terwujud.

Untuk mengetahui sejauh mana sekolah menjalankan tugasnya, peran pengawas sangat vital. Pengawas merupakan jembatan bagi pembuat keputusan yang ada di birokrat untuk memberikan masukan dalam mengambil kebijakan, khususnya yang bersifat teknis. Pengawasan itu dapat mencakupi hal yang bersifat teknis dan administratif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Tugas pengawas ini dapat bersinergi dengan komite sekolah atau masyarakat dalam memantau pelaksanaan pembelajaran. Jika hal ini dilakukan dengan sepenuh hati, penerapan MBS akan berjalan optimal.

4. Terapkan Sembilan Langkah dan Sembilan Syarat

Pada dasarnya, mengubah pendekatan manajemen berbasis pusat menjadi MBS bukanlah merupakan *one-shot and quick-fix*, tetapi merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus dan melibatkan semua unsur yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan persekolahan. Meskipun demikian, berdasarkan penerapan MBS selama ini, tampaknya perlu strategi jitu agar sasaran yang diinginkan dapat terpenuhi. Penulis melihat bahwa sembilan langkah berikut perlu ditempuh dan dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan agar hasil MBS tersebut lebih optimal.

a. Mensosialiasikan konsep MBS kepada seluruh warga sekolah, yaitu guru, siswa, wakil kepala sekolah, konselor, karyawan, dan unsur-unsur terkait lainnya (orangtua murid, pengawas, wakil kandep, wakil kanwil,

dan sebagainya) melalui seminar, diskusi, forum ilmiah, dan media masa. Hendaknya dalam sosialisasi ini juga dilihat dan dipahami sistem, budaya, dan sumber daya sekolah yang ada secermat-cermatnya dan direfleksikan kecocokannya dengan sistem, budaya, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan MBS.

b. Melakukan analisis situasi sekolah dan luar sekolah yang hasilnya berupa tantangan nyata yang harus dihadapi oleh sekolah dalam rangka mengubah manajemen berbasis pusat menjadi MBS. Tantangan adalah selisih (ketidaksesuaian) antara keadaan sekarang (manajemen berbasis pusat) dan keadaan yang diharapkan (MBS). Oleh karena itu, besar kecilnya ketidaksesuaian antara keadaan sekarang (kenyataan) dan keadaan yang diharapkan (idealnya) memberitahukan besar kecilnya tantangan (loncatan).

c. Merumuskan tujuan situasional yang akan dicapai dalam pelaksanaan MBS berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi. Setelah tujuan situasional ditetapkan, kriteria kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya ditetapkan. Kriteria inilah yang akan digunakan sebagai standar atau kriteria untuk mengukur tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya.

d. Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan untuk mencapai tujuan situasional dan yang masih perlu diteliti tingkat kesiapannya. Untuk mencapai tujuan situasional yang telah ditetapkan, maka perlu diidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan, seperti pengembangan kurikulum, pengembangan tenaga kependidikan dan nonkependidikan, pengembangan siswa, pengembangan iklim akademik sekolah, pengembangan hubungan sekolah-masyarakat, pengembangan fasilitas, dan fungsi-fungsi lain.

e. Menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya melalui analisis SWOT (*Strength, Weaknes, Opportunity, and Threat*) yang sering menjadi acuan dalam dunia kewirausahaan. Analisis SWOT dilakukan dengan maksud mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan situasional yang telah ditetapkan. Berhubung tingkat kesiapan fungsi ditentukan oleh tingkat kesiapan masing-masing faktor yang terlibat pada setiap fungsi, maka analisis SWOT dilakukan terhadap keseluruhan faktor dalam setiap fungsi, baik faktor yang tergolong internal maupun eksternal. *Kekuatan* dan *kelemahan* bagi faktor yang tergolong internal; sedangkan *peluang* dan *ancaman* bagi faktor yang tergolong faktor eksternal.

f. Memilih langkah-langkah pemecahan (peniadaan) persoalan, yakni tindakan yang diperlukan untuk mengubah fungsi yang tidak siap menjadi fungsi yang siap. Jika masih ada persoalan, yang berarti masih ada ketidaksiapan fungsi, maka tujuan situasional yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, agar tujuan situasional tercapai, perlu dilakukan tindakan-tindakan yang mengubah ketidaksiapan menjadi kesiapan fungsi. Tindakan yang dimaksud lazimnya disebut langkah-langkah pemecahan persoalan.

g. Berdasarkan langkah-langkah pemecahan persoalan tersebut, sekolah bersama-sama dengan semua unsur-unsurnya membuat rencana untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, beserta program-programnya untuk merealisasikan rencana tersebut. Sekolah tidak selalu memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan MBS idealnya sehingga perlu dibuat skala prioritas untuk rencana jangka pendek, menengah, dan panjang.

h. Melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana jangka pendek MBS. Dalam pelaksanaannya, semua masukan diperlukan untuk berlangsungnya proses pelaksanaan MBS. Jika masukan tidak siap/ tidak memadai, maka tujuan situasional tidak akan tercapai. hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan adalah pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, dan pengelolaan proses belajar mengajar.

i. Pemantauan terhadap proses dan evaluasi terhadap hasil MBS perlu dilakukan. Hasil pantauan proses dapat digunakan sebagai pembalikan *(feedback)* bagi perbaikan penyelenggaraan dan hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan situasional yang telah dirumuskan.

Selain kesembilan langkah tersebut, menurut hemat penulis, implementasi MBS akan lebih berhasil jika sembilan syarat berikut juga terpenuhi.

a. Sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal, yaitu memiliki kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan yang berkesinambungan, akses informasi ke segala bagian dan pemberian penghargaan kepada setiap orang yang berhasil.

b. Adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum, dan instruksional serta non-instruksional.

c. Adanya kepemimpinan kepala sekolah yang mampu menggerakkan dan mendayagunakan setiap sumberdaya sekolah secara efektif.

d. Adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif.

e. Semua pihak harus memahami peran dan tanggungjawabnya secara sungguh-sungguh.

f. Adanya petunjuk (*guidelines*) dari departemen terkait, sehingga mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif. Petunjuk itu jangan sampai berupa peraturan-peraturan yang mengekang dan membelenggu sekolah.

g. Sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal diwujudkan dalam laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya.

h. Penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar siswa.

i. Implementasi diawali dengan sosialisasi dari konsep MBS, identifikasi peran masing-masing, mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap peran barunya, implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan di lapangan dan dilakukan perbaikan-perbaikan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Mengubah manajemen berbasis pusat menjadi MBS merupakan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Transisi ini memerlukan penyesuaian, baik sistem atau struktur, kultur, maupun figurnya, dengan tuntutan-tuntutan baru MBS. Oleh karena itu, kita tidak bermimpi bahwa perubahan ini akan berlangsung sekali jadi dan baik hasilnya. Untuk itu, fleksibilitas dan eksperimentasi-eksperimentasi yang menghasilkan kemungkinan-kemungkinan baru dalam penyelenggaraan MBS perlu didorong.

Penerapan MBS yang efektif seyogianya dapat mendorong kinerja kepala sekolah dan guru yang pada gilirannya akan meningkatkan prestasi murid. Oleh karena itu, harus ada keyakinan bahwa MBS memang benar-benar akan berkontribusi bagi peningkatan prestasi murid. Ukuran prestasi harus ditetapkan multidimensional, jadi bukan hanya pada dimensi prestasi akademik.

Bagan berikut memperlihatkan bahwa MBS sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau pembelajaran kontekstual sangat membantu strategi jitu dalam penerapaan MBS.

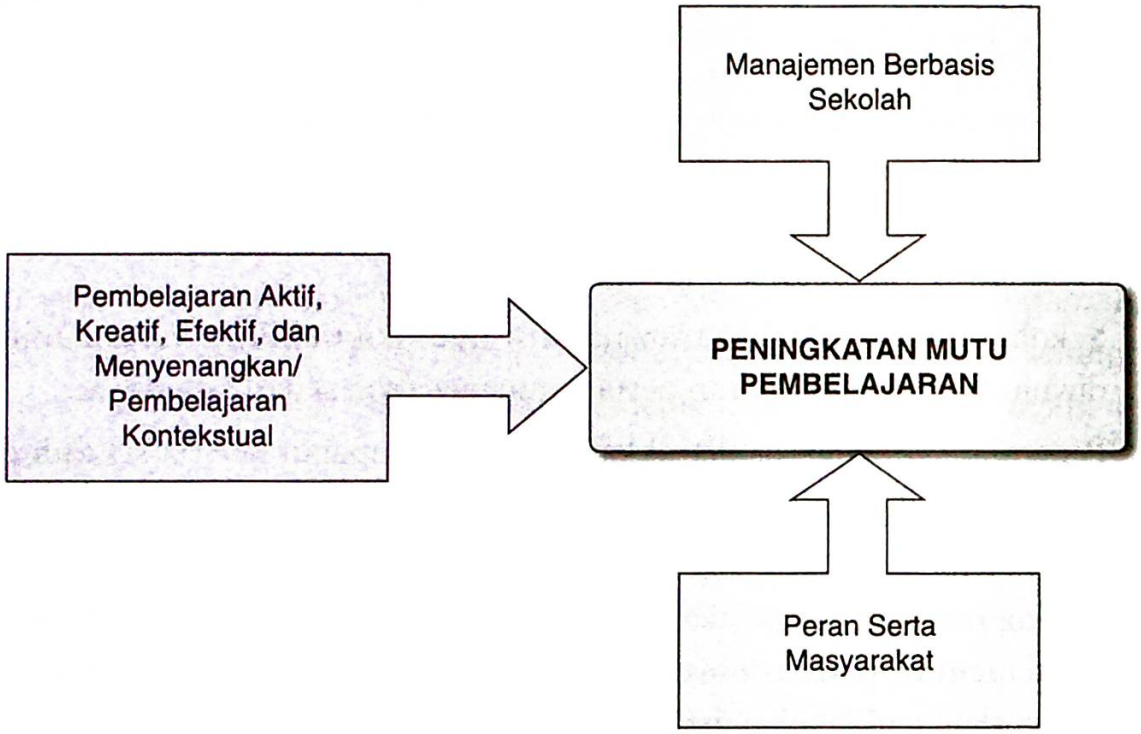

Strategi jitu (sembilan langkah dan sembilan syarat di atas) dalam penerapan MBS tersebut akan sangat optimal hasilnya apabila mendapat dukungan kuat dari semua yang terlibat dalam proses pembelajaran, diterapkan secara bertahap, staf sekolah dan kantor dinas harus memperoleh pelatihan penerapannya dan pada saat yang sama juga harus belajar menyesuaikan diri dengan peran dan saluran komunikasi yang baru, disediakan dukungan anggaran untuk pelatihan dan penyediaan waktu bagi staf untuk bertemu secara teratur, pemerintah pusat dan daerah harus mendelegasikan wewenang kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah selanjutnya berbagi kewenangan ini dengan para guru dan orangtua murid.

2. Implikasi

Penerapan MBS dengan strategi jitu tersebut dapat berimpilikasi pada peningkatan nilai tes yang dapat dipakai sebagai indikasi langsung kemampuan MBS dalam meningkatkan prestasi belajar murid. Sementara itu, pengambilan

keputusan yang didesentralisasikan berimplikasi pada penciptaan lingkungan pendidikan yang lebih efektif. Misalnya, salah seorang guru memutuskan untuk mengurangi penggunaan mesin fotokopi agar dapat mempekerjakan staf tambahan. Tinjauan tahunan sekolah menunjukkan, bahwa kepuasan murid sekolah menengah pertama dan lanjutan meningkat terhadap banyak hal setelah diadakannya pembaruan, dan para murid menunjukkan adanya peningkatan dalam bidang-bidang penting, seperti kegunaan dan efektivitas mata pelajaran dan penekanan sekolah atas sejumlah kecakapan dasar.

Penerapan MBS juga berimplikasi pada penataan ulang fungsi, peran, tugas dan tanggung jawab dari seluruh pemilik kepentingan (*stakeholders*) sekolah, seperti siswa, guru, kepala sekolah, warga sekolah lainnya, orang tua, masyarakat termasuk bisnis, dan pemerintah. Dalam kerangka akuntabilitas, sekolah harus pula tetap bergerak dalam koridor kebijakan umum pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, mengingat kompleksitas permasalahan tersebut, maka komitmen bersama, sikap kolaboratif, dan sinergi langkah dari semua lapisan birokrasi pendidikan, warga sekolah dan warga masyarakat mutlak diperlukan bagi keberhasilan MBS, dan tentu saja bagi suksesnya pendidikan nasional kita.

Daftar Pustaka

Bailey, William J. 1991. *School-Site management Applied.* Lancaster-Basel: Technomic Publishing.

Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Pena Pendidikan:* Jakarta: PT Rineka Gagas Cipta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang RI No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Departemen Pendidikan Nasional, 2006. *"Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005–2009: Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025".*

Kubick (1988) tentang *School-Based Management*, http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed301969.html.

Peterson, David *"School-Based Management and Student Performance"* http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed336845.html.

Raharjo, Budi. 2003 *Manajemen Berbasis Sekolah.* Jakarta: Departemen Pendidikan nasional, Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Tenaga Kependidikan.

Sidi, Indra Djati. 2003. *"Sinergi Pendidikan, Pemerintah Cuci Tangan"* dalam *Suara Merdeka,* 10 Maret 2003.

Suryadi, Ace. 2003. *"Mewujudkan Sekolah yang Mandiri dan Otonomi"* dalam *Dunia Guru Online.* http://dunia guru/index html#forum.

Slamet PH. 2000. *"Menuju Pengelolaan Pendidikan Berbasis Sekolah".* Yogyakarta: Ambarukmo Palace Hotel.

Sumarno, Dkk. 2000. *"Otonomi Pendidikan".* Kertas Kerja Dibahas di Universitas Negeri Yogyakarta dalam Rangka Memberi Masukan kepada Menteri Pendididkan Nasional.

Tilaar, H.A.R. 2004. *Paradigama Baru Pendidikan Nasional.* Jakarta: Rineka Cipta.

———, 2005. *Manifesto Pendidikan Nasional.* Jakarta: Buku Kompas.

———, 2006. *Standardisasi Pendidikan Nasional.* Jakarta: Rineka Cipta.

Wahyudi, Agus. 2006. "Dominasi Negara Atas Pendidikan". Dalam *Basis*, 2006. Yogyakarta. PB Basis.

Isu Kritis Seputar Pendidikan Non-Formal

Oleh:
Supeno

A. Pendahuluan

Di negara-negara kawasan Asia-Pasifik masih terdapat 612 juta orang muda dan dewasa buta aksara dan lebih dari 60 juta anak tidak sekolah. Dari kondisi itu, 19 negara yang tergabung dalam forum pendidikan dunia bertekad untuk mencapai tujuan pendidikan untuk semua (PUS), agar hak memperoleh pendidikan setiap individu terpenuhi.

Dalam upaya mencapai tujuan itu, setiap negara diharuskan untuk menempatkan pendidikan non-formal (PNF) sebagai mitra setara pendidikan formal. Memahami keberagaman dan kerumitan kawasan Asia-Pasifik, pendekatan-pendekatan non-formal dan formal dalam pendidikan dapat memperkuat satu sama lain dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan. Untuk itu pula forum pendidikan dunia menghimbau semua mitra PUS untuk mengoptimalkan peran PNF dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan oleh kerangka aksi dakar (2001) seperti mengoptimalkan pendidikan anak usia dini (PAUD), menjamin semua anak mengenyam pendidikan, mencapai peningkatan 50% tingkat keaksaraan orang dewasa, menghilangkan kesenjangan gender dalam pendidikan, serta memperbaiki semua aspek mutu pendidikan dan menjamin keunggulan semua program (kesetaraan pendidikan) yang diakui dan terukur (Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, 2003: 23–25).

Indonesia menghadapi berbagai kendala untuk mencapai tujuan PUS. Salah satu kendala itu adalah rendahnya mutu sumber daya manusia (SDM).

Untuk kawasan Asia Tenggara saja, Indonesia berada di urutan paling rendah dalam indeks pembangunan manusia (*Human Development Index–HDI*). Faktor yang dijadikan penilaian adalah tingkat ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan survei UNDP tahun 2004, dari ketiga kombinasi parameter itu, Indonesia berada pada peringkat ke 111 dari 175 negara. Berdasarkan data tiga tahun terakhir, posisi Vietnam bertahan pada posisi 109 dari 175 negara yang diteliti. Sementara, Indonesia justru merosot dari peringkat 110 (tahun 2002) menjadi 112 (tahun 2003).

Kemiskinan menjadi indikator yang penting terhadap rendahnya indeks Pembangunan manusia (HDI) Indonesia. Berdasarkan *Human Development Report* 2004 yang menggunakan data tahun 2002, angka HDI Indonesia adalah 0,692. Angka indeks tersebut merupakan komposisi dari angka harapan hidup saat lahir sebesar 66,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,9%, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65 %, dan pendapatan domestik bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli *(purchasing power parity)* sebesar US$ 3.230.

Namun, belajar dari pengalaman menanggulangi proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan nasional, kita berhasil menurun dari 15,1% pada tahun 1990 menjadi 11,3% pada tahun 1996. Setelah turun kembali menjadi 18,2% pada tahun 2002 dan 17,4% pada tahun 2003. Diproyeksikan pada tahun 2015, Indonesia akan mampu mencapai target penurunan proporsi penduduk miskin menjadi 7,5 % (setengah dari proporsi penduduk miskin tahun 1990). Mengapa diproyeksikan pada tahun 2015? Sesuai dengan Kerangka Aksi Dakkar, ada beberapa target yang harus dicapai tahun 2015, seperti menjamin semua anak mengenyam pendidikan, mencapai peningkatan 50% tingkat keaksaraan orang dewasa, dan kesetaraan gender dalam pendidikan.

B. Pendidikan Non-formal: Antara Kebijakan, Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengelompokkan pendidikan ke dalam tiga kelompok, yakni pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Bab I bagian ke satu Pasal 1 ayat 10 menyatakan, bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,

non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (ayat 11). Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (ayat 12). Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pembahasan pada tulisan ini dibatasi pada pendidikan non-formal secara garis besar dan kemudian diikuti dengan pembahasan tentang masalah-masalah yang terjadi di lapangan sebagai akibat pemahaman dan mungkin juga kepentingan masyarakat terhadap pendidikan non-formal secara tidak benar.

Pendidikan non-formal diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I bagian ke satu pasal I ayat 12 yang menyatakan bahwa pendidikan non-formal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang seperti halnya pendidikan formal. Kemudian, untuk pengelolaannya diatur dalam bab XIV bagian ke satu pasal 52 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan non-formal dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Ini artinya, dalam pelaksanaannya pendidikan non-formal ada yang dikelola oleh pemerintah dan ada yang dikelola oleh masyarakat.

Bab VI bagian kelima pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 6 UU Sisdiknas membicarakan masalah pendidikan non-formal. Ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan non-formal "diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidkan sepanjang hayat". Ayat 2 menyatakan bahwa "pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional". Ayat 3 menyatakan bahwa "pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis (ayat 5). Dan kursus dan pelatihan diselenggarakan

bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi (ayat 6). Selanjutnya, dinyatakan bahwa hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang digolongkan ke dalam pendidikan non-formal dimulai dari sejak lahir berupa penitipan anak, kelompok bermain dan satuan PAUD sejenis. Penitipan anak dan satuan PAUD sejenis diikuti anak-anak sejak lahir, atau usia tiga bulan, sedangkan kelompok bermain dapat diikuti anak usia dua tahun ke atas. Setelah menyelesaikan semua itu, maka anak-anak akan masuk kepada pendidikan taman kanak-kanak yang sudah masuk dalam wilayah pendidikan formal.

C. Pelaksanaan Pendidikan Non-formal

Seperti yang telah dinyatakan oleh UU No. 20 Sisdiknas bahwa pendidikan non-formal dikelola oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Seperti yang telah disebut di atas, pendidikan non-formal mulai dari pendidikan anak usia dini (tempat penitipan anak dan kelompok bermain), paket-paket (A sederajat SD/MI, B sederajat SMP/MTs, dan C untuk sederajat SMA/MA), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Wikipedia Indonesia menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini atau disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Ini artinya, pendidikan anak usia dini mulai dari lahir sampai taman kanak-kanak.

Pendidikan anak usia dini sangat penting artinya dalam membentuk sikap anak terhadap dunia persekolahan. Unesco (1996: 86) menyatakan, terdapat bukti bahwa anak-anak yang mengikuti pendidikan usia dini cenderung

menyenangi persekolahan dan sangat kecil kemungkinannya untuk putus sekolah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan pada usia dini. Pendidikan non-formal pada usia dini adalah semenjak lahir sampai dengan kelompok bermain.

Umumnya, pendidikan non-formal anak usia dini dikelola oleh masyarakat atau lembaga masyarakat. Pendidikan anak usia dini terdiri dari dua tingkatan yakni tempat penitipan anak dan kelompok bermain. Tempat penitipan anak untuk anak semenjak lahir atau usia tiga bulan sampai berumur dua tahun. Sedangkan kelompok bermain diikuti oleh anak berumur 2 tahun sampai 4 tahun.

Tempat penitipan anak (TPA) memang sudah merupakan kebutuhan, terutama bagi orang tua yang mempunyai pekerjaan tetap dan tidak memungkinkan mereka tinggal di rumah bersama bayinya di waktu jam kerja. Ada beberapa alasan yang menyebabkan orang tua menempatkan anak mereka di tempat penitipan anak. *Pertama,* beberapa tempat sulit untuk mendapatkan pembantu yang sesuai dengan kemauan orang tua, baik dalam hal keterampilan maupun kepercayaan, sehingga mereka kurang yakin kalau mereka dapat mengurus anak-anak mereka dengan baik. *Kedua,* tempat penitipan anak menjanjikan bahwa anak-anak mereka di samping akan dijaga dengan baik dan dijamin pemenuhan gizinya, juga akan diasuh oleh tenaga-tenaga yang handal dalam mengurus anak. Walaupun orang tua harus mengeluarkan uang tambahan, namun mereka lebih merasa nyaman untuk menitipkan anak mereka di tempat ini.

Pendidikan non-formal berikutnya adalah kelompok bermain *(play group)*. Pendidikan ini diikuti oleh anak-anak yang berumur 2 s.d. 4 tahun. Memasukkan anak pada kelompok bermain ini sebenarnya bukan suatu keharusan. Para orang tua, terutama di kota-kota, merasa bahwa anaknya akan ketinggalan dari anak-anak lainnya kalau tidak mengikuti pendidikan ini. Ada orang tua yang memang menginginkan anaknya memperoleh sesuai dari pendidikan itu, tetapi ada juga orang tua yang memasukkan anaknya ke pendidikan ini untuk sekedar gengsi dan mengikuti *trend*. Untuk itu, mereka akan sangat bangga kalau memasukkan anaknya ke tempat yang lebih mahal dan terkenal. Di samping itu, ada juga orang tua yang menjadikan pendidikan kelompok bermain sebagai tempat pendidikan anak mereka dan sekaligus tempat penitipan anak sampai mereka pulang bekerja.

Isu-isu kritisnya:

Dari berbagai kebijakan yang telah diutarakan di atas, pendidikan non-formal dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan berbagai penyimpangan antara lain sebagai berikut.

1. Pendidikan Anak Usia Dini (TK, TPA, Kelompok Bermain)
   a. Guru memaksa peserta didik untuk ikut dalam PBM secara menyeluruh tanpa batasan-batasan yang jelas.
   b. Bahan ajar belum dikemas sesuai dengan perkembangan anak, misalnya guru memaksa anak didik untuk dapat membaca. Belajar membaca seharusnya diawali dengan perkenalan huruf melalui gerakan tubuh. Belajar mewarnai gambar yang menarik dan berhubungan dengan huruf.
   c. Beban guru terlalu berat untuk menangani kelas besar (± 40 siswa), sebaiknya 1 guru menangani 10 siswa.
   d. Anak lebih baik terlambat diberikan pembelajaran yang semestinya daripada terlalu dini, karena akan berpengaruh pada perkembangan anak berikutnya.
   e. Tingkat pengawasan dan evaluasi belum maksimal dilakukan.
2. Pendidikan Keluarga dan Lingkungan
   a. Orang tua menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada sekolah tentang pendidikan anak.
   b. Ketidakpedulian atau ketidaktahuan pengajar tentang cara mengajar anak.
   c. Anak diberikan keleluasaan untuk menyaksikan program TV tanpa bimbingan orang tua.
   d. Tidak adanya aturan bersama dalam keluarga.
   e. Tidak adanya evaluasi dan pengawasan dari pihak keluarga dan pemerintah.
3. Lembaga Kursus
   a. Belum ada seleksi tutor/instruktur dilaksanakan untuk mencapai standar yang sama atau berkelanjutan oleh pemerintah dengan penyelenggara kursus yang menyelenggarakan berbagai bidang kegiatan.
   b. Belum ada kesepakatan materi ajar yang diberikan kepada perserta didik antara pemerintah dan penyelenggara kursus.

c. Belum ada pengawasan dan evaluasi secara terpadu antara pemerintah dengan penyelenggara kursus.
d. Kebanyakan penyelenggara kursus berorientasi pada bisnis, sehingga timbul kesan bahwa yang dikedepankan adalah tampilan semata, bukan hasil dari proses pendidikan itu sendiri.
e. Lembaga pelatihan (latihan prajabatan, seminar dan lokakarya, dan lain-lain yang sejenis).
   1) Materi yang dipersiapkan selalu bersifat teoritis, monoton dan membosankan. Seharusnya, materi yang akan diberikan pada peserta bersifat aplikatif, terukur dan teruji sesuai bidangnya masing-masing.
   2) Peserta tidak diberikan kesempatan untuk menilai kelebihan dan kekurangan pada materi yang disajikan, sehingga terkesan sentralistik.

2. Keaksaraan

Berdasarkan data survei sosial ekonomi tahun 2003, peningkatan angka keaksaraan di Indonesia pada populasi umur 15–24 tahun ke atas telah meningkat dari 96,2% tahun 1990 menjadi 98,7% tahun 2002. populasi 15-24 tahun adalah angkatan muda yang diprediksikan sebagai calon pemimpin bangsa masa depan. Dengan meningkatnya keaksaraan ini, maka target pemberantasan buta aksara Indonesia 8,23 juta orang tahun 2009 masih merupakan angan-angan belaka. Dari gambaran di atas, nampak benar bahwa seluruh pelaku kebijakan bekerja secara maksimal untuk mencapai target yang ditentukan pemerintah.

Lalu, apa upaya yang diperlukan untuk mengatasi keaksaraan itu? Untuk memperoleh 95% angka keaksaraan pada populasi umur 15 tahun ke atas pada tahun 2009, kebijakan dan strategi yang jelas penting untuk diformulasikan. Kebijakan yang dapat diambil antara lain, menetapkan PNF yang memberikan program keaksaraan fungsional kepada orang dewasa dan persekolahan formal yang memastikan bahwa seluruh pelajar memperoleh keaksaraan yang stabil. Kebijakan itu tentunya menuntut: 1) perluasan akses pendidikan dan peningkatan pelaksanaan pendidikan dasar pada kelompok usia sekolah, 2) pengurangan populasi buta aksara, 3) memberikan komuniksi, pendidikan dan informasi,

4) mengubah sistem manajemen dan informasi, dan 5) meningkatkan kapasitas pengelola pendidikan, baik ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sebuah strategi untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan dasar pada kelompok usia sekolah adalah krusial untuk menghindari munculnya kelompok buta aksara baru.

Aktivitas yang dapat dilakukan sampai dengan tahun 2005 meliputi: 1) pemberantasan buta aksara (seperti pelaksanaan program keaksaraan fungsional, bantuan kelompok belajar dan pengembangan materi pembelajaran) serta 2) mempertahankan kompetensi keaksaraan (seperti menyediakan materi bacaan yang relevan dengan kebutuhan pelajar, pelatihan pengelola taman bacaan, serta memonitor dan mengevaluasi kompetensi pelajar dan keterampilan fungsional pada langkah berkelanjutan).

Tantangan keaksaraan dapat dipenuhi hanya jika: 1) pemerintah pada tingkat tertinggi berkomitmen untuk melaksanakannya dan 2) mengambil kebijakan keaksaraan secara tegas untuk memperbesar mutu pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan program keaksaraan pemuda dan dewasa, serta mengembangkan lingkungannya yang kaya aksara.

Isu-isu kritisnya:

1. Untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, pemerintah belum maksimal membrantas buta aksara melalui langkah-langkah konkrit, seperti bantuan dana pendidikannya, materi pembelajaran belum sesuai kebutuhan masing-masing individu sesuai dengan fungsinya.
2. Pemerintah seharusnya menyediakan taman bacaan atau akses informasi yang relevan dengan kebutuhan belajar secara individu maupun kelompok.
3. Masih kurangnya monitor dan evaluasi kompetensi belajar secara berkelanjutan.

3. Pendidikan Kesetaraan

Sesuai dengan kerangka aksi dakar, ada suatu target yang harus dicapai pada tahun 2015, salah satunya adalah menjamin semua anak mengenyam pendidikan. Pemerintah Indonesia telah membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk belajar dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk menangani pendidikan kesetaraan ini, pemerintah telah membentuk

Direktorat Pendidikan Kesetaraan yang dikukuhkan pada Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2005.

Pendidikan Kesetaraan meliputi program paket A setaraa SD/MI, paket B setara SMP/MTs, dan paket C setara dengan SMA/MA. Setara dalam konteks sepadan dalam *civil effect*, baik dalam ukuran, pengaruh, fungsi, maupun dalam kedudukan (Direktorat Pendidikan Kesetaraan, 2006: v). Lalu yang menjadi persoalan, kalau pendidikan kesetaraan ini dianggap setara dengan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, bagaimana landasan hukumnya, bagaimana sistem penyelenggaraanya?

Landasan hukum yang dimaksud adalah Keputusan Mendiknas Nomor: 132/U/2004 tentang Program Paket A, B, dan C. PP Nomor: 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka mutu standar lulusannya pun setara dengan pemegang ijazah pendidikan formal. Hal ini sejalan dengan UU Sisdiknas pasal 26 ayat 6 yang berbunyi "hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan". Dengan memiliki landasan hukum ini, maka pemegang ijazah pendidikan kesetaraan dapat mengikuti seleksi ke jenjang pendidikan formal–mulai dari tingkat dasar-menengah sampai ke perguruan tinggi. Bahkan mempunyai hak yang sama untuk mengikuti tes PNS, TNI, POLRI, dan untuk perbaikan jenjang kepangkatan.

Penyelenggaraan kelompok pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C adalah: 1) sanggar kegiatan belajar, 2) pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), 3) lembaga kursus, 4) komunitas belajar (misalnya, *homeschooling*), 5) pondok pesantren, 6) takmir masjid/mushola dan pusat majelis taklim, 7) lembaga swadaya masyarakat, 8) yayasan badan hukum dan badan usaha, 9) organisasi kemasyarakatan, 10) organisasi sosial masyarakat, 11) organisasi keagamaan, 12) unit pelaksana teknis (UPT), 13) diktat periklanan, 14) UPT diklat pertanian, 15) UPT diklat transmigrasi.

Penyelenggaraan tersebut harus mempunyai struktur organisasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua penyelenggara dan tenaga pendidik. Tutor pendidik ini terdiri atas tutor mata pelajaran, narasumber teknis (untuk pelajaran berorientasi vokasional) atau tutor kecakapan hidup. Untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berlangsung dengan baik,

maka dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Direktorat Pendidikan Kesetaraan-Direktorat Jenderal PLS, Kasubdin Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang membidangi PLS, dan Penilik Dikmas/TLD (Tenaga Lapangan Dikmas) di tingkat Kecamatan yang tugasnya memantau pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran secara rutin.

Sistem penilaian pendidikan kesetaraan dilakukan dengan: 1) penilaian mandiri dengan mengerjakan berbagai latihan yang berintegrasi dalam setiap modul, 2) penilaian formatif oleh tutor melalui pengamatan, diskusi, penugasan, ulangan, proyek, dan porto-folio dalam proses tutorial, 3) penilaian semester, dan 4) ujian nasional oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional. Sementara ujian nasional diselenggarkan dua kali setahun, periode pertama bulan April dan Mei, periode kedua bulan Oktober.

Sasaran pendidikan kesetaraan adalah masyarakat petani, pesisir, pondok pesantren, masyarakat miskin perkotaan (seperti anak jalanan), dan etnik minoritas dan terasing. Oleh karena kemajemukan itu, pendidikan kesetaraan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak deskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, serta nilai-nilai keagamaan, kultural, dan kemajemukan. Bentuk penyelenggaraannya adalah berupa: 1) satu kesatuan sitematik dengan sistem terbuka dan multi-makna dan 2) sistem terbuka yang memberikan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan *(multi entry-multi exit sistem).* Pendidikan multi makna berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, dan berbagai kecakapan hidup.

Isu-isu kritisnya:

1. Manajemen penyelenggaraan pendidikan kesetaraan belum memadai sesuai harapan seperti pendidikan formal.
2. Bahan ajar seharusnya dirancang sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat, misalnya masyarakat petani, pelaut, dan lain-lain untuk meningkatkan taraf hidupnya.
3. Pemilihan tutor pendidikan kesetaraan belum terseleksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Tingkat pengawasan dan Evaluasi belum maksimal, sehingga timbul pertanyaan kesamaan ijazah pendidikan kesetaraan belum layak dipersamakan dengan pendidikan formal.

4. Pemberdaya Perempuan: antara Pendidikan dan Kesenjangan Gender

Menurut BKKBN tahun 2004, 1 dari 10 kepala keluarga (KK) miskin adalah perempuan (janda) yang rata-rata tidak lulus SD, sekitar 1-1,2 juta keluarga miskin KK-nya adalah perempuan. Kemudian Susenas tahun 1999 prosentase perempuan bekerja di sector formal 42% , laki-laki 70%. Perbandingan upah, perempuan 46 sedangkan laki-laki 100. Tingkat partisipasi angkatan kerja, perempuan 51,2% sementara laki-laki 83,6%. Pada pemerintahan (politik) posisi perempuan 8,3% di DPR, 0% pada ketua komisi, 9,1% di MPR, 0% di BPK, 14,8% di MA, dan 18,1% di KPU. Di tingkat DPD ada 25% provinsi yang memiliki wakil perempuan.

Demikian pula pada tahun 2001, perempuan yang belum melek aksara tahun 1998 ada 14,46% dan pada tahun 2001 masih 14,06%. Sementara angka buta aksara pada laki-laki 6,27%. Pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, kesempatan perempuan memperoleh pendidikan relatif lebih baik. Sementara di perguruan tinggi, perempuan 8,3% sedangkan laki-laki 8,8%. (Suryadi, 2004: 189)

Apabila dilihat dari kesenjangan *gender* di atas, posisi perempuan dari berbagai segi kehidupan belum menguntungkan daripada laki-laki. Namun sampai tahun 2004, belum ada perubahan yang signifikan dalam hal pemberdayaan perempuan dan kesetaraan *gender*. Secara normatif teoritis, sebenarnya tidak ada perbedaan *gender*, antara laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki sudah memberikan toleransi dan sebagian hak-hak kepada perempuan dan kaum perempuan pun sudah menerima kewajiban itu. Kenyataan di lapangan belum ada perubahan yang signifikan dalam kesetaraan *gender* ini. Perempuan kenyataanya tetap berada diurutan kedua setelah laki-laki dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Timbul pertanyaan, apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan *gender* itu? Kesenjangan *gender* di Indonesia terjadi karena faktor-faktor berikut: 1) tata nilai sosial budaya masyarakat yang umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (*ideologi patriarki*), 2) peraturan perundang-undangan masih belum mencerminkan kesetaraan *gender*, 3) penafsiran ajaran agama cenderung tekstual, 4) kemauan dan kurangnya perempuan sendiri untuk mengubah keadaan, dan 5) rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti, tujuan, dan arah program kesetaraan *gender*.

Selain masalah kesenjangan, kita juga sedang menghadapi tantangan nasional, berupa perdagangan orang/tenaga kerja perempuan, eksploitasi seksual, kekerasan, pornografi, diskriminasi terhadap perempuan dan anak, keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan politik (legislatif, eksekutif, yudikatif), dunia usaha, profesi, pendidikan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Salah satu usaha untuk mengatasi kesenjangan *gender* adalah dengan pendidikan, karena sektor pendidikan merupakan sektor yang paling strategis untuk pemberdayaan perempuan, dengan asumsi tidak ada bias *gender* dalam kebijakan-kebijakan pemerintah pada bidang pendidikan. Artinya, kesempatan untuk meningkatkan SDM, baik laki-laki maupun perempuan terbuka seluas-luasnya dengan peluang yang sama.

Isu-isu kritisnya:

1. Faktor budaya dan agama masih diterjemahkan secara tekstual yang menyatakan bahwa laki-laki sebagai pemimpin keluarga, sedangkan ada factor lain yang perlu diperhatikan.
2. Ada beberapa pekerjaan laki-laki yang tidak dapat dikerjakan oleh perempuan atau sebaliknya.
3. UU tentang *gender* belum menyentuh secara mendalam tentang kesetaraan *gender* dengan belum adanya sanksi hukum secara konkrit.
4. Kesertaraan *gender* lebih strategis bila diterapkan dalam bidang pendidikan.

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal yang penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat.
2. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
3. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, keaksaraan, pemberdayaan perempuan dan lain-lain yang sejenis.

Daftar Pustaka

Akademi Pendidikan Internasional. 2002. *Seri Praktik Pendidikan: Untuk Guru. Pendidikan, dan Orangtua dalam Rangka Meningkatkan Dasar Kualitas Sumber daya Manusia.* Jakarta. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Burstein, A. Joseph. 1992. *Petunjuk Lengkap Mendidik Anak.* Jakarta: Mitra Utama.

Delors, Jacques, 1996, *Belajar: Harta Karun di Dalamnya.* Paris: UNESCO.

Deporter, Bobbi dan Mike Hernacki. 2000. *Quantum Learning.* Bandung Kaifa.

Deporter, Bobbi, Mark Reardon, dan Sarah-Nourie: 2000. *Quantum Teaching.* Bandung: Kaifa.

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. 2006. *Pendidikan untuk Semua: Keaksaraan bagi Kehidupan.* Jakarta: Departemen Kesetaraan Mencerahkan Anak Bangsa. Jakarta: Ditjen PLS, Departemen Pndidikan Nasional.

Direktorat Jenderal PLS dan Pemuda. 2003. *Persiapan Rencana Kerja Nasional.* Pedoman Setiap Negara. Jakarta: Depdiknas.

Direktorat PLS.2006. *Pendidikan untuk Semua: Keaksaraan Bagi Kehidupan.* Jakarta: Depdiknas.

Direktorat Pendidikan Kesetaraan. 2006. *Pendidikan Kesetaraan Mencerahkan Anak Bangsa*: Jakarta: Ditjen PLS Depdiknas.

Dryden, Gordon dan Jeannette Vos. 2000: *Revolusi Cara Belajar (The Learning Revolustion) 1 – 2.* Bandung: Kaifa.

Faizah, Dewi Utama. 2006. *Anak-anak Karbitan.*

Semiawan, Conny R. 2002a. *Belajar dan Pembelajaran dalam Taraf Usia Dini.* Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi.

Suryadi, Ace. 2004. *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan.* Bandung. Genesindo.

Pendidikan Anak Usia Dini: Pembelajaran di TK yang Sudah Kebablasan

Oleh:
Dr. Prima Gusti Yanti
(Universitas Muhammadiyah Jakarta)

A. Pendahuluan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat penting karena dapat menjamin keberhasilan proses pendidikan pada jenjang berikutnya. Pendidikan anak usia dini sangat penting artinya dalam membentuk sikap anak terhadap dunia persekolahan. Unesco (1996: 86) menyatakan, terdapat bukti bahwa anak-anak yang mengikuti pendidikan usia dini cenderung menyenangi persekolahan dan sangat kecil kemungkinannya untuk putus sekolah dibanding dengan anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan pada usia dini. Pada sisi lain, bicara PAUD berarti menghargai hak anak atas pendidikan, seperti yang telah dirumuskan baik dalam Deklarasi Hak Asasi Anak (*Declaration on the Rights of the Child*) maupun dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mencantumkan PAUD pada Bab I Pasal 1 (butir 14) bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian ransangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pada Pasal 28, lebih jauh dijelaskan, (1) pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar; (2) pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan/atau informal; (3) pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal

berbentuk taman kanak-kanak (TK), *raudhatul athfal* (RA), atau bentuk lain yang sederajat; (4) pendidikan anak usia dini pada jalur non-formal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat; (5) pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan; (6) ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksudkan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan UU ini, keberadaan dan program-program PAUD memiliki kepastian hukum dan kedudukannya semakin jelas. Menurut UU tersebut, PAUD memayungi semua bentuk pendidikan usia dini dalam bentuk taman kanak-kanak (TK), *raudatul athfal* (RA), kelompok bermain (KB), tempat penitipan anak (TPA), pendidikan keluarga dan lingkungan, serta bentuk-bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan anak usia dini yang akan dibicarakan dalam tulisan ini adalah taman kanak-kanak (TK). Kedudukan taman kanak-kanak (TK) atau yang sederajat dengan itu sangat penting, karena mengantarkan anak pada jenjang pendidikan dasar.

Situasi pendidikan untuk TK di Indonesia memang masih memprihatinkan dari berbagai aspek. Menurut Opih R Zaenal (dalam www.depdiknas.go.id), ketua Ikatan Guru TK, seusai pembukaan Konferensi Ikatan Guru TK Indonesia, jumlah anak usia dini yang mengenyam pendidikan TK hanya sekitar 13,89 persen atau sekitar 2 juta anak, dari 14 juta jumlah anak usia dini di Indonesia. Padahal, usia ini sering diistilahkan sebagai masa keemasan dalam pembentukan karakter.

Ia juga mengatakan, pemerataan pembangunan sekolah TK juga menjadi masalah, sekolah TK tidak sampai kawasan pelosok dan pedalaman. Keberadaan sekolah TK sampai saat ini baru terdapat di wilayah kabupaten dan kota, provinsi dan ibukota negara. Namun, 99 persen sekolah dibangun dan dikelola oleh pihak swasta. Selain itu, masalah yang dihadapi pendidikan TK di Indonesia adalah kurangnya jumlah guru dan rendahnya tingkat kesejahteraan para guru TK. Opih mengatakan bahwa, idealnya 25 orang murid TK dididik oleh 2 orang guru, tapi pada kenyataannya ia masih banyak menemukan satu orang guru terpaksa mengajar 35 anak di dalam satu kelas, sehingga fungsi guru seperti polisi, karena harus mengawasi banyak anak. Hal itu masih ada,

terutama di daerah terpencil yang jumlah guru dan ruang kelasnya terbatas. Dari sekitar 95.600 guru TK yang ada, masih banyak yang hanya digaji Rp 150.000 per bulan dengan tuntutan harus kompeten dan profesional. Padahal, idealnya gaji standar guru TK yang profesional adalah sekitar Rp 2 juta.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa permasalahan dalam pendidikan TK begitu komplit. Sehubungan itu, dalam tulisan ini akan dibahas satu isu tentang pembelajaran di TK yang menurut penulis sudah menyimpang dari hakikat pendidikan anak usia dini. Untuk mendukung hal tersebut, penulis juga menguraikan konsep dasar dan pengertian yang mencakupi hakikat anak usia dini, hakikat pendidikan, pembelajaran anak usia dini, dan penyelesaian yang penulis tawarkan.

B. Konsep Dasar dan Pengertian

1. Hakikat Anak Usia Dini

Anak usia dini sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun mental yang paling pesat. Pertumbuhan dan perkembangan sudah dimulai sejak prenatal, yaitu sejak dalam kandungan. Pembentukan sel syaraf otak, sebagai modal pembentukan kecerdasan, terjadi saat anak dalam kandungan. Setelah lahir tidak terjadi lagi pembentukan sel syaraf otak, tetapi hubungan antara sel syaraf otak (sinap) terus berkembang. Begitu pentingnya usia dini sampai ada teori yang menyatakan bahwa pada usia empat tahun 50% kecerdasan telah tercapai, dan 80% pada usia delapan tahun (Suyanto, 2005).

Anak usia dini juga sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun mental yang sangat pesat. Sel-sel tubuh anak tumbuh dan berkembang amat cepat. Tahap awal perkembangan janin sangat penting untuk pengembangan sel-sel otak, bahkan pada saat lahir jumlah sel otak tidak bertambah lagi. Selanjutnya, setelah lahir terjadi proses *mielienasi* dari sel-sel syaraf, dua hal yang sangat penting dalam pembentukan kecerdasan. Makanan bergizi dan seimbang serta stimulasi pikiran sangat diperlukan untuk mendukung proses tersebut. Selain pertumbuhan dan perkembangan fisik dan motorik, perkembangan moral (termasuk kepribadian, watak, dan akhlak) sosial, emosional, intelektual dan bahasa juga berlangsung pesat. Oleh karena itu, usia dini (usia 0-8 tahun) juga disebut tahun emas atau *golden age*. Dengan demikian,

jika ingin mengembangkan bangsa yang cerdas, beriman dan bertaqwa, serta berbudi luhur hendaklah dimulai dari PAUD.

2. Hakikat Pendidikan pada Anak Usia Dini

Setiap anak memiliki potensi biologis, psikologis, dan sosiologis yang berbeda dan memiliki kelebihan tersendiri, seperti bakat dan minat sendiri. Ada anak yang berbakat menyanyi, menari, musik, matematika , bahasa, dan adapula yang berbakat olahraga. Ki Hajar Dewantara (1957) merangkum semua potensi anak menjadi cipta, rasa dan karsa. Teori *multiple intenlligencies* (kecerdasan ganda) dari Gardner (1998) menyatakan bahwa ada delapan tipe kecerdasan. Biasanya seorang anak memiliki satu atau lebih kecerdasan, tetapi amat jarang memiliki secara sempurna delapan kecerdasan tersebut. PAUD bertujuan membimbing dan mengembangkan potensi setiap anak agar dapat berkembang secara optimal sesuai tipe kecerdasannya. Oleh karena itu, guru harus memahami kebutuhan khusus dan kebutuhan individual anak. Memang disadari ada faktor-faktor pembatas, yaitu faktor-faktor yang sulit atau tidak dapat diubah dalam diri anak, yaitu faktor genetik. Oleh karena itu, PAUD diarahkan untuk memfasilitasi setiap anak dengan lingkungan belajar yang tepat agar anak dapat berkembang sesuai kapasitas genetisnya.

3. Pembelajaran Anak Usia Dini

Membelajarkan anak usia dini gampang-gampang susah. Kita kadang-kadang memberikan fasilitas belajar yang mahal dan berharap banyak, tetapi kenyataannya anak tidak belajar. Dengan mainan yang amat sederhana dan murah, anak-anak kadang-kadang sangat tertarik dan ingin tahu banyak tentang mainan itu dan mekanisme kerjanya. Bermain sambil belajar amat penting bagi PAUD di mana esensi bermain adalah menjiwai setiap kegiatan pembelajaran.

Suyanto (2005) mengatakan, bahwa pembelajaran anak usia dini menggunakan esensi bermain, meliputi: perasaan senang, demokratis, aktif, tidak terpaksa, dan merdeka. Pembelajaran hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga menyenangkan, membuat anak tertarik untuk ikut serta dan tidak terpaksa. Guru memasukkan unsur-unsur edukatif dalam kegiatan bermain tersebut, sehingga anak secara tidak sadar telah belajar berbagai hal.

Materi pembelajaran PAUD juga amat variatif. Ada pendapat yang menyatakan bahwa PAUD hanya mengembangkan logika berfikir, berprilaku, dan berkreasi. Ada pula yang menyatakan bahwa PAUD juga mempersiapkan

anak untuk siap belajar (*ready to learn)*; yaitu siap belajar berhitung, membaca, dan menulis. Adapula yang menyatakan bahwa materi pembelajaran bebas, yang penting PAUD pengembangan aspek moral, emosional, sosial, fisik-motorik, dan intelektual. Banyak pertanyaan dari guru dan orang tua tentang bagaimana mengajarkan anak agar pada tingkat perkembangannya anak mampu mengenal bilangan, berhitung, membaca, dan menulis.

4. Teori Bermain

Mengapa anak suka bermain? Apa peranan bermain bagi anak? Pertanyaan tersebut telah lama menjadi perdebatan para ahli PAUD. Ada dua macam teori yang mencoba menjawab pertanyaan tersebut, yaitu teori klasik dan teori modern.

Teori klasik menerangkan ada empat alasan mengapa anak suka bermain, dengan dasar sebagai berikut.

a. Kelebihan energi

Teori ini antara lain didukung oleh filsuf Inggris, Herbert Spencer, yang menyatakan bahwa anak memiliki energi yang digunakan untuk mempertahankan hidup. Jika kehidupannya normal, maka anak kelebihan energi, yang selanjutnya digunakan untuk bermain. Banyak guru menggunakan teori ini. Jika anak sulit untuk diajak tenang, guru mengajak anak untuk bermain yang sedikit menguras tenaga. Setelah itu, anak lebih mudah untuk duduk dengan tenang.

b. Rekreasi dan relaksasi

Teori ini menyatakan bahwa bermain dimaksudkan untuk menyegarkan kembali tubuh. Jika energi sudah digunakan untuk melakukan pekerjaan, anak-anak menjadi lelah dan kurang bersemangat. Dengan bermain, anak-anak memperoleh kembali energi, sehingga mereka lebih aktif dan bersemangat kembali.

c. *Insting* (sifat bawaan)

Teori ini menyatakan bahwa bermain merupakan sifat bawaan (*insting*) yang berguna untuk mempersiapkan diri melakukan peran orang dewasa. Jika anak berpura-pura menjadi seorang ibu, ayah atau guru, hal itu akan sangat penting bagi kehidupannya kelak ketika ia benar-benar menjadi seorang ibu, ayah, atau guru. Demikian pula ketika mereka bermain perang-perangan

atau berkelahi. Mereka sebenarnya berlatih perang atau berkelahi jika memang dibutuhkan ketika sudah dewasa.

d. Rekapitulasi

Teori ini menyatakan bahwa bermain merupakan peristiwa mengulang kembali apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang dan sekaligus untuk mempersiapkan diri untuk hidup pada zaman sekarang. Anak-anak suka bermain air, tanah, batu dan lempung seakan-akan mengulang permainan manusia prasejarah.

Teori modern memandang bermain sebagai bagian dari perkembangan anak, baik kognitif, emosional, maupun sosial anak. Teori modern dibedakan menjadi tiga, yaitu teori psikoanalitik, perkembangan kognitif, dan teori belajar sosial. Berikut penjelasan ketiga macam teori tersebut.

a. Teori psikoanalitik

Teori ini menerangkan bahwa bermain merupakan alat pelepas emosi. Bermain juga mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan sosialnya. Bermain juga memungkinkan anak untuk mengekspresikan perasaannya secara leluasa, tanpa tekanan batin.

b. Teori perkembangan kognitif

Teori ini menerangkan bahwa bermain merupakan bagian dari perkembangan kognitif anak. Bermain merupakan proses berpikir secara fleksibel dan proses pemecahan masalah. Pada saat bermain, anak dihadapkan pada berbagai situasi, kondisi, teman, dan objek, baik nyata maupun imajiner yang memungkinkannya menggunakan berbagai kemampuan berpikir dan memecahkan masalah.

c. Teori belajar sosial

Teori ini menerangkan bahwa bermain merupakan alat untuk sosialisasi. Dengan bermain bersama anak lain, anak akan mengembangkan kemampuan memahami perasaan, ide, dan kebutuhan orang lain yang merupakan dasar dari kemampuan sosial.

5. Fungsi Bermain bagi Anak

Pada hakikatnya semua anak suka bermain, hanya anak-anak yang tidak enak badan yang tidak suka bermain. Mereka menggunakan sebagian besar waktunya untuk bermain, baik sendiri, dengan teman sebayanya, maupun dengan orang yang lebih dewasa, bentuk permainannya pun beragam.

Berdasarkan fenomena tersebut, para ahli PAUD menentukan bahwa bermain merupakan faktor penting dalam kegiatan pembelajaran, di mana esensi bermain harus menjadi jiwa dari setiap kegiatan pembelajaran anak usia dini.

Kegiatan bermain pada anak perlu mendapat perhatian para pendidik anak usia dini. Di zaman yang semakin modern ini, banyak anak-anak yang tertekan untuk mengikuti kegiatan sekolah. Banyak tugas-tugas yang diberikan guru, termasuk pekerjaan rumah (PR) dan les. Pembelajaran anak usia dini banyak yang sangat terstruktur dan formal, sehingga celah bagi anak untuk bermain sambil belajar semakin sempit.

6. Esensi Bermain

Meskipun bentuk permainan anak-anak di seluruh dunia dan dari waktu ke waktu berbeda-beda, tampaknya esensi tetap sama. Berikut dijelaskan esensi bermain tersebut.

a. Aktif

Pada hampir semua permainan, anak aktif, baik secara fisik maupun psikis. Anak melakukan eksplorasi, investigasi, eksperimentasi, dan ingatan tentang orang, benda ataupun kejadian. Anak menggunakan berbagai benda untuk bermain. Mereka juga mampu menggunakan benda untuk merepresentasikan benda lainnya. Sebuah balok kayu bisa menjadi mobil. Anak pura-pura menggerakan balok kayu tersebut seperti gerakan mobil sambil bersuara menirukan suara mobil. Anak juga senang bermain dengan berbagai gerakan, seperti berlari, mengejar, menangkap, dan melompat. Permainan kejar, tangkap lalu berguling-guling *(rough and tumble play)* sering dimainkan anak laki-laki di lapangan rumput. Jadi, pada saat bermain, anak aktif melakukan berbagai kegiatan baik fisik maupun psikis.

b. Menyenangkan

Kegiatan bermain tampak sebagai kegiatan yang bertujuan untuk bersenang-senang. Meskipun tidak jarang bermain menimbulkan tangis di antara anak yang terlibat. Anak-anak menikmati permainannya. Mereka bernyanyi, tertawa, berteriak lepas dan ceria, seakan tidak memiliki beban hidup.

c. Voluntir dan motivasi internal

Anak ikut dalam suatu kegiatan permainan secara sukarela. Mereka termotifasi dari dalam dirinya (motivasi internal) untuk ikut bermain. Bentuk

permainannya juga dipilih dan ditentukan bersama. Begitu pula peran masing-masing anak ditentukan secara adil sesuai aturan yang berlaku.

d. Memiliki aturan

Setiap permainan ada aturannya. Untuk main petak umpet misalnya, ada aturannya, baik untuk menentukan anak yang akan berperan sebagai pencari dan yang dicari dengan cara "*ping sut*" atau "*hom pim pa*". Anak yang ketahuan paling awal akan menjadi pencari berikutnya. Jika anak yang bersembunyi tidak kunjung ditemukan, mereka juga akan memberi *clue* atau tanda agar mereka bisa ditemukan oleh temannya yang mencari.

e. Simbolik dan berarti

Pada saat bermain, anak menghubungkan antara pengalaman lampaunya yang tersimpan dalam LTM dengan kenyatan yang ada. Pada saat bermain pula, anak bisa berpura-pura menjadi orang lain dan menirukan karakternya. Ia bisa menjadi seorang polisi, guru, ayah, ibu atau menjadi bayi. Jadi, bermain memungkinkan anak menggunakan berbagai objek atau dirinya sebagai simbol dari benda atau orang lain sehingga bermain disebut simbolik. Peran-peran yang dimainkan anak biasanya merepresentasikan peran-peran orang dewasa dalam masyarakatnya, sehingga kegiatan tersebut sangat berarti *(meaningful)* bagi kehidupan anak kelak. Banyak anak-anak yang sejak kecil berpura–pura sebagai penyanyi, ketika dewasa menjadi penyanyi betul. Anak-anak yang suka berperan sebagai dokter, kelak jadi dokter benar. Hal itu bukan hal yang kebetulan, tetapi apa yang dimainkan anak memiliki arti bagi dirinya.

7. Bermain dan Perkembangan Anak

Bermain memiliki peran penting dalam perkembangan anak pada hampir semua bidang perkembangan, baik perkembangan fisik-motorik, bahasa, intelektual, moral, sosial, maupun emosional (Suyanto, 2005: 124-125).

a. Bermain mengembangkan kemampuan motorik

Berbagai penelitian menunjukan bahwa bermain memungkinkan anak bergerak secara bebas, sehingga anak mampu mengembangkan kemampuan motoriknya. Pada saat bermain anak menyesuaikan antara pikiran dan gerakan menjadi suatu keseimbangan. Menurut Piaget, anak terlahir dengan kemampuan refleks, kemudian ia belajar menggabungkan dua atau lebih gerakan refleks, dan pada akhirnya ia mampu mengontrol gerakannya. Melalui bermain anak belajar mengontrol gerakannya menjadi terkoordinasi.

Dalam tahap menggabungkan pikiran dan bahasa sebagai satu kesatuan. Ketika anak bermain dengan temannya, mereka juga saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa anak, dan itu berarti secara tidak langsung anak belajar bahasa.

b. Bermain mengembangkan kemampuan kognitif

Menurut Piaget (1962), anak belajar mengkontruksikan pengetahuan dengan berinteraksi dengan objek yang ada di sekitarnya. Bermain menyediakan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan objek. Anak memiliki kesempatan untuk mengunakan inderanya, seperti menyentuh, mencium, melihat, dan mendengarkan untuk mengetahui sifat-sifat objek. Dari pengindraan tersebut, anak memperoleh fakta-fakta, informasi, dan pengalaman yang akan menjadi dasar untuk berfikir abstrak. Jadi, bermain menjembatani anak dari berpikir kongkret ke berpikir abstrak. Vygotsky (1976) menyatakan bahwa pada saat bermain, pikiran anak terbebas dari situasi kehidupan nyata yang menghambat anak berfikir abstrak.

c. Bermain mengembangkan kemampuan afektif

Setiap permainan memiliki aturan. Aturan akan diperkenalkan oleh teman bemain sedikit demi sedikit, tahap demi tahap sampai setiap anak memahami aturan mainnya. Oleh karena itu, bermain akan melatih anak dalam menyadari akan adanya aturan dan pentingnya mematuhi aturan. Hal ini merupakan tahap awal bagi perkembangan moral.

d. Bermain mengembangkan kemampuan bahasa

Pada saat bermain, anak-anak menggunakan bahasa, baik untuk berkomunikasi dengan temannya atau sekedar menyatakan pikirannya *(thinking aloud)*. Sering kita menjumpai anak kecil bermain sendiri sambil mengucapkan kata-kata, seakan-akan ia bercakap-cakap dengan diri sendiri. Menurut Vygotsky (1926), peristiwa seperti itu menggambarkan bahwa anak sebenarnya sedang membahasakan apa yang ada dalam pikirannya.

e. Bermain mengembangkan kemampuan sosial

Pada saat bermain, anak berinteraksi dengan anak yang lain. Interaksi tersebut mengajarkan anak bagaimana cara merespons, memberi dan menerima, menolak atau setuju pada ide dan perilaku anak yang lain. Hal ini sedikit demi sedikit akan mengurangi rasa egosentrisme pada anak dan mengembangkan kemampuan sosialnya.

C. Pembelajaran TK yang Kebablasan

Dari berbagai permasalahan yang melingkari TK, permasalahan TK sekarang ini yang tidak kalah pentingnya adalah proses pembelajaran yang sudah menyimpang dari hakikat pendidikan anak usia dini. Anak-anak TK belajar seperti anak-anak SD kelas lanjut atau seperti anak SMP. Mereka duduk dibelakang meja menghafal huruf-huruf yang akan membentuk kata, dan menghafal angka-angka untuk berhitung.

Mengapa ini terjadi? Untuk menjawab ini, kita harus melihat kaitannya dengan *output* yang menampung anak-anak ini. Sekolah dasar yang menampung anak-anak SD ini kebanyakan sudah menetapkan standar yang tinggi terhadap anak-anak TK. Ketika mereka mendaftar ke SD, bermacam tes sudah menghadang mereka. Hal ini yang dikeluhkan oleh orang tua ketika mengantarkan anaknya masuk SD, karena anak mereka mesti lulus tes membaca, menulis, dan berhitung, masih ditambah lagi dengan psikotes (Bakri, 2006:29). Penulis juga mengamati ini karena tahun 2006/2007, anak pertama penulis masuk SD. Pada tahun ajaran yang lalu, penulis termasuk orang tua yang sibuk bertanya sana-sini dengan orang tua murid yang memasukkan anaknya ke SD. Dari hasil pengamatan sana-sini tersebut, penulis menjadi tahu apa yang dituntut ketika anak masuk SD, sama dengan yang diungkapkan oleh Bakri.

Hal inilah yang menyebabkan guru-guru TK berpacu mengajar anak-anaknya membaca, menulis, dan berhitung, kalau mereka masih ingin TK-nya masih diminati oleh orang tua murid. Bahkan, bukan hanya guru TK yang bersemangat mengajarkan hal itu, orang tua murid pun bersemangat mencarikan guru les untuk anaknya. "Saya pun tidak mau ketinggalan, anak saya juga mengikuti les privat untuk membaca, menulis dan berhitung, walaupun saya tahu itu tidak benar. Akan tetapi bagaimana lagi? Kalau saya tidak mengikuti perkembangan tersebut, anak saya tidak diterima di SD favorit." Masalah ini sudah menjadi benang kusut yang mesti diurai satu persatu. Untuk hal tersebut pertama sekali yang harus diingatkan kembali adalah hakikat dari pendidikan anak usia dini dan bagaimana pengajaran itu disampaikan pada anak-anak tersebut.

Orang tua zaman sekarang sudah menyadari pentingnya pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini, sehingga mereka dengan sadar menyekolahkan anaknya di taman kanak-kanak sebagai persiapan masuk SD. Guru-guru TK pun sekarang memiliki visi yang sama dengan orang tua

murid, yaitu mempersiapkan anak masuk SD. Padahal, kalau kita kembali mencermati tujuan pendidikan sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, *pendidikan prasekolah adalah "...untuk membantu meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya".*

Dari rumusan peraturan pemerintah tersebut, dapat kita ambil esensinya bahwa pendidikan anak usia dini adalah meletakkan dasar perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor anak, untuk kehidupannya pada masa yang akan datang. Potensi-potensi yang dimiliki anak harus dikembangkan seoptimal mungkin pada usia dini. Pada dasarnya, manusia memiliki kemampuan tidak terbatas untuk belajar (*limitless capacity to learn)* dan dengan demikian memiliki kemampuan yang luar biasa untuk kreatif dan produktif (Clark, 1986). Semiawan (2002) menyebut hal tersebut sebagai *hidden excelence in personhood,* yakni bahwa pada diri setiap anak yang normal, mentalnya memiliki kemungkinan genius, yang bila digali akan ditemukan yang paling baik atau yang paling unggul yang sebelumnya tidak tampak. Bila potensi ini tidak pernah digali, maka berarti anak telah kehilangan peluang dan momentum penting dalam hidupnya, dan pada gilirannya negara akan kehilangan sumber daya manusia terbaiknya.

Jadi, pendidikan anak usia dini diarahkan pada penggalian potensi yang berkaitan dengan motorik, afektif, kognitif, dan hubungan sosial. Oleh karena pembelajaran pada anak TK prinsipnya bermain, maka potensi-potensi tersebut digali melalui kegiatan bermain.

Apa yang kita lihat dan cermati di dalam pendidikan anak usia dini sekarang ini sudah melampaui kapasitas anak. Belum saatnya anak belajar dengan cara duduk di kelas mendengarkan guru menjelaskan mata pelajaran, misalnya membaca atau berhitung. Ada yang salah kaprah tentang belajar yang diterapkan pada anak TK. Apabila belajar diartikan dengan sekolah di mana ia harus duduk tenang, mendengarkan uraian guru, disibukkan dengan tugas, maka anggapan itu salah, sebab anak usia dini belum bisa disuruh duduk tenang dan paham akan istilah tugas. Namun, apabila belajar (dan inilah hakikat dari bersekolah) diartikan dengan menyerap informasi sebanyak mungkin, perkembangan intelektual anak yang sangat pesat justru terjadi pada kurun usia nol sampai usia enam tahun (masa usia dini). Dengan demikian, penyerapan

informasi sebanyak mungkin dilakukan dengan cara yang menyenangkan tidak menimbulkan tekanan pada anak.

Direktorat PAUD sudah mengembangkan acuan menu pembelajaran untuk anak usia dini yang disebut *menu pembelajaran generik*, yang berorientasi pada pendekatan:

- kebutuhan anak,
- belajar melalui bermain,
- kreatif dan inovatif,
- lingkungan yang kondusif,
- menggunakan pembelajaran terpadu,
- mengembangkan keterampilan hidup,
- menggunakan berbagai media dan sumber belajar.
- pembelajaran yang berorientasi pada prinsip perkembangan anak, dan
- stimulasi terpadu.

Kegiatan pendidikan anak usia dini diarahkan pada upaya untuk melejitkan semua potensi kecerdasan anak, yang meliputi hal-hal berikut.

1. *Kecerdasan linguistik*, dirangsang melalui berbicara, mendengarkan, membaca, menulis, berdiskusi, dan bercerita.
2. *Kecerdasan logika-matematika,* dirangsang melalui kegiatan menghitung, membedakan bentuk, menganalisis dan bermain dengan benda-benda.
3. *Kecerdasan visual-spasial,* dirangsang melalui bermain *puzzle*, menggambar, melukis, menonton film maupun bermain dengan khayal/imajinasi.
4. *Kecerdasan musikal,* dirangsang melalui irama, nada, birama, berbagai bunyi, dan bertepuk tangan.
5. *Kecerdasan kinestetik,* dirangsang melalui gerakan, tarian, olah raga, dan terutama gerakan tubuh.
6. *Kecerdasan naturalis,* dirangsang melalui pengamatan lingkungan, bercocok tanam, memelihara binatang, termasuk mengamati gejala alam.
7. *Kecerdasan interpersonal,* dirangsang melalui bermain dengan teman, bekerja sama bermain peran, memecahkan masalah, menyelesaikan konflik.
8. *Kecerdasan intrapersonal,* dirangsang melalui pengembangan konsep diri, harga diri, mengenal diri sendiri, percaya diri, termasuk kontrol diri, dan disiplin.
9. *Kecerdasan spritual,* dirangsang melalui penanaman nilai-nilai moral dan agama.

D. Penyelesaian

Karena begitu pentingnya pendidikan anak usia dini–tonggak awal pertumbuhan anak, pendidikan untuk anak usia dini ini perlu diperhatikan oleh berbagai pihak seperti orang tua, masyarakat, sekolah, pemerintah dalam hal ini yang paling utama adalah direktorat PAUD. Hasil pendidikan seperti apa yang diharapkan untuk anak usia dini? Hal ini harus dibicarakan secara cermat, agar anak-anak kita tidak kehilangan masa-masa emasnya karena ambisi berbagai pihak.

Direktorat PAUD dan Direktorat Pendidikan Dasar harus duduk bersama kembali merumuskan potensi apa yang diharapkan pada anak-anak TK yang nantinya akan melanjutkan pendidikan ke SD. Setelah perumusan, yang paling utama sekali adalah sosialisasi di lapangan. Mungkin saja kesalahan selama ini karena pemahaman yang salah terhadap interpretasi rumusan produk pendidikan TK. Kepada guru-guru dilapangan, baik guru TK maupun guru SD, harus diberi pemahaman yang baik tentang potensi-potensi produk TK, agar nanti disaat penerimaan murid-murid SD mereka menguji atau mengetes anak sesuai dengan kapasitas anak TK. Ada pendapat di lapangan bahwa guru TK terpaksa memacu anak belajar sedemikian kerasnya karena untuk memenuhi tuntutan yang ditetapkan oleh SD tertentu, bahwa anak sudah harus bisa membaca dan berhitung.

Orang tua menjadi pihak yang harus juga diberi pengarahan oleh pemerintah, agar mereka tidak memaksakan ambisinya pada anak diluar batas kemampuan anak. Akan tetapi, kalau hubungan TK dan SD sudah harmonis, orang tua tentu tidak mencemaskan anaknya lagi.

Lembaga pendidikan adalah tempat yang efektif juga untuk menyampaikan pesan-pesan pemerintah tersebut. Pendidikan yang mengelola PGSD dan PGTK harus menekankan pengetahuan perkembangan anak pada mahasiswanya dan tuntutan pengajaran sesuai dengan kapasitas anak serta teknik pengajaran yang baik. Jika semua pihak sudah memahami dengan baik persoalan-persoalan tersebut dan melaksanakan suasana pendidikan di TK, tentu menjadi harmonis dan tidak memaksa sehingga anak bahagia dan tidak stres.

E. Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan anak usia dini yang dalam penerpannya sudah menyimpang dari hakikatnya harus dikembalikan pada tujuan yang sebenarnya. Untuk itu, harus ditumbuhkan kesadaran pada semua pihak (orang tua, guru, pemerintah) bahwa anak usia dini pun memiliki hak atas pendidikan. Kita bertanggung jawab mengoptimalkan perkembangan anak usia dini, baik kecerdasan intelegensia, emosional, moral, maupun kecerdasan spiritualnya.
2. Karena aktivitas khas dari anak usia dini adalah bermain, cara pembelajaran yang paling tepat adalah melalui metode bermain. Hampir seluruh kegiatan mereka melibatkan unsur bermain. Tetapi, bermain dalam kurun usia ini bukanlah tanpa arti, karena justru lewat aktivitas bermainlah (baik fisik maupun mental) mereka belajar.
3. Yang penting ditumbuhkan adalah anggapan bahwa anak usia dini memiliki potensi besar. Jangan menilai rendah kemampuan belajarnya dan kita harus siap sedia membelajari mereka.
4. Pemerintah, Direktotat PAUD dan Pendidikan Dasar, merumuskan tujuan-tujuan pendidikan pada anak usia dini, sehingga guru TK dan SD mengetahui tugas dan wewenang masing-masing.
5. Lembaga pendidikan penghasil guru TK dan guru SD menjelaskan secara detail wewenang yang harus mereka penuhi dalam mendidik anak.
6. Orang tua dan masyarakat harus diberi wawasan pendidikan ke-TK-an, sehingga memahami fungsi lembaga pendidikan TK.

Daftar Pustaka

Bakri, Kholis Bahtiar. 2006. *Menjaring Anak Usia Emas*. Pena Pendidikan. No. 1/tahun 1/Mei 2006. Jakarta: Reka Gagas Cipta.

Delor, Jacques. 1996. *Belajar: Harta Karun di Dalamnya.* Paris: UNESCO

Depdiknas. 2003. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. Jakarta.

Dewantara, Ki Hajar. 1950. *Dasar-Dasar Perguruan Taman Siswa.* DIY: Majelis Luhur

Direktorat PADU. 2002. *Acuan Menu Pembelajaran pada Pendidikan Anak Dini Usia (Menu Pembelajaran Generik).* Jakarta: Direktorat PADU.

Gardner, Howard. 1998. *Multiple Intellegences, The Theory in Practise.* New York: Basic Books.

Jalal, Fasli. 2002. *"Pendidikan Anak Dini Usia, Pendidikan yang Mendasar".* Buletin PAUD (Jurnal Ilmiah, Edisi Perdana). Jakarta: Direktorat PADU.

Semiawan, Conny R. 2002. *Belajar dan Pembelajaran dalam Taraf Usia Dini.* Jakarta: Prehallindo.

Suyanto, Slamet. 2005. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini.* Jakarta: Depdikas.

Zaenal, Opih R. 4 Desember 2006, *"Pidato Pembukaan Konferensi Guru-guru TK se-Indonesia".* http://www.depdiknas.go.id

Perlunya Mata Kuliah Kewirausahaan di Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan

Oleh:
Dr. Nurhayati
(Universitas Sriwijaya)

A. Pendahuluan

Kita tampaknya harus memperhatikan data yang dikemukakan oleh *Majalah Tempo* (18 November 2003) yang menyatakan, bahwa angka pengangguran muda di Indonesia terus meningkat. Tepatnya, *Tempo* menyatakan bahwa, jika tahun 2001 jumlah orang muda yang menganggur sebanyak 6,1 juta orang, tahun 2002 meningkat menjadi 8,6 juta orang. Bahkan tahun 2003 tercatat pengangguran sudah mencapai 10,3 juta jiwa. Sementara itu, tingkat pengangguran kaum muda di daerah pedesaan sekitar 15 persen, sedangkan di perkotaan mencapai 25 persen. Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pengangguran justru lebih banyak muncul di daerah perkotaan daripada di pedesaan. Fenomena meningkatnya data pengangguran ini searah dengan jalan berpikir Alma (2005: 1) yang menyatakan, bahwa semakin maju suatu negara semakin banyak orang terdidik dan banyak pula orang menganggur.

Berbicara tentang pengangguran, direktur ILO untuk Indonesia, Alan Boulton mengatakan, bahwa banyak orang muda berada pada kondisi yang kurang mendukung sehingga terjebak dalam kejahatan. Menurutnya, perlu dicari peluang baru bagi orang muda untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif. Jika peluang untuk memperoleh pekerjaan tidak tersedia, maka akan banyak pemuda yang tidak bisa menggunakan potensinya.

Pertanyaannya adalah mengapa pengangguran juga dihadapi oleh kaum muda yang notabene terdidik? Lalu apa yang salah dengan pendidikan

di perguruan tinggi selama ini? Apakah kurikulum perguruan tinggi bagaikan menara gading yang tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat dan salah arah?

Tak kurang dari direktorat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, departemen pendidikan nasional menyatakan bahwa ada yang kurang dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia selama ini. Hal ini terbukti dari fenomena keterpurukan perekonomian Indonesia sejak tahun 1997. Menurutnya, keterpurukan tersebut menyadarkan masyarakat akan ketidaklengkapan pendidikan yang telah dilaksanakan selama ini.

Untuk mengatasi persoalan pengangguran tersebut, salah satu jalan yang dapat ditempuh ialah memasyarakatkan pengetahuan dan budaya kewirausahaan dan membuka lapangan wirausaha. Dengan membuka lapangan wirausaha serta memasyarakatkan pengetahuan dan budaya kewirausahaan ini, diharapkan dapat membuka peluang penciptaaan lapangan kerja oleh lulusan perguruan tinggi.

Perguruan tinggi sebagai salah satu agen perubahan dalam kehidupan masyarakat tidak dapat tidak harus mengikuti arah kebijakan tersebut. Mengapa perlu ada gerakan untuk memasyarakatkan pengetahuan kewirausahaan dan membuka lapangan kewirausahaan? Hal ini disebabkan oleh kemampuan pemerintah yang sangat terbatas. Pemerintah tidak akan mampu menggarap semua aspek pembangunan karena sangat banyak membutuhkan anggaran belanja, personalia, dan pengawasan.

Tulisan ini membahas mengapa perlu perguruan tinggi mengadakan mata kuliah kewirausahaan dengan memaparkan pengertian kewirausahaan, kendala dalam mengembangkan kewirausahaan, rasional perlunya pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi, serta tujuan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi.

B. Pembahasan

1. Pengertian Kewirausahaan

Istilah kewirausahaan merupakan padanan *entrepreneurship* yang berarti petualang pencipta atau pengelola usaha. Kata *entrepreneur* secara tertulis digunakan pertama kali oleh Savary pada tahun 1723 dalam bukunya *Kamus Dagang* (Soeharto Sigit dikutip Alma, 2005: 23; Lupiyoadi, 2004: 3).

Kalau melihat dari asal kata, wirausaha berasal dari dua kata, yaitu *wira* dan *usaha*. Kata wira berarti manusia yang unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa

besar, berani, pahlawan/pendekar kemajuan, memiliki keagungan watak. Sedangkan usaha artinya upaya menuju tujuan yang diinginkan.

> *Entrepreneurship and innovation are central to the creative processes in the economy, to promoting growth, increasing productivity and creating jobs (UK Government White Paper on Competitiveness).*

Menurut pernyataan tersebut, paling tidak ada beberapa kata kunci yang dapat ditarik dari pengertian kewirausahaan, yaitu: inovasi, proses kreatif, adanya peningkatan pertumbuhan produktivitas, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Kata-kata kunci tersebut terdapat juga dalam pengertian kewirausahaan yang dikemukakan oleh Drucker (Suryana, 2006: 2) berikut ini.

> *Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses.*

Inti dari kewirausahaan menurut Drucker tersebut, adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya peluang.

Selanjutnya, Alma (2005: 31) menyebutkan bahwa kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan risiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Istilah kewirausahaan dapat diartikan sebagai *the backbone of economy*, yaitu syarat pusat perekonomian atau sebagai *tailbone of economy*, yaitu pengendali perekonomian suatu bangsa (Soeharto Wirakususmo dikutip Suryana, 2006: 14).

Dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan sebagai dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam pengertian kewirausahawan itu, terdapat beberapa keunggulan pribadi seorang wirausahawan, yaitu berpikir kreatif, berprilaku inovatif, tenaga penggerak, berbudi luhur, berjiwa besar, dan jujur. Dengan demikian, sudah saatnya pendidikan di Indonesia lebih memberikan kontribusi kepada pembentukan jiwa wirausahawan karena keunggulan yang dimiliki seorang wirausaha.

2. Kendala dalam Mengembangkan Kewirausahaan

Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi *entrepreneur*. Akan tetapi, pendidikan di Indonesia tampaknya tidak membawa peserta didik ke arah

menjadi seorang wirausaha. Pendidikan di Indonesia lebih menekankan kepada pentransferan teori daripada membentuk mental yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha atau wirausahawan sejati.

Mengapa kewirausahaan ini kurang mendapat tempat di Indonesia? Mungkin hal ini berkaitan dengan perilaku zaman penjajahan dulu. Pada zaman penjajahan dulu jiwa wirausaha dijauhkan. Dengan tumbuhnya jiwa wirausaha, maka akan tumbuh jiwa mandiri dan akan membawa kemajuan. Hal itu berarti akan menjadi saingan VOC. Oleh karena itu, Pemerintah Belanda membuat *image* yang menakutkan tentang wirausaha. Hal ini terbukti sampai sekarang masyarakat Indonesia sangat takut dengan wirausaha. Anak-anak dijauhkan dari jiwa wirausaha. Bahkan ada masyarakat yang menganggap bahwa jiwa wirausaha adalah kapitalis (juga *image-image* jelek lainnya). Padahal, wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Sekarang ini kita menghadapi kenyataan bahwa jumlah wirausahawan Indonesia masih sedikit dan mutunya belum dapat dikatakan hebat, sehingga persoalan pembangunan wirausaha Indonesia merupakan persoalan mendesak bagi suksesnya pembangunan.

Demikian besar darma bakti yang dapat disumbangkan oleh wirausaha terhadap pembangunan bangsa, namun masih banyak orang yang kurang berminat menekuni profesi ini. Hal ini disebabkan oleh pandangan negatif terhadap profesi ini. Banyak orang menganggap bahwa orang yang memasuki dunia wirausaha memiliki sifat-sifat yang agresif, ekspansif, bersaing, egois, tidak jujur, kikir, sumber penghasilan tidak stabil, kurang terhormat, pekerjaan rendah, dan sebagainya. Pandangan seperti ini banyak dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia, sehingga mereka tidak tertarik. Para orang tua tidak ingin anaknya memasuki dunia wirausaha ini dan berusaha mengarahkan anaknya menjadi pegawai negeri, apalagi bila anaknya telah berstatus sarjana.

Minat mahasiswa dan sarjana untuk menjadi wirausaha masih rendah hingga selalu tergantung kepada lowongan kerja yang ada. Padahal, dengan menjadi wirausaha membuat mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi lebih terhormat martabatnya sekaligus membuka lapangan usaha. Seyogianya lulusan perguruan tinggi dapat mengembangkan wirausaha. Mahasiswa lulusan perguruan tinggi jangan hanya ingin mencari kerja, namun harus bisa membuka lapangan kerja.

3. Rasional Perlunya Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi

Indonesia memerlukan tambahan sekitar 20 juta unit usaha baru di luar sektor pertanian 15 tahun mendatang, dalam rangka meningkatkan daya dukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi penduduk Indonesia. Hal ini berarti harus menumbuhkembangkan 1,3 juta unit usaha baru di Indonesia setiap tahunnya, padahal infrastruktur untuk mewujudkannya relatif sangat terbatas. Pengembangan wirausaha baru terkait dengan upaya menumbuhkan lingkungan usaha yang kondusif, menumbuhkan kemauan masyarakat untuk berwirausaha, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berwirausaha dan sistem insentif yang merangsang masyarakat untuk merealisasikan membuka usaha baru?

Oleh karena itu, perlu menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan pada para mahasiswa dan juga staf pengajar, serta diharapkan menjadi wahana pengintegrasian secara sinergi antara penguasaan sains dan teknologi dengan jiwa kewirausahaan. Dengan bertumbuhkembangnya budaya kewirausahaan di perguruan tinggi, dapat diharapkan bahwa hasil-hasil penelitian dan pengembangan selain bernilai akademis, juga mempunyai nilai tambah bagi kemandirian perekonomian bangsa. Demikian pula para lulusan perguruan tinggi, tidak hanya berorientasi dan mampu menjadi pekerja saja, tetapi juga berorientasi dan mampu bekerja mandiri dan mengelola perusahaan atau industri sendiri, yang tidak tertutup kemungkinannya menjadi industri atau perusahaan besar. Situasi ini akan membuka peluang lebih besar bagi terwujudnya *industrial park* yang telah sejak lama menjadi cita-cita di banyak perguruan tinggi. Dengan demikian, hubungan sinergik antara pengembangan sains dan teknologi dengan penerapannya untuk kemandirian bangsa Indonesia dalam bidang teknologi dan ekonomi, akan terwujud dengan dukungan penuh perguruan tinggi.

Dapat kita lihat bagaimana Mahathir Muhammad mencetuskan betapa dahsyatnya pengaruh dunia wirausaha ini dalam percaturan politik dunia. Mahathir dalam KTT Organisasi Konferensi Islam (OKI) ke-10 menyampaikan pidato yang menyinggung hegemoni Yahudi di dunia. Prestasi yang dicapai kaum Yahudi yang notabene bangsa kecil yang mengalami penindasan selama 2000 tahun berhasil *survive* dan bahkan kemudian menjadi salah satu kekuatan dunia (*world power*). Ia menekankan, bahwa Yahudi selamat, lebih karena menggunakan otak dan ilmu pengetahuan, dan bukan hanya kekuatan fisik.

Mahathir lebih jauh menyatakan bahwa prestasi yang dicapai oleh bangsa Yahudi bukanlah mitos. Prestasi itu dicapai karena kegigihan dan kerja keras mereka dalam wirausaha. Dalam pidatonya, Mahathir sebenarnya lebih menekankan, agar umat Islam belajar dari sejarah Yahudi.

Apabila dikaitkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritasnya adalah beragama Islam, tampaknya terjadi pendangkalan pemahaman orang Islam terhadap peran kewirausahaan ini. Menurut Nanang, penumbuhkembangan berwirausaha di kalangan umat Islam sekarang ini terlihat minim karena umat Islam kurang memahami ajaran agamanya. Nanang menyatakan Kalau pemahaman umat Islam akan ekonomi dan wirausaha benar, maka umat Islam Indonesia bisa menjadi umat yang unggul di dunia. Bukankah Nabi Muhammad saw sejak anak-anak sudah diajari untuk berwirausaha, hingga saat mudanya menjadi pedagang?

Lebih jauh Nanang menyatakan bahwa, ajaran Islam memandang seorang wirausaha merupakan orang yang unggul dan termasuk kategori tertinggi hingga harus diperhitungkan oleh kelompok lainnya. Menurutnya, adanya pergeseran nilai yang dianut umat Islam disebabkan penyebaran informasi dari orang non-Islam yang menyesatkan. Misalnya, akhirat lebih penting daripada dunia dan semuanya telah ditakdirkan, batin lebih penting daripada lahir sebab lahiriah adalah semu.

Bila melihat sejarah dan ajaran Islam, lanjut Nanang, seharusnya umat Islam terutama mahasiswa dan sarjana muslim memiliki dasar kuat untuk menjadi wirausaha. Hal itu disebabkan oleh sikap seorang muslim yang baik yang dapat menjadi modal kuat untuk berwirausaha. Muslim yang baik adalah berbudi luhur, teladan, mental mulia dan agung, jujur, berwibawa, dan pemberani tapi murah hati.

Jika di Indonesia terjadi perlambatan atau stagnasi bagi perkembangan munculnya wirausahawan-wirausahawan muda, lalu bagaimana keadaan perkembangan wirausahawan di negara maju? Di negara maju, wirausahawan baru telah memperkaya pasar dengan produk-produk yang inovatif. Tahun 1980-an di Amerika telah lahir sebanyak 20 juta wirausahawan. Mereka menciptakan lapangan kerja baru. Demikian pula di Eropa Timur, wirausahawan ini mulai bermunculan. Bahkan negeri China, yang menganut paham komunis, mulai membuka diri terhadap lahirnya wirausahawan (Alma, 2005:v).

Melihat demikian pentingnya peranan kewirausahaan ini, perlu kiranya mata kuliah kewirausahaan (*entrepreneurship*) diberikan di perguruan tinggi.

Dengan kata lain, hendaknya perguruan tinggi mewajibkan semua jurusan untuk memberikan mata kuliah kewirausahaan. Tujuannya adalah agar semua lulusan perguruan tinggi tidak bingung dan canggung terjun ke masyarakat. Mereka, dengan bekal pengetahuan tentang kewirausahaan dapat memiliki mental kewirausahaan dan mengenal (menurut istilah Alma) *pepohonan wirausaha* yang akan dirintis. Tidak gelap lagi seperti melihat hutan rimba, tidak tahu arah tujuan.

Sebagai gambaran, mata kuliah kewirausahaan ini telah dijalankan di perguruan tinggi terkenal di AS, seperti UCLA, George Washington University, New York, dan berhasil dengan baik. Bahkan, Universitas Beijing di China pun menghapuskan mata kuliah Marxis dan menggantinya dengan mata kuliah kewirausahaan

Lalu, alasan teoretis apa yang menyebabkan perlunya mata kuliah kewirausahaan ini diberikan di perguruan tinggi? Jika kita perhatikan manfaat adanya wirausaha banyak sekali, antara lain sebagai berikut.

a. Menambah daya tampung tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran.
b. Sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan dan sebagainya.
c. Menjadi contoh bagi masyarakat lain sebagai pribadi unggul yang patut dicontoh karena seorang wirausaha adalah orang yang berani, jujur, dan tidak merugikan orang lain.

Secara garis besarnya, manfaat wirausaha ada 2 hal, yaitu sebagai berikut.

a. *Sebagai pengusaha,* memberikan darma baktinya melancarkan proses produksi dan konsumsi. Wirausaha mengatasi kesulitan lapangan kerja meningkatkan pendapatan masyarakat.
b. *Sebagai pejuang bangsa,* dalam bidang ekonomi, meningkatkan ketahanan nasional, mengurangi ketergantungan pada bangsa asing.

4. Tujuan Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi

Secara umum, budaya cendekia yang telah berhasil ditumbuhkan dalam pendidikan tinggi di Indonesia, ternyata dirasakan tidak cukup untuk membekali para sarjana agar dapat hidup mandiri, berkreasi memanfaatkan sains dan teknologi yang telah dipelajarinya. Selama ini, pendidikan di perguruan tinggi, lebih banyak menghasilkan lulusan pekerja, walaupun berpengetahuan

tinggi, bukan wirausahawan yang dengan penguasaan sains dan teknologinya berusaha secara mandiri mensejahterakan diri dan masyarakatnya. Walaupun ada beberapa sarjana yang berhasil membangun industri atau perusahaan, dan kreativitasnya dapat menjadi suatu produk komoditas pasar, namun hal tersebut bukan sebagai akibat dari tumbuhnya sikap kewirausahaan sebagai hasil pendidikan formal. Faktor keluarga dan lingkungannya lebih berperan dari pada pendidikan formal.

Kenyataan menunjukkan, bahwa lautan kehidupan diwarnai oleh inovasi-inovasi di berbagai bidang. Inovasi sebagai proses kreatif, tidak akan sukses ketika inovator belum memiliki semangat kewirausahaan. Pemahaman kesadaran ini menuntut penyajian mata kuliah kewirausahaan tidak bertumpu pada ranah kognitif, tetapi juga afektif, dan psikomotorik. Dengan kata lain, melalui mata kuliah ini, selain semakin memahami konsep kewirausahaan juga diharapkan meningkatkan semangat kewirausahaan mahasiswa.

Secara khusus, pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi memiliki tujuan sebagai berikut.

a. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peranan kewirausahaan dalam pertumbuhan ekonomi dan masyarakat.
b. Mengaplikasikan pengetahuannya itu secara lebih jauh dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial.
c. Meningkatkan pendidikan kewirausaahaan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa dalam menghadapi pasar kerja dan kesempatan kewirausahaan dan tantangan-tantangan ekonomi modern.
d. Menghasilkan budaya baru baik dari segi sosial dan komersial dari kegiatan-kegitan akademik.
e. Mengembangkan sektor-sektor kewirausahaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saingnya.

C. Penutup

Pada hakikatnya, manusia sejak dilahirkan sudah harus berjuang untuk hidup. Sejak bayi, manusia belajar mempertahankan hidup dan kehidupannya. Seorang bayi belajar berjalan dari merangkak, tertatih-tatih melalui jatuh bangun sampai dapat berjalan dengan baik. Hal ini memerlukan kesabaran dan perjuangan. Kesabaran dan perjuangan dalam berusaha inilah salah

satu modal yang harus tetap ditanamkan kepada mahasiswa dalam rangka menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan. Dalam Alquran Surat Hud ayat 61 dinyatakan bahwa bekerja dan berusaha, termasuk berwirausaha boleh dikatakan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia karena keberadaannya sebagai khalifah di muka bumi yang dimaksudkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik.

Dengan diberikannya mata kuliah kewirausahaan, hendaknya mahasiswa menyadari bahwa menjadi wirausaha merupakan hal yang sama baiknya atau bahkan lebih baik daripada menjadi orang gajian atau pegawai. Sesuai dengan pengertian wirausaha itu sendiri yang di dalamnya terkandung inovasi, kreatif, jujur, berjuang, dan membuka lapangan pekerjaan akan memberikan kedudukan yang lebih terhormat daripada menjadi orang gajian. Yang perlu disadari adalah jangan melihat usaha yang sudah besar atau yang sudah *"jadi"* tetapi lihatlah perjuangan yang pernah dilakukan oleh mereka. Orang yang memiliki jiwa wirausaha ini tidak memperdulikan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Mereka hanya senang menjalankan sesuatu dan mungkin tidak penting untuk dianggap hebat atau tidak oleh orang lain.

Selain diberikannya mata kuliah di perguruan tinggi bagi seluruh mahasiswa di semua jurusan tersebut, perlu dibuka sentra-sentra kewirausahaan di lingkungan kampus. Dengan demikian, civitas akademikanya baik dosen, pegawai administratif maupun mahasiswa merasakan manfaatnya.

Daftar Pustaka

Alma, Buchari. 2005. *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*. Bandung: Alfabeta.

Heinecke, William E. dan Jonathan Marsh. 2002. *Menjadi Entrepreneur Sejati. 21 Rahasia Sukses Manajer Bisnis Global.* Jakarta: Prestasi Pustaka.

http://www.dikti.org/p3m/modules.php?name=content&pa=showpage&pid=7 diakses tanggal 30 Desember 2006.

http://www.dikti.com, diakses tanggal 30 Desmber 2006.

http://www.depkop.go.id/index.php? option+com_content&task=view&id=493 &itemid=108 diakses tanggal 30 Desember 2006.

Layer, Geoff. 1995. Student Guidance and Support-Changing the Approach. *Implementing Change from within Universities and Colleges* Dalam Maria Slowey (Ed.). London: Kogan Page Limited. Hal. 113–124.

Lombardi, Felix W. 2005. *35 Kesalahan Entrepreneur dan Bagaimana Memperbaikinya.* Jakarta: Prestasi Pustaka.

Lupiyoadi, Rambat. 2004. *Entrepreneurship from Mindset to Strategy*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Suryana. 2006. *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.

Konsep Pembelajaran Bermakna

(Salah Satu Kompetensi Profesional Guru SD)

Oleh:

Kusrin

A. Pendahuluan

Para ahli berpendapat bahwa abad XXI merupakan abad pengetahuan. Terkait dengan itu, Makaminan Makagiansar mengutarakan bahwa, saat ini telah terjadi pergeseran paradigma dalam belajar dari terminal ke belajar sepanjang hayat atau *life long learning, learning trough out life, or continuing education.* Pendidikan untuk semua *(education for all)* yang dicetuskan oleh UNESCO, Bank Internasional, UNICEF dan UNDP *(United Nation Development Program)* di Dakkar berasumsi bahwa tingkat pendidikan suatu bangsa sangat menentukan bagi masa depannya. Semakin meningkat taraf pendidikan masyarakat, semakin besar kemungkinan bangsa itu akan lebih maju dan lebih berperan dalam persaingan antar bangsa (Makaminam Makagiansar, 2002).

Pandangan-pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa paradigma kehidupan telah bergeser dari yang semula mengandalkan kekuatan otot ke arah kekuatan otak. Artinya, kita sebagai pelaku pendidikan perlu untuk selalu meningkatkan kemampuan diri melalui belajar terus menerus tiada henti, menangkap perubahan, menganalisis, dan kemudian mempraktikkannya. Hal ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah saw, *"utlubul ilmi minal mahdi illal lahdi."* Terjemahan bebasnya, belajar itu dimulai dari buaian hingga ke liang lahat. Terlebih, kita berada di barisan terdepan dunia pendidikan yang merupakan agen perubahan *(agent of change)* memiliki tanggung jawab moral untuk menyebarluaskan perubahan-perubahan begitu deras yang mampu menembus batas-batas negara hingga ke dinding tembok rumah kita, baik

melalui media cetak ataupun elektronik, dan tentu dibarengi dengan sikap kritis terhadap perubahan itu.

Namun, pada sisi lain, yang perlu mendapat perhatian kita bersama antara lain: *pertama:* berdasarkan laporan *UNDP (United Nation Development Program)* tentang *HDI (Human Development Index)* atau yang dikenal dengan indeks pembangunan manusia memposisikan Indonesia pada peringkat 110 dari 173 negara, jauh di bawah Malaysia (peringkat 55), Thailand (peringkat 70), Filipina (peringkat 77), Cina (peringkat 96), dan Vietnam (peringkat 109), (Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003). *Kedua:* guru yang memandang dirinya sebagai pengawal profesional standar pendidikan, (Jaqcues Delors, 1998) yang merupakan figur sentral dalam pembelajaran masih terus perlu berbenah diri mengubah paradigma lama ke arah paradigma baru.

Kelompok guru berparadigma lama yang enggan untuk beranjak dari titik nol yang menganggap perubahan merupakan hal yang menyakitkan, padahal sementara orang berpendapat bahwa perubahan adalah sehat *(change is healthy),* perlu mendapat perhatian profesional yang serius baik dari semua pihak berupa pelatihan-pelatihan tentang pemahaman konsep dan aplikasinya *(in service training* atau pun *on service training)* guna menangkap perubahan-perubahan kemudian dilaksanakan di lingkungan kerja masing-masing. Guru yang berparadigma lama, walaupun kita menyadari bahwa guru hanya sebagian dari sistem yang sedang berjalan dan memang mereka bukan makhluk yang menyendiri (Makaminan Makagiansar, 2002), mengandung virus negatif yang rentan terhadap lingkungan di mana mereka berada. Artinya, virus negatif yang dikembangkan – secara sadar atau tidak sadar – oleh yang bersangkutan akan mempengaruhi nasib pihak-pihak di sekitarnya, antara lain: teman sejawat, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, orang tua murid, masyarakat sekitar, dan mungkin akan menyebar ke skala yang lebih luas.

Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu deras dan masalah-masalah mendasar yang telah diungkapkan di atas, jika kita cermati secara seksama, pemerintah telah melakukan banyak sekali langkah-langkah terobosan baik yang telah dipahami atau yang belum dipahami oleh kita mulai dari peluncuran manajemen berbasi sekolah dengan dewan pendidikan berikut komite sekolahnya, kurikulum 1994 dengan suplemennya, kurikulum 2004 dengan basis kompetensinya, kurikulum 2006 dengan KTSP-nya, wajib belajar 9 tahun, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan SMP terbukanya, kompensasi

kenaikan harga BBM dengan bosnya, diberlakukannya kembali ujian nasional dengan *passing grade* yang semakin meningkat berikut program antisipasi angka ketidaklulusan yang berupa program kejar paket B setara SMP dan program kejar paket C setara SMA, hingga perubahan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas menjadi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, diikuti dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Menggambarkan perubahan yang terakhir, UU Guru dan Dosen, di dalam UU itu disiratkan bahwa pemerintah menghendaki agar semua tenaga pendidik dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi menjadi tenaga fungsional yang professional di mana setiap pendidik diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi-kompetensi (pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial) dan sertifikasi pendidik. Secara akademik, pendidik di tingkat pendidikan dasar dan menengah khususnya, dikatakan memadai *(qualified)* apabila ia memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya S1 atau D4.

Kompetensi pedagogik artinya setiap pendidik memiliki pemahaman yang baik tentang teknik-teknik edukatif, antara lain ia mampu memandang secara komprehensif tentang peserta didik secara apa adanya dan berusaha membantu mereka untuk menemukan diri mereka sendiri. Kompetensi profesional artinya setiap pendidik memiliki kemampuan untuk merancang pembelajaran yang bermakna, menyajikan secara baik, dan melakukan penilaian terhadap apa yang telah dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah dan prosedur penilaian. Kompetensi kepribadian artinya setiap pendidik memiliki kepribadian yang patut dijadikan suri tauladan, memiliki kecerdasan emosional yang tinggi sehingga ia mampu bertindak secara proaktif, yaitu bertindak didasarkan pada nilai-nilai yang melekat pada dirinya bukan reaktif yang bertindak tergantung pada apa yang dilakukan oleh orang lain.

Goleman, pakar kecerdasan emosional menjelaskan bahwa keberhasilan hidup seseorang tidak semata-mata ditentukan pintar atau tidaknya seseorang karena kecerdasan intelektual *(IQ)* hanya menyumbangkan 20% dari kesuksesan itu, 80% selebihnya ditentukan oleh kecerdasan-kecerdasan lain, utamanya adalah kecerdasan emosional *(Emotional Intelligence),* (Goleman, 2002). Dalam riset ditemukan bahwa salah satu kelompok orang berintelegensi tinggi, jauh di atas *IQ*-120 secara bersamaan dalam kelompok telah menghasilkan karya yang dipersamakan dengan keberhasilan *IQ*-70, (Makaminan Makagiansar, 2002). Kompetensi sosial, artinya seorang pendidik mampu menempatkan diri di mana

saja ia berada dan mampu bekerja sama dengan orang lain khususnya di unit kerjanya. Kompetensi-kompetensi yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku tersebut harus dimiliki, dihayati atau diinternalisasikan dalam hati, dikuasai, dan kemudian diimplementasikan dalam tugas keprofesionalannya.

B. Empat Pilar Pendidikan Universal

Jacques Delors dalam *Learning: The Treasure Within* yang dialih bahasakan oleh Napitupulu, 1999, mengisyaratkan bahwa ada 4 pilar pendidikan *universal* yang ditetapkan UNESCO, yaitu: *learning to know* (belajar untuk mengetahui), *learning to do* (belajar untuk berbuat), *learning to be* (belajar untuk menjadi diri sendiri), dan *learning to live together* (belajar untuk hidup bersama dengan orang lain). Secara sekilas, masing-masing pilar dijelaskan sebagai berikut.

1. *Learning to Know* (belajar untuk mengetahui)

Jenis belajar ini menekankan bahwa memperoleh pengetahuan adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir dan dapat diperkaya oleh semua bentuk pengalaman. Perluasan bidang pengetahuan yang memampukan manusia untuk memahami lebih baik berbagai aspek lingkungan menimbulkan rasa ingin tahu intelektual, merangsang pikiran kritis dan memampukan manusia untuk lebih memahami realitas dengan memperoleh kemandirian di dalam mengambil keputusan.

2. *Learning to Do* (belajar untuk berbuat)

Belajar berbuat terkait dengan bagaimana kita mengajar peserta didik untuk mempraktikkan apa yang sudah dipelajarinya dan bagaimana pendidikan dapat diadaptasikan dengan pekerjaan di masa depan. Untuk keperluan yang lebih luas, kompetensi peserta didik yang berkenaan dengan berbagai situasi kerja dalam tim perlu dikembangkan. Hal ini dapat terwujud apabila peserta didik berkesempatan untuk mencoba sendiri dan mengembangkan kemampuan dengan jalan terlibat di dalam pengalaman kerja atau pekerjaan sosial pada waktu mereka menghayati proses pendidikan.

3. *Learning to Be* (belajar menjadi diri sendiri)

Belajar jenis ini menekankan bahwa pendidikan hendaknya menyumbang pada perkembangan seutuhnya dari setiap orang–jiwa dan raganya, intelegensinya, kepekaannya, rasa estetikanya, tanggung jawab pribadi dan nilai-nilai spiritual, berpikir mandiri dan kritis, dan membuat keputusan sendiri

dalam rangka menentukan bagi mereka apa yang diyakini harus dilaksanakan di dalam berbagai keadaan kehidupan. Alhasil, pendidikan harus memampukan setiap orang untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri, mengambil keputusan sendiri dan memikul tanggung jawabnya sendiri.

4. *Learning to live together* (Belajar untuk hidup bersama dengan orang lain)

Belajar jenis ini menekankan bahwa sebelum memahami orang lain, seseorang harus pertama-tama mengenali dirinya sendiri. Seseorang harus berusaha untuk selalu ber-*DDCT (Deep Dialog and Critical Thinking)*, yaitu berdialog dalam-dalam dengan dirinya sendiri untuk menghasilkan pikiran kritis melalui siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Setelah seseorang mampu memahami siapa dirinya *(who he is)*, apa yang harus diperbuat *what he should do)*, kapan ia harus berbuat *when he should do)*, di mana ia harus berbuat *where he should do)*, mengapa ia harus berbuat *(why he should do)*, dan bagaimana cara melakukannya *(how should he do)*, ia diharapkan mampu masuk ke wilayah yang lebih luas, yaitu lingkungan sosial karena di era mendatang, tingkat intelektual perorangan tidak cukup. Kerja tim, sinergitas, dan interdependensi (saling ketergantungan) sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai aspek kehidupan *(team work is better for all)* walaupun dalam kompleksitas keadaan saat ini diperlukan kompetisi *(to compete)*, di samping juga harus bersanding *(to cooperate)*.

C. Otak Manusia

Tony Buzan dalam Gordon Dryden dan Jeannette Vos mengungkapkan, *your brain is like a sleeping giant*, otak Anda bagaikan seekor raksasa yang sedang tidur. Sementara itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa otak manusia dapat hidup selama kurang lebih 130 tahun. Selanjutnya, Gordon Dryden dan Jeannette Vos menjelaskan, bahwa besarnya tidak lebih dari jantung bunga kol yang memiliki berat sekitar 1.500 gram. Akan tetapi, otak mengandung berbagai keunikan, yaitu: memiliki tenaga ribuan kali lebih besar dibandingkan dengan komputer tercanggih di dunia sekali pun; memiliki sekitar 1 trilyun sel (100 milyar terdiri sel saraf aktif atau neuron dan 900 milyar sel lain yang mengikat, mempertahankan, dan melindungi sel-sel yang aktif; dapat berkembang hingga 20.000 cabang pada setiap satu neuron; memiliki 4 bagian otak yang berbeda (1 otak instinktif, 1 otak keseimbangan, 1 otak emosional, 1 kortek yang mengagumkan).

Your brain has 100 billion active cells, each with up to 20.000 connections

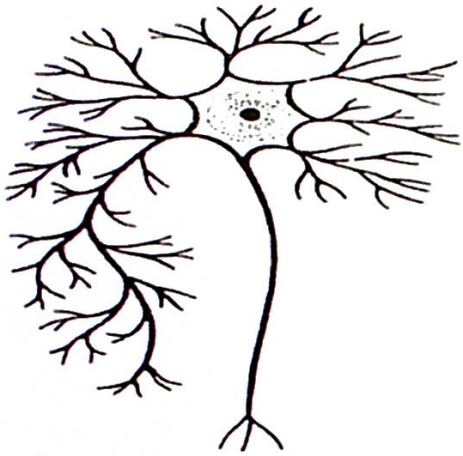

Your brain has about 100 billion active neurons or nerve cells. Each one grows branches like a tree, to store information, Up to 20.000 branch-like *dendrites* with each cell. Each neuron is like a powerful computer. And each connects to other cells by sending electrical-chemical: messages along axons.

Sumber: Tony Buzan, *Make The Most of Your Mind*, Pan, London.

Ilustrasi 1: dari *Make The Most of Your Mind* oleh Tony Buzan

Memiliki dua sisi yang dapat bekerja secara harmonis (otak kiri berkaitan dengan hal-hal yang bersifat akademik dan otak kanan berkaitan dengan kreativitas); mampu melangsungkan arus informasi berjuta pesan dalam setiap detik; memiliki berbagai pusat kecerdasan; mengoperasikan sekurang-kurangnya 4 panjang gelombang yang terpisah; mengontrol system transmisi yang memancarkan pesan secara elektrik dan kimia secara cepat ke seluruh bagian tubuh; dan sebagai kunci revolusi belajar anda.

Dari sejumlah misteri otak di atas, dua di antaranya, belahan otak kanan dan kiri dan berbagai pusat kecerdasan, akan dijelaskan seperti berikut.

1. Belahan Otak

Otak manusia terdiri dari dua belahan, otak kiri dan kanan. Otak kiri yang disebut sebagai otak akademik memainkan peranan utama pada proses logika, kata-kata, angka-angka, matematika, dan urut-urutan. Belahan otak ini digunakan untuk berpikir vertikal atau konvergen (lurus). Sementara itu, otak kanan yang disebut sebagai otak kreatif berkaitan dengan sajak, irama, musik, gambar, angan-angan. Belahan otak ini digunakan untuk kegiatan berpikir lateral atau *divergen* (berpencar).

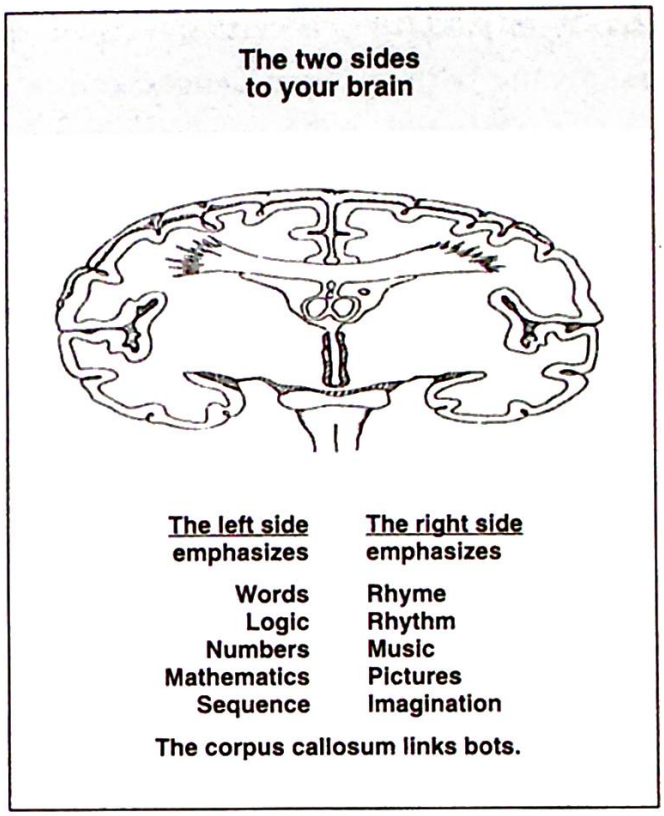

J.P. Guilford yang dikutip Ludy T. dkk. (1987: 254) Mengatakan, "...most tests measure convergent thinking in which the person uses the information presented and is asked to arrive at a single answer. In divergent thinking, the task is to generate as many.

Ilustrasi 2: *The Two sides to your brain* oleh Barbara Meiser Vitale

Answers as possible, "...hasil tes menunjukkan bahwa bagi kelompok orang yang berpikir konvergen (*convergent thinking*) menjawab hanya dengan satu jawaban. Sebaliknya, bagi kelompok orang yang berpikir divergen (*divergent thinking*) mengembangkan jawaban sebanyak yang mereka bisa. Colin Rose (dalam Gordom Dryden dan Dr. Jeannette Vos, 1999: 125), ahli belajar secara akselerasi memberi contoh kedua belahan otak bekerja bersama-sama, *"Jika anda sedang mendengarkan sebuah lagu, belahan otak kiri memproses syair dari lagu itu, sementara belahan otak kanan memproses iramanya. Sehingga, lanjutnya, anda jangan heran kalau anda dapat dengan cepat mempelajari sebuah lagu dengan cepat."*

2. Otak Sebagai Pusat Berbagai Kecerdasan

Prof. Howard Gardne (dalam Gordon Drydendan Dr. Jeannette Vos, 1999: 120), seorang ahli ilmu jiwa, dari Universitas Harvard berpendapat, bahwa sekurang-kurangnya di dalam otak manusia terdapat 8 tipe kecerdasan yang berbeda, yaitu: kecerdasan linguistik (*linguistic intelligence*), kecerdasan matematis

atau logis *(mathematics/logical intelligence)*, kecerdasan visual/spasial *(spatial/visual intelligence)*, kecerdasan yang berhubungan dengan musik *(musical intelligence)*, kecerdasan naturalis *(naturalist intelligence)*, kecerdasan interpersonal *(interpersonal intelligence)*, kecerdasan intra-personal *(intra-personal intelligence)*, dan kecerdasan fisik *(bodily/physical intelligence)*.

Gardner mengatakan, bahwa masing-masing kita memiliki beberapa tipe dari 8 kecerdasan itu. Secara tradisional, kata Gardner, 2 dari 8 tipe kecerdasan itu telah diterapkan dalam dunia pendidikan, yaitu: kecerdasan linguistik dan matematis. Kedua kecerdasan ini juga dijadikan sasaran dalam pengukuran tingkat keberhasilan peserta didik di sekolah-sekolah di seluruh dunia dan hal ini telah membatasi dan membelokkan potensi belajar kita.

Untuk lebih memahami batasan kedelapan tipe kecerdasan, pada bagian ini dijelaskan secara terbatas masing-masing kecerdasan tersebut, sebagai berikut.

a. Kecerdasan linguistik *(linguistic intelligence)* terkait dengan kemampuan kita dalam membaca, menulis, dan berkomunikasi dengan kata-kata (bukan *body language)*. Kecerdasan ini dimiliki oleh para pengarang dan ahli kesusastraan.
b. Kecerdasan matematis/logis *(mathematic/logical intelligence)* terkait dengan kemampuan kita dalam membuat suatu alasan dan kegiatan hitung-menghitung. Kecerdasan ini banyak dikembangkan oleh ilmuwan, ahli matematik, pengacara, hakim.
c. Kecerdasan spasial/visual *(spatial/visual intelligence)* dikembangkan oleh orang-orang dalam kelompok arsitek, pelukis, navigator, pilot, dan ahli pahat.
d. Kecerdasan yang berhubungan dengan musik *(musical intelligence)* dikembangkan secara optimal oleh para pengarang lagu, *conductors*, dan musisi.
e. Kecerdasan naturalis *(naturalist intelligence)* terkait dengan kemampuan seseorang bekerja dengan dan mencintai alam. Kecerdasan ini dikembangkan oleh pecinta alam, pecinta binatang, penjual berbagai tanaman.
f. Kecerdasan interpersonal *(interpersonal intelligence)* terkait dengan kemampuan seseorang untuk bersosialisasi dengan orang lain. Kecerdasan ini dikembangkan oleh *salesmen*, *motivators* (termasuk guru), negosiator.

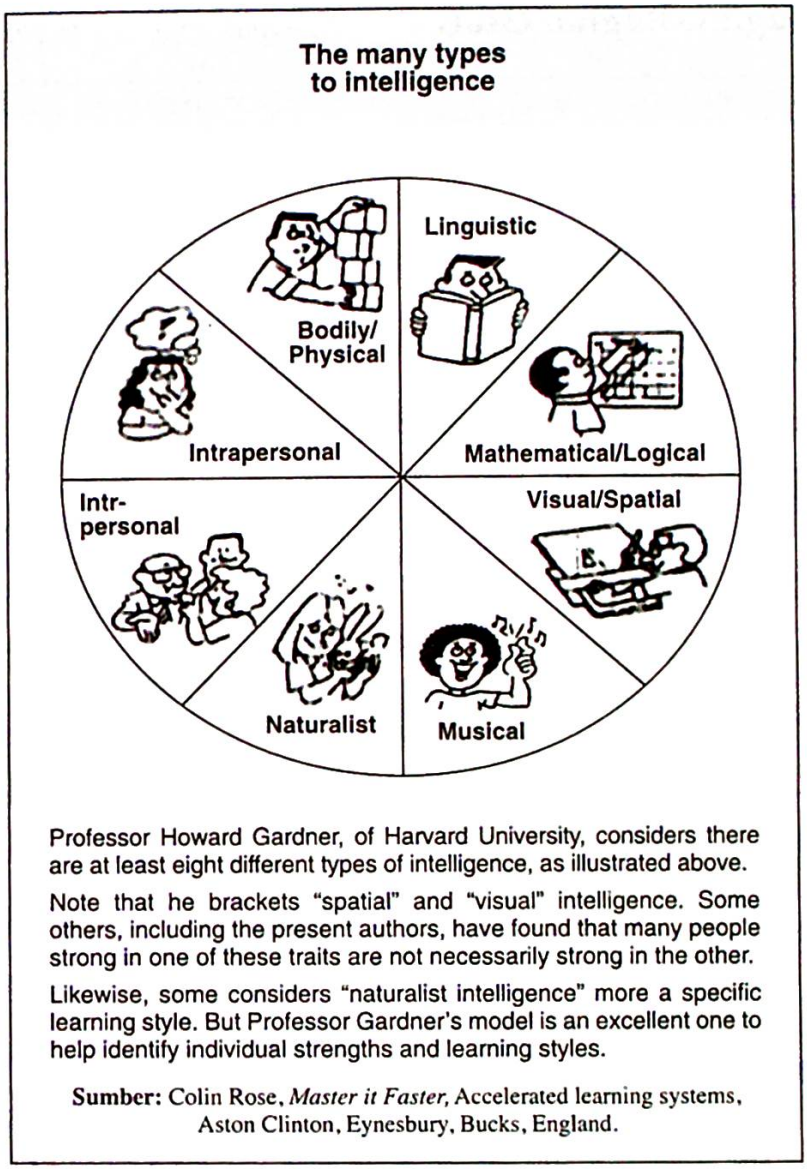

Ilustrasi 3: *8 different types of Inttelligence* oleh Colin Rose

g. Kecerdasan intra-personal *(intra-personal intelligence)* atau disebut juga *introspective intelligence,* terkait dengan kemampuan pemahaman seseorang untuk mengetahui siapa dirinya dan kemampuan ini dapat menghasilkan intuisi yang luar biasa. Kecerdasan ini memungkinkan seseorang untuk menggudangkan berbagai informasi ke dalam pikiran bawah sadar *(subconscious mind).*

h. Kecerdasan fisik atau kinestetik *(physical/kinesthetic intelligence)* dikembangkan oleh para atlet, penari, pesenam, petinju, mungkin ahli bedah.

Ahli dari Inggris, Charles Handy (dalam Gordon Dryden dan Jeannette Vos, 1999: 123), mengatakan bahwa di samping kedelapan tipe kecerdasan di atas, ada beberapa tipe lain, yaitu *plain common sense* (pikiran murni yang sehat).

3. Fungsi Bagian-Bagian Otak

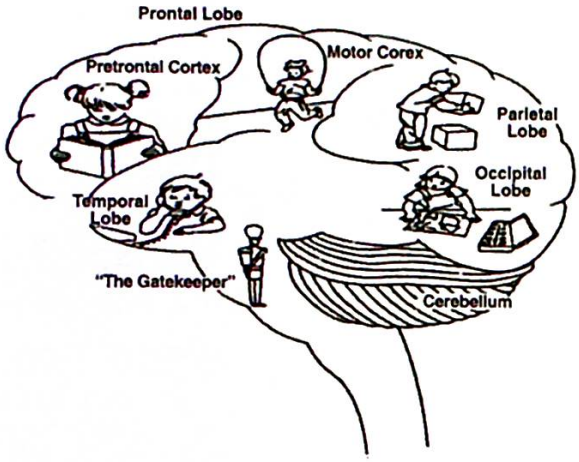

The parts of the brain that deal with different functions:

THE PREFRONTAL CORTEX	: this deals with thinking.
THE MOTOR CORTEX	: this control activity.
THE TEMPORAL LOBE	: the speech center of the brain.
THE PARIETAL LOBE	: this handles your special ability.
THE OCCIPITAL LOBE	: your visual center.
THE CEREBELLUM (or little brain)	: this plays a key part in adjusting posture and balance. It also acts like riding a bicycle or using a typewriter.
THE "GATEKEEPER"	: actually you have three "gatekeeper". The amygdale, the hippocampus and the caudate nucleus. All relay important messages to different part of the brain.

Sumber: Jane M Healy, *Your Child's Growing Mind*, Doubleday, 666 fifth Avenues, New York.

Ilustrasi 4: *Your Child's Growing Mind* oleh Jane M. Healy

Bagian-bagian otak terdiri dari *prefrontal cortex, motor cortex, temporal lobe, parietal lobe, occipital lobe, cerebellum,* dan *gatekeeper.* Masing-masing bagian otak memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti: a) *prefrontal cortex* berkenaan dengan kegiatan berpikir; b) *motor cortex* berfungsi sebagai pengontrol seluruh aktivitas; c) *temporal lobe* berfungsi sebagai pusat memproduksi ujaran; d) *parietal lobe* mengurusi kemampuan khusus seseorang; e) *qccipital Lobe* berfungsi sebagai pusat penglihatan/visual; f) *cerebellum* atau otak kecil berperan kunci dalam menselaraskan antara postur dan keseimbangan dan juga berperan sebagai pilot otomatis pada saat seseorang melakukan aktivitas seperti, naik sepeda atau mengetik; g) *gatekeeper* yang terdiri dari tiga bagian *(amygdala, hippocampus,* dan *caudate nucleus)* berfungsi untuk merelayi menyampaikan pesan-pesan penting ke seluruh bagian otak.

Gardner mengingatkan bahwa operasi otak dapat merusak beberapa bagian dari tipe kecerdasan itu. Oleh karena itu, penyakit *stroke* dapat mempengaruhi kegiatan berjalan atau berbicara, tergantung bagian otak mana yang terkena serangan.

D. Pembelajaran Bermakna

Mencermati deskripsi tentang harapan dunia pendidikan dan anugerah Yang Maha Kuasa atas otak yang sangat luar biasa di atas, bagaimana hubungan kedua hal tersebut dengan pembelajaran? Apakah yang dilakukan guru dalam pembelajaran selama ini belum memenuhi harapan? Apa yang perlu direvisi? Atau ...? Dan seterusnya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyan tersebut, kita perlu mengingat kembali apa sesungguhnya belajar dan pembelajaran itu. Belajar pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang melibatkan kegiatan pisik dan mental peserta didik. Sedangkan pembelajaran, menurut Undang-Undang Sisdiknas 2003 adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kedua batasan mengisyaratkan bahwa apa yang seharusnya dilakukan pendidik adalah membantu peserta didik agar dapat belajar bagaimana belajar. Artinya, tugas pendidik bukanlah menuangkan sejumlah pengetahuan ke dalam otak peserta didik, tetapi pendidik berusaha untuk menyalakan api yang ada dalam otak mereka, sehingga kompetensi yang ada dalam diri mereka, pengetahuan, keterampilan, dan sikap beserta nilai-nilai dapat dikembangkan secara optimal melalui proses pembelajaran bermakna *(meaningful learning)*.

Pemahaman lanjutan yang perlu disepakati bersama bahwa setiap manusia, termasuk peserta didik tentunya, memiliki dua belahan otak (kiri dan kanan), serta memiliki beberapa tipe kecerdasan dari delapan yang telah diutarakan di atas. Otak kiri berkaitan erat dengan optimalisasi kecerdasan intelektual *(IQ)* atau berpikir vertikal *(convergent thinking)*, otak kanan berkaitan dengan pengembangan kecerdasan emosional *(EI)*, kecerdasan kreativitas *(CI)* bahkan kecerdasan spiritual *(SI)* atau berpikir lateral *(divergent thinking)*. Setiap manusia memiliki beberapa tipe kecerdasan yang menunjukan bahwa sesungguhnya setiap siswa di dalam kelas sudah dapat dipastikan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Siswa yang memiliki kelebihan dalam matematika belum tentu memiliki kelebihan dalam bidang-bidang lain. Peserta didik yang kurang dalam matematika, bahasa, IPS, atau IPA mungkin memiliki kecerdasan lain yang belum tergali oleh peserta didik tersebut, misalnya kecerdasan pisik *(physical Intelligence)*. Padahal, tugas pendidik yang utama adalah memberi bantuan kepada peserta didik agar mereka menyadari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, kemudian membimbing dan mendorongnya

agar kelebihan yang dimiliki peserta didik dapat dikembangkan secara optimal, sehingga kelak kecerdasan itu dapat dimanfaatkan secara baik untuk kelangsungan hidupnya (takwa, mandiri, kritis, cerdas, kreatif, bertanggung jawab, mampu memecahkan masalahnya sendiri, dan mampu bersaing dan bersanding dengan orang lain). Dengan demikian, adalah kurang bijaksana apabila ada sementara guru memberi cap pada peserta didiknya bahwa si A bodoh sebelum guru tersebut membatu mengungkapkan potensi peserta didik yang bersangkutan secara optimal melalui pembelajaran yang bermakna yang diuraikan berikut ini.

Secara konseptual, pembelajaran dikatakan bermakna apabila pembelajaran itu berorientasi pada pemberdayaan potensi diri peserta didik, yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif terkait dengan pengetahuan *(IQ)*, aspek afektik terkait dengan perasaan, nilai-nilai, sikap *(EI* dan *SI)*, aspek psikomotorik terkait dengan keterampilan fisik dan mental *(CI)*, seperti keterampilan membuat suatu produk tertentu, keterampilan mengungkapkan pendapat, keterampilan mendengarkan orang lain, dan sebagainya.). Artinya, dalam suatu proses pembelajaran, ketiga aspek yang dilatarbelakangi pengembangan kedua belahan otak dan tipe-tipe kecerdasan tersebut terintegrasi secara simultan (serempak bersama-sama) yang melibatkan kegiatan baik pisik maupun mental peserta didik.

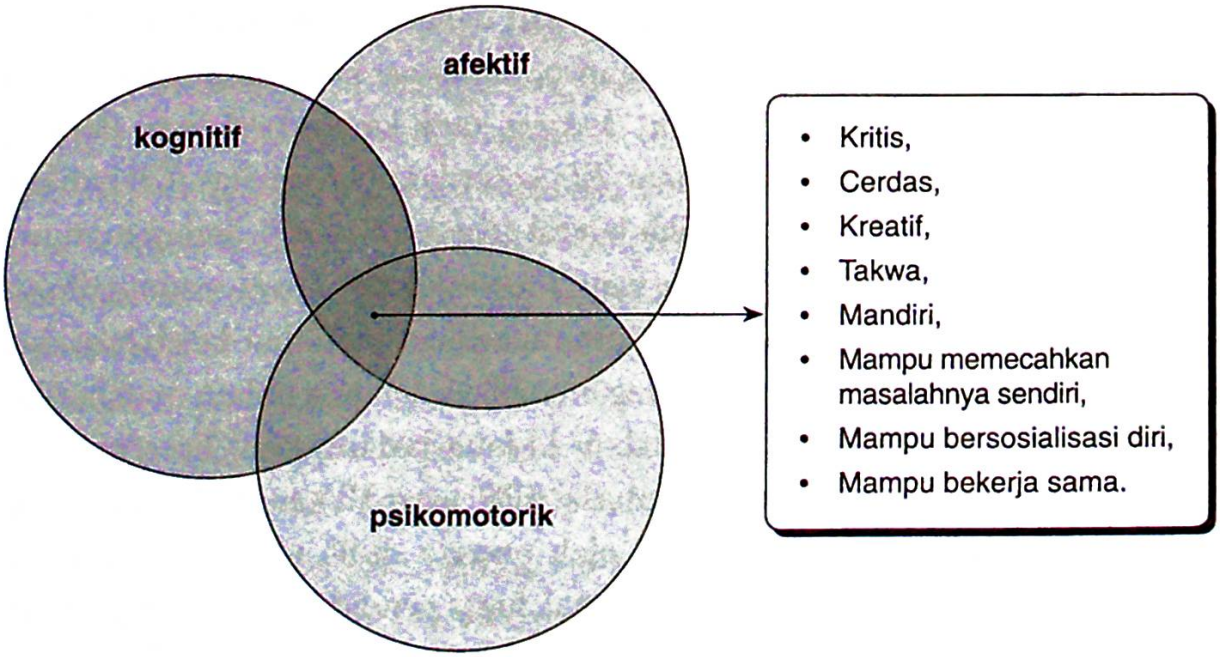

Ilustrasi 5: Integrasi 3 aspek potensi siswa dalam pembelajaran bermakna

Pembelajaran bermakna akan membuahkan hasil secara optimal apabila dalam prosesnya, pendidik dapat melakukan hal-hal berikut ini.

a) Menggunakan berbagai metode yang relevan dengan kompetensi dasar yang dikembangkan pada saat itu, dengan cara menciptakan kondisi-kondisi atau pengalaman belajar atau kegiatan belajar yang memungkinkan peserta didik berkesempatan mengungkapkan potensi diri seperti yang telah diutarakan di atas. Contoh pengalaman belajar yang dapat diciptakan pendidik dalam proses pembelajaran, antara lain: bermain peran, bernyanyi, bercerita, berdemostrasi, berkarya wisata, mendengarakan, mengamati objek, wawancara, tanya jawab, berdiskusi, menggambar, dan sebagainya. Mengapa hal ini penting? Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang senang belajar dengan cara melihat *(visual)*, mendengarkan *(auditif)*, menyentuk *(taktil)*, mencium *(olfaktoris)*, mencicipi *(gustative)* atau ada pula yang menggabungkan dari semua gaya belajar itu. Jadi, tidak tepat jika pendidik hanya tertarik pada metode ceramah dalam membelajarkan peserta didiknya.

b) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Peter Kline mengatakan (dalam Gordon Dryden dan Dr. Jeannette Vos, 1999: 22), "*Learning is most effective when it's fun.*" Belajar akan berjalan efektif apabila kegiatan itu berlangsung secara menyenangkan. Beberapa hal yang perlu dicermati pendidik agar peserta didik dengan senang hati mengikuti kegiatan belajar, antara lain: pendidik harus siap secara pisik dan mental, berusaha menebarkan senyum, tidak perlu menunjukkan kewibawaan secara berlebihan, bersikap positif terhadap kelebihan dan kekurangan peserta didik, bersikap adil, menumbuhkan keberanian dan sikap positif peserta didik, mampu mendengarkan dan menghargai pendapat peserta didik, dan sebagainya. Suasana belajar yang mencekam dapat mematikan kreativitas peserta didik. Otak kanannya akan mengalami hambatan dalam berkembang. Di samping itu, suasana mencekam dapat menimbulkan *stress* pada diri peserta didik dan semua yang dipelajarinya menjadi sulit. Gordon Stokes (dalam Gordon Dryden dan Dr. Jeannette Vos, 1999: 370) mengatakan, "*80 percent of learning difficulties are related to stress. Remove the stress and you remove the difficulties.*" 80 persen kesulitan belajar disebabkan oleh keadaan *stress*. Singkirkan *stress* baru anda dapat menyingkirkan kesulitan. Launa Ellison (dalam Gordon Dryden dan Dr. Jeannette Vos, 1999: 304) mengatakan, "*since the brain cannot pay attention to everything ... uninteresting,*

boring or emotionally flat lessons simply will not be remembered." Selama otak tidak dapat memperhatikan sesuatu dengan baik (tidak tertarik atau bosan atau perasaan jenuh dengan apa yang ia hadapi) , maka pelajaran yang sederhana saja akan sulit diingat.

c). Memberi motivasi secara terus menerus. Pendidik perlu menghindari ucapan-ucapan yang menyinggung peserta didik sehingga mematahkan semangat mereka untuk belajar. Perlu diingat bahwa tugas pendidik membantu peserta didik agar mereka dapat belajar bagaimana belajar.

Tidak kalah pentingnya, dari yang telah diuraikan di atas adalah pekerjaan rumah (PR) atau tugas siswa. Siswa akan termotivasi jika PR dan tugas diberikan dan ditindaklanjuti dengan cara yang baik. Temuan penelitian UNESCO mengatakan, "siswa-siswa akan belajar jika pekerjaan rumah ditugaskan secara teratur, diberi nilai, dikembalikan segera, dan digunakan terutama untuk melatih bahan yang baru pertama sekali disajikan oleh guru di sekolah, (UNESCO, 2002). Di sisi lain, Bettie B. Youngs (dalam Gordon Dryden dan Jeannette Vos, 1999: 288) mengatakan, "*motivation and productivity skyrocket when students reach their goals.*" Motivasi dan daya produktivitas peserta didik akan meroket ke angkasa apabila mereka mencapai tujuan mereka atau menyelesaikan apa yang menjadi tugas mereka.

E. Penutup

Pendidik dipandang sangat perlu untuk mengubah paradigma dalam melakukan pembelajaran di kelas. Gaya mengajar lama yang hanya berfokus pada guru *(teacher centered activity)* perlu diubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa *(student centered activity).*

Pemahamannya bahwa, gaya mengajar guru yang hanya menyuapi peserta didik sudah tidak mampu lagi untuk mengembangkan potensi diri mereka (pengetahuan, sikap, nilai-nilai, dan keterampilan). Alhasil, kompetensi atau kemampuan peserta didik dari ketiga aspek itu tidak akan terungkap. Kelemahan lain, pembelajaran yang bersifat instruktif satu arah dapat menghambat perkembangan kreativitas peserta didik.

Dunia ke depan menghendaki agar generasi masa depan mampu bertanding dan sekaligus bersanding. Seperti yang dijelaskan dalam 4 pilar pendidikan universal, bahwa siswa sangat perlu mengetahui pengetahuan baru

(adanya di SK dan KD yang dijabarkan dalam indikator) *(learning to know)*, setelah itu mereka mempraktikan apa yang mereka ketahui di dunia nyata *(learning to do)*. Namun, dalam proses mencari tahu, pendidik tidak perlu serta merta memberi tahu, tetapi ia lebih berfungsi sebagai fasilitator (membantu, mengarahkan, membimbing peserta didik untuk berbuat mencari pengetahuan baru yang disyaratkan dalam kurikulum), sehingga pada gilirannya mereka akan terbiasa untuk mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki. Kemampuan dasar yang telah dimiliki itu (melalui berbuat secara pisik dan mental) akan memunculkan rasa percaya diri *(learning to be)* yang tinggi sebagai bekal utama dalam bersanding dengan orang lain *(learning to live together)* dalam konteks kerjasama dalam tim yang cerdas. Dengan penuh harapan, memperoleh sesuatu melalui proses yang baik akan menghasilkan *out put* yang baik dan *out put* yang baik akan menjadi *out come* yang handal, takwa, cerdas, mandiri, kreatif, kritis, mampu memecahkan masalahnya sendiri, dan mampu bekerja sama dalam konteks kebaikan serta mampu bersaing dan bersanding di era global.

Daftar Pustaka

Akademi Pendidikan Internasional. 2002. *Seri Praktik Pendidikan,* Jakarta: Biro Pendidikan Internasional UNESCO.

Benjamin Jr., Ludy T., J. Roy Hopkins, Jack R. Nation. 1987. *Psychology.* USA: Macmillan Publishing Company.

Cheffee, John. 1998. *The Thinker's Way,* United States of America: Time Inc.

Covey, R. Steven. 2002. *The 7 Habits of Highly Effective People,* Jakarta: Binarupa Aksara.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pandidikan Nasional,* Jakarta: Biro Hukum Sekjendepdiknas.

———, 2006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,* Jakarta: Biro Hukum Dirjendepdiknas.

Departemen Agama RI. 2003. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Sisdiknas,* Jakarta: Poks VI PFE DPR RI.

Delors, Jacques. 1998. *Pendidikan Untuk Abad XXI,* Jakarta: Komnas Indonesia untuk UNESCO Depdiknas.

———, 1999. *Learning: The Treasure Within,* Paris: UNESCO.

Dryden, Gordon and Dr. Jeannette Vos. 1999. *The Learning Revolution,* The USA: The Learning Web.

Goleman, Daniel. 2002. *Emotional Intelligence,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Makagiansar, Makaminan. 2002. *Saling Asih, Saling Asuh, Saling Asah,* Jakarta: Makaminan Makagiansar.

Rasyat, Aminuddin. 2003. *Teori Belajar dan Pembelajaran,* Jakarta: Uhamka Press.

UNESCO. 2001. *Keys to the 21st Century,* Paris: UNESCO.

Bagian 2

Isu-Isu Kritis Bidang Pendidikan Bahasa

Pendidikan *Imersi* dan *Bilingual* di Jenjang Pendidikan Formal Indonesia

Oleh:
Zul Amri
(Universitas Negeri Padang)

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini, dunia pendidikan di Indonesia diramaikan oleh kebijakan pemerintah tentang penciptaan sekolah dengan pendidikan bertaraf internasional. Pemerintah menginginkan agar sekolah-sekolah terbaik yang ada saat ini dapat ditingkatkan mutunya, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang setara dengan lulusan luar negeri (negara yang sudah dianggap mapan dalam bidang pendidikan), seperti: Singapura, Australia, atau Amerika Serikat. Dengan demikian, diharapkan, lulusan sekolah Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke negara-negara lain yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, dapat diterima dan tidak akan mengalami kendala dalam mengikuti proses pembelajaran selama masa studi.

Beberapa kebijakan telah diambil, baik oleh pemerintah melalui Dirjen Dikdasmen, maupun oleh pengambil keputusan di tingkat bawah dan bahkan oleh lembaga swasta. Beberapa sekolah telah membuka sekolah dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajarannya. Sekolah yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar disebut dengan *sekolah imersi*. Saat ini, sudah ada beberapa sekolah, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi yang menggunakan pendidikan imersi.

Sekolah terbaik yang belum mungkin menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, mulai menggunakan dua bahasa (*bilingual*) dalam proses

pembelajarannya. Penggunaan istilah *bilingual* ini juga masih diperdebatkan oleh para ahli. Ada ahli bahasa yang merumuskan bahwa kemampuan berdwibahasa (*bilingual*) itu mengharuskan pengguna bahasa memiliki kemampuan yang sama pada kedua bahasa. Bloomfield mengemukakan bahwa sesorang dikatakan *bilingual* kalau mempunyai penguasaan yang sama baiknya terhadap dua bahasa, seperti halnya oleh penutur asli (Bloomfield, dalam Rusyana, 1988: 1).

Rumusan ini berarti bahwa guru yang akan mengajar dengan menggunakan sistem *bilingual* diharuskan mempunyai kemampuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang sama. Kalau rumusan Bloomfield ini diikuti, maka harus diakui bahwa pengajaran *bilingual* tidak mungkin dapat diterapkan di Indonesia karena susah atau tidak mungkin mendapatkan guru-guru Indonesia yang mempunyai kemampuan yang sama dalam kedua bahasa tersebut.

Rumusan ini mendapatkan ketidaksetujuan dari para pakar bahasa yang lain, karena tidak mungkin terjadi dan sangat sulit untuk menentukan kriteria penggunaan bahasa yang sama baiknya seperti penutur asli tersebut. Sesama penutur asli juga berbeda-beda penguasaan bahasanya. Di samping itu, penguasaan itu meliputi berbagai keterampilan yang melibatkan berbagai komponen bahasa. Selain itu, penggunaan bahasa oleh penutur asli itu pun ternyata berbeda dalam menggunakan bahasa untuk tujuan yang berbeda atau dalam situasi yang berlainan. Artinya, rumusan yang dikemukakan oleh Bloomfield akan sangat rumit dalam penerapannya, sehingga tidak ada orang yang bisa dianggap *bilingual*.

Pendapat yang agak tidak begitu rumit dikemukakan oleh Weinreich (dalam Rusyana). Weinreich menyatakan bahwa orang yang *bilingual* adalah yang menggunakan dua bahasa secara berganti-ganti (lihat Rusyana, 1988: 1). Definisi ini agak sedikit longgar, karena tidak memberikan batasan yang kaku dalam tingkat penguasaan. Ini tentu bukan berarti bahwa yang dikemukakan oleh Blomfield tidak bisa diterima, tetapi malah dapat dikategorikan sebagai bilingualisme tingkat tinggi. Weinreich malah meluaskan definisinya ke kelompok orang yang menggunakan lebih dari dua bahasa (*mulitilingualisme*).

Masyarakat Indonesia, pada umumnya, adalah masyarakat bilingual, kalau ditinjau dari rumusan yang dikemukakan Weinreich. Setiap orang Indonesia minimal menguasai dua bahasa dalam hidupnya, yaitu bahasa ibu (bahasa daerah) dan bahasa Indonesia (bahasa nasional). Bahasa ibu mereka peroleh

dalam keluarga dan masyarakat tempat tinggal dan bahasa Indonesia diperoleh melalui pendidikan dan acara televisi yang mereka tonton. Pengajaran bilingual, dalam artian bahasa daerah dan bahasa nasional (Indonesia) sudah merupakan hal yang sudah sangat biasa dalam sistem persekolahan di Indonesia, terutama di daerah-daerah.

Pengajaran bilingual dalam tulisan ini bukanlah pembelajaran yang menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Pengajaran bilingual di sini maksudnya memang menggunakan dua bahasa (*bilingual*), tetapi pengajaran yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran.

B. Pendidikan Imersi dan Pendidikan Bilingual

Bahasa pengantar ialah bahasa yang digunakan dalam proses pembelajaran di suatu sistem persekolahan. Umumnya, negara-negara di dunia, menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Nasional sebagai bahasa pengantar. Indonesia, umpamanya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran.

Namun demikian, Wakhinuddin dalam suatu artikel yang dikelola oleh pusat data dan informasi pendidikan, Balitbang - Depdiknas, menyatakan bahwa ada juga negara yang tidak menggunakan bahasa nasional sebagai bahasa pengantar pendidikan. Belgia, umpamanya, menggunakan bahasa Perancis dan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan mereka. Ada sekolah yang menggunakan pendidik imersi, ada yang menggunakan pendidikan bilingual, dan ada juga yang menggunakan bahasa nasional saja.

1. Pendidikan Imersi

Pendidikan imersi diartikan sebagai suatu program pendidikan dimana bahasa kedua digunakan sebagai bahasa pengantar. Bahasa kedua di sini hanya berfungsi sebagai media, bukan merupakan isi dari pembelajaran. Myriam Met membagi pendidikan imersi menjadi imersi total (*total immersion*) dan semi imersi (*partial immersion*). Pada pendidikan imersi total, semua kegiatan persekolahan dilaksanakan dalam bahasa Inggris, termasuk materi *reading and language arts*. Sedangkan pada pendidikan semi imersi, sekitar 50% waktu dipakai untuk berbahasa Inggris, sisanya terserah kebijakan setempat. Mata pelajaran *reading and language arts* tetap menggunakan bahasa Inggris.

Pendidikan imersi adalah penggunaan bahasa kedua sebagai media instruksi terhadap anak-anak yang hanya mengetahui dan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa ibunya. Sally Rehorick, dari pusat pendidikan bahasa kedua, Universitas Brunswick, menyatakan bahwa Kanada adalah contoh negara yang memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Ada daerah yang mayoritas dihuni oleh masyarakat berbahasa Inggris dan ada daerah yang mayoritas dihuni oleh masyarakat berbahasa Prancis. Dan ada pula daerah yang menggunakan dua bahasa (bilingual).

Pendidikan imersi berbahasa Inggris atau bahasa Prancis di Prancis mempunyai tujuan jangka panjang, meliputi; 1) meningkatkan kemahiran berbahasa Inggris; 2) mengembangkan sikap positif terhadap penutur bahasa Inggris serta budayanya; 3) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang studi yang dituangkan dalam tujuan pembelajaran.

Sehubungan dengan penggunaan bahasa pengantar dalam pendidikan, ditemui ada sekolah di daerah yang mayoritas masyarakat pengguna bahasa Inggris, menggunakan bahasa Prancis. Sebaliknya, ada sekolah di daerah yang mayoritas masyarakatnya pengguna bahasa Prancis, menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran. Hal ini disebut dengan pendidikan imersi. Pendidikan imersi ini ditemukan di beberapa tempat di Kanada.

Kalau memperhatikan penjelasan ini, berarti penggunaan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah Indonesia dapat disebut pendidikan imersi, karena bahasa Indonesia adalah bahasa kedua bagi umumnya anak-anak Indonesia. Bahasa pertama anak-anak Indonesia adalah bahasa ibunya, seperti, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan lain sebagainya. Sedangkan bahasa Inggris bukanlah bahasa kedua, tetapi bahasa asing pertama dalam sistem persekolahan yang ada. Jadi penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah bukan termasuk ke dalam pendidikan imersi menurut penjelasan ini.

Namun, beberapa pendapat mengatakan bahwa penggunaan bahasa Inggris di sekolah-sekolah di Indonesia sebagai bahasa pengantar dapat disebut pendidikan imersi. Alasannya adalah bahwa di beberapa daerah, terutama daerah perkotaan, umumnya anak-anak telah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama (bahasa ibu). Umumnya, keluarga-keluarga di kota berkomunikasi dengan anaknya dalam bahasa Indonesia, walau dengan gaya bahasa dan pengucapan yang

kadang-kadang kedengaran lucu dan menggelikan. Ini berarti, bagi anak-anak dari keluarga ini, bahasa Inggris adalah bahasa kedua. Kalau bahasa Inggris digunakan dalam proses pembelajaran bagi anak-anak semacam ini, maka hal itu dapat dikatakan pendidikan imersi. Tulisan ini menyetujui penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah sebagai pendidikan imersi, dan salah satu definisi bahasa adalah kesepakatan antara pemakainya. Di Indonesia masyarakat menyetujui memaknai pendidikan imersi sebagai pendidikan yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Suatu terobosan baru yang dikeluarkan oleh Dirjen Peningkatan Mutu SMA saat ini adalah membina SMA-SMA terbaik yang sudah masuk ke dalam kategori sekolah mandiri menjadi sekolah bertaraf internasional. Ide ini sebenarnya adalah pelaksanaan dari pesan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab XIV tentang pengelolaan pendidikan, bagian kesatu bagian umum fasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 menyatakan bahwa pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Untuk merealisasikan amanat undang-undang itu, pada tahun ajaran 2005/2006, Dirjen Dikdasmen, melahirkan kebijakan untuk menetapkan 100 sekolah menengah atas (SMA) di seluruh wilayah Indonesia untuk dibina menjadi sekolah bertaraf internasinal. Pada tahun ajaran 2006/2007, keseratus sekolah tersebut telah diberi dana masing-masing Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk menjalankan program kegiatan sekolah untuk mencapai sekolah bertaraf internasional.

Apakah sekolah-sekolah terbaik yang ada sekarang sudah melaksanakan pendidikan imersi atau pendidikan bilingual? Pada kenyataannya, beberapa sekolah, bukan hanya sekolah-sekolah yang dibina di atas, tetapi juga sekolah yang atas inisiatif sendiri, telah menyelenggarakan pendidikan imersi, yang lain menggunakan pendidikan bilingual, dan sisanya menjalankan pendidikan seperti biasa dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

Beberapa sekolah di Indonesia saat ini telah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajarannya di kelas-kelas tertentu. Seperti yang sudah dibicarakan di atas, kelas yang menggunakan bahasa Inggris ini di Indonesia disebut dengan kelas imersi. Misalnya, Hardjanto, kepala Humas Disdiknas Provinsi Jateng, pada harian *Suara*

Pembaruan, terbitan 14 Desember 2004 menyatakan bahwa, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah melakukan beberapa terobosan dalam upaya mereka menggenjot kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Terobosan tersebut, antara lain dengan mengembangkan kelas imersi yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Program terobosan itu, sejak tahun 2004/2005 telah dilakukan di enam sekolah menengah atas dan enam sekolah menengah pertama di enam kabupaten/kota. Diharapkan pada akhir tahun 2007, semua kabupaten/kota di Jateng memiliki minimal satu sekolah yang menyelenggarakan kelas imersi. Di Solo, pemerintah menunjuk SMA Negeri 4 dan SMP Negeri 1 Surakarta sebagai penyelenggara kelas imersi. Menurut direktur program kelas imersi SMAN 4 Surakarta, Hardjono, pihaknya saat ini membuka dua kelas imersi, masing-masing menampung 24 siswa. Peserta program tersebut diseleksi secara ketat termasuk harus lulus tes lisan dan tulisan, serta memenuhi persyaratan nilai mata pelajaran matematika, fisika, biologi, minimal 7 di SMP-nya. Guru-guru yang ditugaskan di kelas imersi dipersiapkan selama dua tahun, baik dalam penguasaan bahasa Inggris maupun metode pengajaran lainnya di Universitas Negeri Semarang. Sementara mata pelajaran yang diajarkan di kelas imersi terdiri dari matematika, fisika, biologi, sejarah, geografi dan ekonomi.

Pendidikan imersi telah menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan kemampuan berbahasa Inggris peserta didik. Apa kunci keberhasilan pendidikan imersi? Myriam Met, dari *Montgomery County Public Schools*, mengemukakan bahwa keberhasilan pendidikan imersi ditandai dengan (1) dukungan administratif; (2) dukungan masyarakat dan orangtua; (3) guru yang *qualified*; (4) materi ajar yang cocok; (5) waktu yang tersedia untuk guru mempersiapkan materi pembelajaran; (6) peningkatan mutu staf yang berkelanjutan.

Apakah keunggulan pendidikan imersi? Myriam Met selanjutnya mengatakan bahwa pendidikan imersi, terutama imersi total, sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan bahasa peserta didik. Pengalaman yang intensif ditambah dengan ekspos yang tinggi terhadap bahasa yang dipakai membekali peserta didik dengan keterampilan berbahasa yang cukup untuk menghadapi materi di atas tingkat pendidikan dasar.

Pendidikan semi imersi, memerlukan lebih sedikit guru yang *qualified*. Satu guru bisa melayani dua kelas semi imersi, masing-masingnya separuh hari. Program ini merupakan alternatif yang lebih praktis bagi orangtua yang

merasa tidak enak dengan anaknya yang tidak diajar dengan bahasa Inggris. Ini adalah kelebihan dari pendidikan semi imersi.

Apakah SMA calon sekolah bertaraf internasional yang dibina oleh Dirjen Dikdasmen sudah mampu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar? Umumnya sekolah-sekolah yang dibina oleh Dirjen Dikdasmen belum dan memang mereka belum ditargetkan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Kalau ada di antara sekolah-sekolah tersebut yang membuka kelas imersi, itu bukanlah kebijakan pemerintah, tetapi adalah kemauan sekolah yang bersangkutan. Beberapa sekolah yang sudah mulai membuka kelas internasional tersebut adalah SMAN 1 Yogyakarta, SMAS Sutomo 1 Medan, dan beberapa SMA lainnya, tapi secara keseluruhan, jumlahnya sangat minim. Sekolah yang telah membuka kelas internasional itu, sebenarnya telah merintisnya sebelum masuk ke dalam calon sekolah bertaraf internasional.

Pada umumnya, sekolah yang telah menggunakan kelas imersi tersebut telah mempunyai sekolah mitra di luar negeri. Mereka telah berhasil mengembangkan kurikulum, materi ajar, dan evaluasi berdasarkan kerjasama tersebut. Hasilnya, beberapa lulusan mereka sudah diakui sama dengan lulusan dari sekolah mitra. SMA Negeri 1 Yogyakarta, misalnya, telah menggunakan bahasa Inggris dalam proses pembelajarannya karena telah menjalin kerja sama dengan *Cambridge University*. Saat ini, SMA 1 Yogyakarta, khusus kelas imersinya, telah memiliki kurikulum, materi ajar, dan alat evaluasi terhadap siswanya dalam bahasa Inggris sebagai hasil kerjasama tersebut. Pelaksanaan pembelajaran dipandu oleh sekolah mitra dan bahkan materi ujian beserta jadwal pelaksanaan ujian diatur oleh sekolah mitra.

Di Amerika Serikat, penggunaan bahasa Inggris bukan hanya diinginkan oleh warga Amerika yang notabene berbahasa Inggris, tetapi juga oleh kaum pendatang. Kaum pendatang menuntut penghapusan pendidikan bilingual. Tuntutan mereka bukan untuk mengunakan bahasa selain bahasa Inggris, tetapi menuntut agar anak-anak mereka hanya diajar dalam bahasa Inggris. Kampanye menentang pendidikan bilingual telah dilakukan di Amerika Serikat semenjak 1997 dan minta pendidikan bilingual dihentikan pada tahun 1998. Kampanye ini dipimpin oleh Ron Unz, seorang calon gubernur partai republik tahun 1994 dan juga seorang multimilioner. Kampanye anti bilingual ini dipicu oleh kenyataan bahwa pendidikan bilingual telah merendahkan mutu pendidikan warga pendatang.

2. Pendidikan Bilingual

Beberapa sekolah belum siap untuk menggunakan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi guru-guru untuk bisa membuka kelas imersi, antara lain; (a) memiliki tingkat pendidikan/kualifikasi minimal S1; (b) memiliki tingkat relevansi yang tinggi, dalam arti kemampuan yang dimiliki oleh guru sesuai dengan mata pelajaran yang diampu; (c) memiliki sertifikat profesi sebagai guru; (d) memiliki kesanggupan kerja yang tinggi; (e) mampu menggunakan ICT dalam mengajar; dan (f) mampu mengajar dalam bahasa Inggris secara efektif dan memiliki nilai TOEFL di atas 500.

Persyaratan poin (a) sampai dengan poin (d) biasanya tidak begitu mengalami permasalahan di lapangan, tetapi poin (e) dan (f) sering menjadi batu penarung yang harus dihadapi sekolah dalam melaksanakan pendidikan imersi. Khusus untuk kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan guru-guru non-bahasa Inggris untuk mengajar dalam bahasa Inggris sangat rendah, ditambah lagi dengan nilai TOEFL mereka yang kebanyakan di bawah 500.

Karena belum memungkinkan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, sekolah-sekolah, termasuk sebagian besar sekolah-sekolah yang dibina oleh Dirjen Dikdasmen, diminta untuk mulai menggunakan dua bahasa (bilingual) dalam proses pembelajarannya. Ini dimaksudkan agar para guru sudah mulai membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Inggris, walau masih dicampur dengan bahasa Indonesia atau sebaliknya. Pada tahun tertentu nanti, setiap sekolah diharapkan sudah mempunyai guru-guru yang mampu memahami materi yang dibinanya dan mampu menggunakan bahasa Inggris dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Saat ini, mereka sengaja belum memaksakan diri menggunakan bahasa Inggris, karena khawatir terjadi penurunan penguasaan konsep materi oleh peserta didik, disebabkan oleh penggunaan bahasa Inggris yang belum mantap oleh guru-guru. Kalau penggunaan bahasa Inggris harus dipaksakan, tentu sangat berbahaya bagi siswa yang akan melanjutkan studi ke tingkat berikutnya, apalagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena mereka belum memahami konsep materi pada jenjang yang lebih rendah. Untuk itu, memang sangat bijaksana untuk tidak menggunakan bahasa Inggris sampai saatnya nanti segala sesuatunya telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Pilihan penggunaan dua bahasa (*bilingual*) adalah pilihan yang cukup bijak.

Pada saat ini, beberapa sekolah, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi, yang merasa belum mampu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar (kelas imersi), menggunakan dua bahasa (bilingual) dalam proses pembelajarannya (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris). Harian umum *Suara Merdeka*, hari Senin, 11 Juli 2005, menulis bahwa SD Hj Isriati Baiturrahman Semarang, mulai tahun ajaran 2005/2006 telah menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran bagi siswa kelas I sampai dengan kelas VI. Pada tahap awal, penggunaan dwibahasa itu dibatasi pada mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan. Dalam pelaksanaan tahap awal, guru menggunakan bahasa campuran dulu, baik dalam bahasa pengantar maupun percakapan. Baru kemudian sampai ke soal-soal yang memakai bahasa Inggris.

3. Masalah Pendidikan Imersi

Pelaksanaan pendidikan imersi di Indonesia memang masih rentan terhadap berbagai masalah. Di antara yang menonjol adalah pemaksaan kehendak oleh pimpinan sekolah untuk melaksanakan pendidikan imersi, sementara komponen utama, seperti guru, siswa, dan materi ajar, belum terpenuhi. Ini dilakukan karena ingin menarik perhatian masyarakat dengan tujuan tertentu. Hal ini menyebabkan pemunduran dalam pemahaman konsep mata pelajaran oleh siswa yang pada akhirnya menyebabkan hasil belajar siswa menurun.

Hal ini tentu sangat tidak diharapkan terjadi, karena berlawanan dengan tujuan yang diinginkan. Salah satu tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan pendidikan sekolah bertaraf internasional adalah menguasai materi pelajaran yang ditunjukkan dengan kelulusan ujian nasional dan ujian sertifikat international untuk mata pelajaran wajib. Pelaksanaan pendidikan imersi yang dipaksakan, penguasaan materi pelajaran menjadi menurun dan penguasaan bahasa Inggris belum tentu juga meningkat karena guru belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjelaskan pelajaran dalam bahasa Inggris.

Frida Dwiyanti, dalam *Pendidikan Network*, tanggal 20 Oktober, mengemukakan bahwa seharusnya standar pendidikan internasional tidak dimaknai sekadar hanya menggunakan bahasa Inggris seperti saat ini terjadi. Pendidikan internasional, di samping menggunakan bahasa Inggris, harus diarahkan untuk menjadikan peserta didik mampu terbuka dan berjiwa internasional karena nantinya mereka akan menjadi manusia yang berwarga negara internasional atau istilahnya sebagai *global citizen*.

Dalam pendidikan internasional, kurikulum yang diterapkan sebaiknya tentu kurikulum internasional. Kalau yang dipakai adalah kurikulum nasional, maka di dalamnya harus disisipkan pendidikan untuk berinternasional. Artinya, peserta didik dibekali dengan materi pendidikan untuk hidup dalam suasana damai di dunia, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, diberikan makna perdamaian internasional, dan arah kehidupan yang lebih baik. Bentuk pendidikan semacam ini tentu bukan hanya dalam bentuk teori, namun harus diterapkan secara nyata.

Pendidikan imersi total tergolong pendidikan biaya tinggi. Untuk itu, pendidikan imersi total sebenarnya bukanlah pendidikan untuk semua karena tidak terjangkau oleh kantong semua lapisan masyarakat. Pendidikan imersi total menghendaki guru yang cukup untuk setiap kelas imersi. Guru-guru untuk kelas imersi ini bukan hanya sulit mendapatkannya, tapi bisa terjadi penempatan guru yang salah karena umumnya sekolah belum mempunyai guru imersi yang *qualified* dalam jumlah yang memadai.

Di lain pihak, pendidikan semi imersi juga mempunyai kelemahan. Pendidikan ini tidak seefektif pendidikan imersi total dalam meningkatkan kemampuan berbahasa siswa. Siswa tidak bisa mengembangkan kemahiran berbahasa seperti pada program imersi total. Siswa mungkin mempunyai masalah dalam mata pelajaran yang menggunakan abstraksi verbal. Dalam jangka panjang, pendidikan semi imersi tidak menghasilkan kemajuan berbahasa Inggris yang lebih baik dari pendidikan imersi total.

4. Masalah Pendidikan Bilingual

Setiono Sugiharto, kontributor *The Jakarta Post*, tanggal 1 Oktober 2006 menyatakan bahwa masyarakat memang sudah mengetahui adanya pendidikan bilingual di jalur pendidikan formal di Indonesia. Tetapi, mereka tidak tahu apa pendidikan bilingual itu, apa tujuannya, bagaimana pelaksanaannya, berapa keefektifannya, dan lain sebagainya. Menurut Setiono, para pelaksana pendidikan bilingual tidak memahami konsep pendidikan bilingual itu sendiri. Sehingga kalau ada yang meminta penjelasan, mereka tidak dapat menjelaskannya karena bagi mereka sendiri memang belum begitu jelas.

Hal di atas bukanlah hal yang berlebihan, menurut Setiono. Bahkan Stephen Krashen, seorang tokoh pendidikan bilingual, melaporkan bahwa pendidikan bilingual telah mengalamai pasang surut di beberapa negara bagian di Amerika

Serikat dan mulai menghilang di negara-negara bagian lainnya. Tambah lagi keberhasilan pendidikan bilingual masih dalam tanda tanya. Ini adalah masalah yang serius dalam pelaksanaan pendidikan bilingual.

C. Alternatif Pemecahan Masalah

Beberapa masalah yang muncul dalam pelaksanan pendidikan saat ini adalah ambisi yang terlalu tinggi dari pimpinan sekolah untuk membuka sekolah dengan label sekolah internasional yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran. Kenyataan menunjukkan bahwa, banyak sekolah yang secara persyaratan belum mungkin untuk membuka kelas yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, tapi masih memaksakan pelaksanaannya karena alasan yang sangat sederhana yaitu para orang tua dan masyarakat sudah terlanjur diberitahu. Untuk itu, sekolah seharusnya secara matang mempersiapkan diri terlebih dahulu dari pada gagal dalam pelaksanaannya. Prinsip *"kalau tidak sekarang kapan lagi"* tidak tepat digunakan dalam bidang pendidikan yang dalam keadaan seperti itu, karena dampaknya bukan hanya pada sekolah terutama sekali pada peserta didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa umumnya. Mungkin prinsip *"biarlah mundur satu langkah untuk maju seribu langkah"* sangat cocok dalam permasalahan ini. Program persiapan yang matang adalah langkah yang sangat bijak dalam menyongsong pendidikan imersi atau bilingual yang melekat pada pendidikan internasional.

D. Penutup

1. Simpulan

Pendidikan imersi di Indonesia adalah pendidikan yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam sistem persekolahan atau dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Pelaksanaan pendidikan imersi diyakini dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris peserta didik dengan cepat. Di samping itu, pelaksanaan pendidikan imersi juga dapat meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diajarkan.

Pelaksanaan pendidikan imersi menuntut kesiapan yang matang dari guru untuk mampu menjelaskan materi bidang studi dalam bahasa Inggris dan kesiapan siswa menerima pelajaran dalam bahasa Inggris. Sistem ini telah diberlakukan pada sekolah-sekolah tertentu pada semua jenjang pendidikan.

Karena sistem ini tergolong baru di Indonesia, belum ada penelitian yang mendalam tentang keefektifan pendidikan ini. Namun kenyataannya, para orang tua sangat menginginkan anak-anaknya bisa masuk ke kelas yang menggunakan pendidikan imersi.

Sekolah yang belum merasa mampu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, mulai menggunakan dua bahasa (bilingual) yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Umumnya sekolah bertaraf internasional yang dibina oleh Dirjen Dikdasmen, telah mulai menggunakan pendidikan bilingual dalam proses pembelajarannya. Namun diharapkan pada saatnya nanti, sekolah-sekolah tersebut diharapkan mampu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

2. Saran

Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk mengajarkan materi bidang studi bukanlah hal yang mudah. Persiapan yang matang sangat diperlukan, mulai dari guru, siswa, materi, serta sarana dan prasarana lainnya. Pimpinan sekolah atau lembaga diharapkan tidak memaksakan diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar kalau sekolah memang belum siap. Ini akan berdampak buruk pada mutu peserta didik. Pimpinan sekolah diharapkan agar mampu menahan diri dulu sampai sekolah dengan segala perangkatnya sudah benar-benar siap.

Penggunaan pengajaran dengan menggunakan dua bahasa (bilingual) merupakan alternatif terbaik sampai saat ini untuk menyiapkan sekolah menuju sekolah imersi. Pada pendidikan bilingual, pelaksanaan pembelajaran tidak hanya diberikan dalam bahasa Inggris, tetapi masih ada yang dalam bahasa Indonesia. Ini dimaksudkan agar konsep-konsep penting dari suatu mata pelajaran dapat dikuasai peserta didik dengan baik.

Daftar Pustaka

Paulston, Christina Bratt. SD Hj Isriati Gunakan Pengajaran Bilingual. *Suara Merdeka*, Senin, 11 Juli 2005.

Departemen Pendidikan Nasional. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta. 2003.

Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikdasmen Depdiknas. *Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan dan Investasi Sekolah (School Development and Investment Plan – SDIP).* Jakarta: Pengembangan Inovasi Pembinaan SMA. 2005.

Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikdasmen Depdiknas. *Panduan Workshop Review SDIP.* Jakarta: PUMK Pengembangan Inovasi Pembinaan SMA. 2006.

Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikdasmen Depdiknas. *Pedoman Tugas Fasilitator School Development and Investment Plan – SDIP.* Jakarta: Pengembangan Inovasi Pembinaan SMA. 2006.

Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikdasmen Depdiknas. *Panduan Review SDIP Workshop Fasilitator SNBI.* Jakarta: Pengembangan Inovasi Pembinaan SMA. 2006.

Dwiyanti, Frida. http://artikel.us/. Koordinator PYP sekolah Ciputra. *'Pendidikan Internasional', Bagaimanakah Maknanya?* Pendidikan Network. 20 Oktober 2004.

Foreman, Judy. Health Sense: The Evidence Speaks Well of Bilingualism's Effect on Kids. *The Los Angeles Times*. California. 2002.

Http://www.humet.ucla.edu/humnet/linguistics/people/grads/macswan/unz.htm#editorial. *Issues in U.S. Language Policy*. 1997.

Diknas Jateng Kembangkan Program Pendidikan Kelas Imersi. *Suara Pembaruan.* 14 Desember 2004.

Met, Myriam. Foreign Language Immersion Programs. What Is a Foreign Language Immersion Program? USA: Montgomery County Public Schools Rehorick, Sally. *The Critical Role of the Educational System in Creating Bilingual Citizens: New Brunswick as a Microcosm of Canada.* Ottawa: Second Language Education Centre, University of New Brunswick. 2003.

Rusyana, Yus. *Perihal Kedwibahasaan (Bilingualisme)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. 1988.

Foreman, Judy. Health Sense: The Evidence Speaks Well of Bilingualism's Effect on Kids. *The Los Angeles Times*. California. 2002.

Sugiharto, Setiono. *National-plus school - misconceptions about bilingual education*. Jakarta: The Jakarta Post. October 01, 2006.

Wakhinuddin. *Pembentukan Peradaban Bangsa melalui Pengajran Multi-Etnik dalam Era Reformasi*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang – Depdiknas.

Kebijakan Pembelajaran Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi sebagai Mata Kuliah Umum

Oleh:
Sam Mukhtar Chaniago
(Universitas Negeri Jakarta)

A. Pendahuluan

Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan berbagai suku bangsa. Perbedaan letak georafis dan perbedaan suku bangsa tersebut secara logis mengakibatkan pula terjadinya perbedaan budaya dan adat istiadat termasuk di dalamnya perbedaan bahasa. Perbedaan-perbedaan yang ada tersebut telah menjadi sebuah keniscayaan. Kondisi itu membuat negeri ini memiliki lebih dari 150 suku bangsa dengan lebih 700 bahasa lokalnya. Dengan kata lain, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mendiami negara yang memiliki banyak budaya atau multibudaya dan banyak bahasa atau multibahasa.

Negara Indonesia yang multibudaya dan multibahasa tersebut memerlukan alat komunikasi yang dapat dipahami oleh seluruh komponen bangsa, yaitu adanya satu bahasa yang juga dapat dijadikan sebagai lambang negara sekaligus sebagai pemersatu bangsa. Berdasarkan berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini, bangsa Indonesia menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal ini tercantum secara jelas dalam ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi "*kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng tinggi bahasa persatoean, bahasa Indonesia*" dan dalam UUD'45 pasal 36 menyatakan bahwa "*bahasa negara ialah bahasa Indonesia*". Dari dua dokumen resmi tersebut, tersurat secara jelas bahwa Sumpah Pemuda menegaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sedangkan pasal 36 UUD'45 menegaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara.

Demikian pula halnya, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam seminar politik bahasa nasional menyatakan bahwa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai; (1) lambang kebanggaan nasional; (2) lambang identitas nasional; (3) alat pemersatu masyarakat yang berbeda latar budayanya; dan (4) alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah.

Terkait dengan kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: (1) bahasa resmi kenegaraan; (2) bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan; (3) bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; (4) bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional dan pemanfaatan IPTEK.[1]

Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara di atas, secara langsung menegaskan bahwa bahasa Indonesia akan mengikat seluruh komponen bangsa ini untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Hal ini akan membuat seluruh masyarakat termasuk juga mahasiswa harus memakai bahasa Indonesia dalam menjalankan fungsi kebahasaannya, karena dunia kemahasiswaan merupakan cermin dari keragaman bangsa Indonesia yang membutuhkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Mengingat hal itu, tentunya bahasa Indonesia di dunia kemahasiswaan yang berada dalam dunia perguruan tinggi sangat membutuhkan bahasa Indonesia dalam pergaulan ilmiahnya.

Di samping itu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan dan bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional dan pemanfaatan IPTEK, merupakan fungsi bahasa Indonesia yang utama dalam mendorong perlunya pemelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Dalam konteks ini, dapat dikatakan, bahwa pemakaian bahasa Indonesia di perguruan tinggi menjadi sebuah keharusan. Bahasa Indonesia menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh para mahasiswa dalam melakukan interaksi keilmuannya dengan civitas akademika di lingkungan kampusnya, maupun berinteraksi dengan para intelektual muda lainnya di luar kampusnya.

Dengan adanya gambaran tentang kebutuhan mahasiswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi, maka pemerintah dalam hal ini direpresentasikan oleh Depdiknas, dapat membuat rancangan konkret

---

[1] Lamuddin Finoza, *Komposisi Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Diksi Insan Mulia, 2001), hlm 3 – 4.

guna membantu memenuhi kebutuhan mahasiswa. Kajian berikut bermanfaat bagi pengajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi untuk dapat berupaya semaksimal mungkin membantu memenuhi kebutuhan mahasiswa dengan berbagai tindakan kreatif.

Terpenuhinya kebutuhan mahasiswa dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi diharapkan berujung pada penguasaan bahasa Indonesia mahasiswa menjadi lebih optimal. Pengoptimalan penguasaan mahasiswa terhadap bahasa Indonesia sangat diperlukan karena mahasiswa calon pemimpin bangsa. Jika pemimpin bangsa di kemudian hari mencontohkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka tugas pusat bahasa sebagai penjaga amanat UUD '45 dan pemelihara bahasa sangat terbantu.

B. Hakikat Teori Belajar Bahasa

Setiap manusia selalu berkeinginan untuk menjalin hubungan dengan manusia lain di luar dirinya. Karena, hal ini merupakan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Dalam menjalin hubungan tersebut, bahasa memiliki peranan yang sangat penting. Bahasa tidak terpisahkan dari manusia dan mengikuti dirinya di dalam setiap kegiatannya. Mulai dari bangun pagi hingga jauh malam ketika ia beristirahat, manusia tidak lepas dari pemakaian bahasa, bahkan pada waktu tidur pun tidak jarang ia *"memakai bahasanya"*. Pada waktu manusia tampak tidak berbicara, pada hakikatnya ia masih juga memakai bahasa. Samsuri (1994) mengatakan bahwa bahasa dalam hal ini merupakan alat yang digunakan untuk membentuk pikiran dan perasaannya, keinginan dan perbuatan, memengaruhi dan dipengaruhi bahkan dasar dari suatu masyarakat manusia adalah bahasa itu sendiri.[2] Beliau juga mengatakan, bahwa bahasa adalah tanda yang jelas dari kepribadian yang baik maupun yang buruk; tanda yang jelas dari keluarga dan bangsa; tanda yang jelas dari budi pekerti.[3]

Bahasa merupakan salah satu kemampuan manusia yang terpenting yang menjadikan mereka unggul atas makhluk Allah yang lainnya, bahkan bahasa juga merupakan media utama dalam berkomunikasi. Dengan bahasa, manusia dapat mengemukakan pikiran, ide-ide, perasaan, keinginan, dan lain-lain. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Keraf (1997), bahwa bahasa

---

[2] Samsuri, *Analisis Bahasa*, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 3-4.

[3] *Ibid.*,

merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia.[4]

Anderson dalam Tarigan (1990) bahkan mengemukakan adanya delapan prinsip dasar hakikat bahasa, yaitu: (1) bahasa adalah suatu sistem, (2) bahasa adalah vokal, (3) bahasa tersusun dari lambang-lambang mana suka (*arbitrary symbols*), (4) setiap bahasa bersifat unik, (5) bahasa dibangun dari kebiasaan-kebiasaan, (6) bahasa adalah alat komunikasi, (7) bahasa berhubungan erat dengan tempatnya berada, (8) bahasa itu berubah-ubah.[5] Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan Brown juga dalam Tarigan (1990) yang apabila dilihat banyak sekali persamaan pandangan dan gagasan mengenai bahasa itu, walaupun dengan kata-kata yang sedikit berbeda.

Berikut ini merupakan hakikat bahasa menurut pendapat Brown, yang juga dikutip dari Tarigan (1990).

1. Bahasa adalah suatu sistem yang sistematis, barang kali juga untuk sistem generatif.
2. Bahasa adalah seperangkat lambang-lambang manasuka atau simbol-simbol arbitrer.
3. Lambang-lambang tersebut terutama sekali bersifat vokal, tetapi mungkin juga bersifat visual.
4. Lambang-lambang itu mengandung makna konvensional.
5. Bahasa tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi.
6. Bahasa itu beroperasi dalam suatu masyarakat bahasa (*a speech community*) atau budaya.
7. Bahasa tersebut pada hakikatnya bersifat kemanusiaan, walaupun mungkin tidak terbatas pada manusia saja.
8. Bahasa itu diperoleh semua orang/bangsa dengan cara yang hampir/banyak persamaan; bahasa dan belajar bahasa mempunyai ciri-ciri kesemestaan (*universal characteristics*).[6]

Merupakan suatu kenyataan apabila manusia mempergunakan bahasa sebagai sarana komunikasi vital dalam hidup ini. Bahasa adalah milik manusia. Bahasa merupakan ciri pembeda utama kita umat manusia dengan makhluk hidup lainnya di dunia ini.

---

[4] Gorys Keraf, *Komposisi*, (Ende: Nusa Indah, 1997), hlm. 1.

[5] H. Guntur Tarigan, *Pengajaran Pragmatik*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 2-3.

[6] *Ibid.*, hlm. 4.

Setiap anggota masyarakat selalu terlibat dalam suatu komunikasi, karena bahasa mempunyai fungsi yang sangat penting bagi manusia terutama sekali fungsi komunikatif. Berikut ini merupakan pendapat Halliday berkaitan dengan fungsi bahasa. Bahasa memiliki fungsi, antara lain sebagai berikut.

1. Fungsi instrumental (*the instrumental function*); melayani pengelolaan lingkungan, menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi.
2. Fungsi regulasi (*the regulatory function*); bertindak untuk mengawasi serta mengendalikan peristiwa-peristiwa.
3. Fungsi representasional (*the representational function*) adalah penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan menyampaikan fakta dan pengetahuan.
4. Fungsi interaksional (*the interactional function*); bertugas untuk menjamin serta memantapkan ketahanan dan kelangsungan komunikasi sosial.
5. Fungsi personal (*the personal function*); memberi kesempatan kepada seorang pembicara untuk mengekspresikan perasaan, emosi, pribadi, serta reaksi-reaksi yang mendalam.
6. Fungsi heuristik (*the heuristic function*); melibatkan penggunaan bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan, mempelajari seluk-beluk lingkungan. Fungsi heuristik seringkali disampaikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang menuntut jawaban. Secara khusus, anak-anak mendapatkan penggunaan fungsi ini dalam aneka pertanyaan "*mengapa*?" yang tidak putus-putusnya mengenai dunia sekeliling alam sekitar mereka.
7. Fungsi imajinatif (*the imaginative function*); melayani penciptaan sistem-sistem atau gagasan-gagasan yang bersifat imajinatif.[7]

Belajar pada hakikatnya merupakan upaya sadar untuk memperoleh seperangkat pengetahuan (Wingkel), sedangkan bahasa menurut Keraf (1983) adalah sistem bunyi bahasa yang keluar dari alat ucap manusia untuk berkomunikasi antarpenduduk. Jadi, pada prinsipnya belajar bahasa merupakan upaya sadar untuk memperoleh seperangkat pengetahuan tentang sistem bunyi bahasa yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia untuk berkomunikasi antarpenduduk.

Sementara itu, fungsi bahasa menurut Bromley terdiri dari 5 bagian berikut.

---

[7] M.A.K Halliday dan Ruqaiya Hasan, *Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-Aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), hlm.22.

1. Bahasa mampu mengidentifikasi kemauan dan kebutuhan.
2. Bahasa mampu mengubah dan mengontrol tingkah laku.
3. Bahasa mampu mempermudah pengembangan kognitif manusia.
4. Bahasa memberikan kemungkinan kepada manusia untuk berinteraksi secara penuh dengan sesamanya.
5. Bahasa mampu mengekspresikan keunikan pribadi manusia.[8]

Mendapatkan pengetahuan tentang bahasa, secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu *pertama* perolehan alamiah ketika kanak-kanak yang disebut dengan perolehan berbahasa (biasanya "bahasa ibu") dan *kedua*, pembelajaran bahasa ketika anak mulai belajar bahasa kedua atau ketiga, termasuk pembelajaran bahasa ketika telah dewasa. Terdapat perbedaan yang esensial antara kedua bentuk penguasaan bahasa tersebut. Perhatikan tabel yang dibuat oleh Sapani, dan kawan-kawan[9] berikut ini.

No.	Pemerolehan Bahasa	Pembelajaran Bahasa
1.	Informal	Formal
2.	Spontan, bawah sadar	Disengaja, sadar
3.	Alamiah	Artifisial (buatan)
4.	Tanpa guru	Ada guru
5.	Mitra berkomunikasinya keluarga, kenalan	Mitra berkomunikasinya guru, pelatih, pembelajar
6.	Melalui pergaulan (interaksi pergaulan)	Melalui pendidikan (interaksi edukatif)
7.	Bahasa lisan	Bahasa lisan dan tulisan

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas, betapa perbedaan kedua konsep itu menunjukkan bahwa yang kita gunakan dalam kesempatan ini ialah konsep pembelajaran bahasa, bukan pemerolehan bahasa. Pembelajaran bahasa yang terkait dengan dunia kemahasiswaan merupakan proses belajar yang tujuan-tujuannya disadari oleh kedua belah pihak, dalam hal ini, mahasiswa dan guru/dosen. Dalam proses pembelajarannya, dibutuhkan mitra atau *patner* pembelajar, dalam hal ini yaitu dosen. Aspek kemampuan yang dikembangkan yaitu keterampilan berbahasa lisan (berbicara dan menyimak) dan aspek keterampilan tulisan (menulis dan membaca). Pada

---

8 Karen D'Angelo Bromley,. *Language Arts: Exploring Connection*. (Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc. 1988), hlm. 19-21.

9 Suardi Sapani, Yeti Mulyati, Nunny Sulistiany Idris. 1997/1998. *Teori Pembelajaran Bahasa*. Jakarta: Bagian Proyek Penataran Guru SLTP Setara D-III, Depdikbud. hlm. 10.

umumnya, dunia kemahasiswaan mendapatkan pembelajaran berbahasa hanya pada aspek tulisan, itupun hanya keterampilan menulis. Aspek keterampilan membaca kurang digarap. Apalagi, aspek keterampilan lisan yaitu berbicara dan menyimak, sama sekali tidak pernah disentuh.

Belajar bahasa menurut beberapa pakar yang dikutip oleh Parera, sebaiknya memang dimulai ketika masih kecil, yaitu umur 2 sampai dengan 5 tahun. Akan tetapi, telah dewasa pun bukan berarti tidak baik belajar bahasa kedua, hanya saja tingkat efektivitas dan sensitivitasnya sudah berkurang.

Bahasa akan sangat mudah dipelajari oleh si pembelajar (mahasiswa), apabila:

1. nyata dan alamiah,
2. utuh,
3. masuk akal,
4. menarik (fungsi rekreasi),
5. relevan dengan kehidupan pembelajar,
6. milik pembelajar,
7. merupakan bagian peristiwa nyata,
8. memiliki fungsi (sosial/akademik),
9. memberi makna kepada pembelajar,
10. penggunaannya sesuai pilihan pembelajar,
11. dapat dikuasai pembelajar, dan
12. pembelajar memiliki kemampuan untuk menggunakannya.

Bahasa akan sangat sulit dipelajari oleh pembelajar (mahasiswa), apabila:

1. artifisial,
2. terpotong-potong,
3. tidak masuk akal,
4. membosankan,
5. tidak relevan,
6. milik orang lain,
7. berada di luar konteks,
8. tidak memiliki fungsi (sosial/akademik),
9. tidak memberi makna,
10. penggunaannya dipaksakan oleh orang lain,

11. tidak dapat dikuasai oleh pembelajar, dan
12. pembelajar tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya.

Teori belajar bahasa juga memberikan sumbangan yang khusus bagi prinsip-prinsip pengajaran bahasa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sapani dan kawan-kawan,[10] yaitu sebagai berikut.

a. Prinsip belajar melalui latihan-latihan (*learning by training*).
b. Prinsip pemecahan masalah (*problem solving*).
c. Prinsip pemberian ganjaran/penguatan (*reinforcement*).
d. Prinsip mahasiswa belajar lebih penting dari dosen mengajar.
e. Prinsip "dari yang diketahui ke yang belum diketahui".
f. Prinsip "pemahaman dulu baru penggunaan".

Dari prinsip-prinsip di atas, dapat dikatakan seluruhnya berpihak pada kepentingan mahasiswa sebagai pembelajar, dengan menunjukkan betapa kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa menjadi lebih bermanfaat dari sekadar yang dilakukan dosen saat mengajar. Dosen, dalam hal ini, berperan serta hanya sebagai fasilitator, pembimbing, motivator, pelatih, atau pengarah.

Untuk dapat mempelajari suatu bahasa dengan baik, mahasiswa hendaknya mengikuti kondisi, sebagaimana yang diuraikan oleh Cambourne (1988, dalam Chaniago)[11], yaitu sebagai berikut.

a. *Immersion:* membaur dengan lingkungan.
b. *Demonstration*: mendapat contoh atau model dan dapat menunjukkan kemampuannya.
c. *Expectation*: mempunyai harapan untuk menggunakan bahasa secara efektif
d. *Responsibility*: bertanggung jawab dalam mengembangkan kemampuannya
e. *Approximation*: melakukan perkiraan dalam mendekati bahasa yang belum dikenal.
f. *Employment*: memanfaatkan kesempatan untuk terus belajar bahasa.
g. *Enggement*: dilibatkan dalam belajar bahasa dan mau terus bereksperimen.
h. *Feedback*: menerima unpan balik dengan baik.

---

[10] Suardi Sapani, Yeti Mulyati, Nunny Sulistiany Idris. *Op.Cit.*, hlm. 16 – 17.

[11] Sam Mukhtar Chaniago. 1994. "Pengajaran Bahasa di Victoria, Australia": *Makalah Laporan Kunjungan*, Jakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia/Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Jakarta. hlm. 20 – 21.

Kondisi di atas merupakan prasyarat yang diminta kepada pembelajar bahasa. Jika kondisi tersebut dilakukan atau dipenuhi dengan baik oleh seseorang, maka akan terdapat kemungkinan yang bersangkutan akan memiliki kemampuan atau keterampilan berbahasa dengan baik. Aktivitas pembelajar yang mencoba menggunakan dan juga memanfaatkan dengan baik kondisi tersebut, akan menunjukkan bahwa CBMA (cara belajar mahasiswa aktif) sangat berpengaruh pada keberhasilan yang dicapai. Hanya mahasiswa yang aktif dalam belajarlah yang membuka peluang untuk dapat mempelajari sesuatu materi ajar. Mahasiswa yang kurang aktif hanya akan mendapatkan hasil belajar minimal (HBM).

C. Bahasa Indonesia sebagai Alat Komunikasi

Bahasa Indonesia merupakan sebuah anugrah Tuhan yang sangat besar terhadap bangsa Indonesia. Bahasa ini lahir jauh sebelum bangsa ini benar-benar menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Kata *Merdeka* dengan segala aspek semantiknya, pada waktu bahasa ini diikrarkan tahun 1928 merupakan sebuah angan-angan, cita-cita, keinginan, harapan, doa dari para pendiri negara ini. Ketika bahasa dengan nama Indonesia ini muncul menjadi sebuah wacana dalam Kongres Pemuda I dan II, mendapat sambutan yang positif dari seluruh peserta kongres. Dari seluruh peserta kongres, Bapak Soenarjo, salah seorang peserta rapat yang juga menjadi sekretaris persidangan, mengatakan bahwa hanya ada dua utusan, yaitu, utusan dari putri pasundan dan utusan dari wilayah sunda kecil (NTB dan NTT sekarang) yang dalam pandangannya tidak menggunakan bahasa melayu. Terpaksa mereka itu melakukan menerjemahan dalam berkomunikasi selama kongres (wawancara peneliti sekitar tahun 80-an).

Mengapa peserta kongres pemuda saat itu, menerima secara aklamasi keputusan ketiga dari isi sumpah pemuda tersebut? Apakah tidak terjadi perdebatan yang sengit atau bahkan terjadi sebuah pertikaian yang besar yang diikuti oleh baku-hantam antarpeserta kongres ketika bahasa melayu diangkat derajatnya menjadi bahasa Indonesia? Mengapa bukan bahasa Jawa yang hampir dipakai oleh 65% dari jumlah penduduk nusantara saat itu, yang diangkat menjadi Bahasa Indonesia? Juga, mengapa bukan bahasa Belanda yang dijadikan sebagai bahasa kebangsaan? Ternyata, banyak sekali pertanyaan yang muncul menyangkut mulusnya kongres pemuda pada saat itu dalam memutuskan ikrar ketiga dari sumpah pemuda.

Menurut Bapak Soenarjo, salah seorang saksi mata pada saat itu, menjelaskan bahwa pada saat itu suasana batin para pendiri bangsa ini diliputi oleh perasaan nasionalisme yang begitu tinggi. Semangat kebangsaan yang mewarnai kehidupan mereka meluruhkan rasa lokalitas kedaerahan saat itu. Keinginan yang besar untuk membentuk *nation* dengan ideologi Indonesia menjadi obsesi semua pihak. Sehingga ketika muncul wacana pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa yang dijunjung tinggi untuk dijadikan bahasa Indonesia, langsung disambut secara positif oleh seluruh peserta kongres. Jadi, *spirit* kebangsaan pada saat itu, membuat semua pihak atau seluruh komponen organisasi kepemudaan secara bulat dan mufakat penuh berkeyakinan, bahasa Melayu yang kemudian diberi nama bahasa Indonesia, memiliki kekuatan pemersatu cita-cita besar mereka.

Selain itu, terdapat pula penjelasan dari salah seorang peserta sidang dan juga salah seorang pembicara yang berasal dari perkumpulan Pemuda Java '*Jong Java*', yaitu Sitti Soendari (1981) pernah mengatakan seperti berikut.

Sebeloem kami memoelai membitjarakan ini, patoetlah rasanya kalau kami terangkan lebih dahoeloe, mengapa kami tidak memakai bahasa Belanda atau bahasa Djawa: Boekan sekali-kali karena kami hendak merendahkan-rendahkan bahasa ini, atau hendak mengoerang-ngoerangkan harganya. Itoe sekali-kali tidak. Tetapi barang siapa diantara toean yang mengoenjoengi kerapat pemoeda di kota Djacatra (Betawi), jang diadakan dalam beberapa bulan jang laloe atau setelah membatja poetoesan kerapatan yang terseboet, tentoe masih mengingat akan hasilnya, jaitoe hendak berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia, hendak bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia, dan hendak mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia. Oleh karena jang terseboet inilah maka kami, sebagai poetry Indonesia jang lahir dipoelau Djawa jang indah ini, berani memakai bahasa Indonesia dimoeka ra'jat kita ini. Boekankah kerapatan kita kerapatan Indonesia, ditimboelkan oleh poetri Indonesia dan dioentoekkan bagi seloeroeh kaoem istri dan poetry Indonesia, beserta tanah toempah darah dan bangsanya.

(disampaikan oleh Richard Chauwe, dalam seminar Internasional di Univ. Sumatera Utara, 23 April 2005).

Hal di atas disampaikan oleh Ibu Sitti Soendari dua bulan setelah kongres pemuda, atau pada saat kongres perempuan. Ibu Sitti Soendari sendiri pada saat kongres tersebut, yaitu ketika beliau berbicara dengan para peserta kongres pemuda tersebut menggunakan bahasa Belanda, karena katanya dia tidak bisa berbahasa Indonesia (Melayu).

D. Pembelajaran Bahasa Indonesia sebagai Mata Kuliah Umum di Perguruan Tinggi

Mendapatkan pengetahuan tentang bahasa Indonesia di perguruan tinggi merupakan proses pembelajaran bahasa bukan pemerolehan bahasa. Hal ini dikarenakan yang mendapatkan pengetahuan tentang bahasa Indonesia itu adalah mahasiswa yang telah dewasa (rata-rata di atas umur 18 tahun).

Pembelajaran bahasa di perguruan tinggi pada umumnya merupakan pembelajaran bahasa kedua atau ketiga bagi mahasiswa. Oleh karena itu, teori pembelajaran yang digunakan adalah teori pembelajaran bahasa kedua. Khusus untuk pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi, dapat dikatakan merupakan pembelajaran bahasa kedua, terutama bagi mahasiswa yang lebih dahulu mengenal bahasa pertamanya (bahasa ibu) atau bahasa daerahnya. Pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi bisa juga menjadi pembelajaran bahasa pertama, kalau bahasa ibunya bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah.

Pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi dilatarbelakangi oleh pemikiran tentang perlunya bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa (terdapat pada teks Sumpah Pemuda 1928) sebagai cikal bakal penegasan bahwa bahasa Indonesia bagi warga negara Indonesia merupakan ciri kepribadian, prilaku, dan budi pekerti sebagai satu bangsa. Kesadaran ini kemudian dikukuhkan secara resmi dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selain itu, penjelasan bahasa Indonesia di perguruan tinggi dimaksudkan sebagai sarana komunikasi ilmiah bagi mahasiswa dan alumni perguruan tinggi [12]

Pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi juga dimaksudkan untuk membekali mahasiswa sebagai seorang sarjana dalam bidang mereka masing-masing. Sebagai seorang yang ahli di bidangnya, mereka dituntut

---

[12] Perhatikan juga Wijono HS dan Sintowati Rini Utami, 2003. *Bahasa Indonesia Materi Ajar Mata Kuliah Pengembang Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Jurusan MKU UNJ, hlm. 2.

untuk dapat menunjukkan keahliannya. Hal itu dapat dilakukan dengan cara, antara lain, menyampaikan ilmu tersebut secara lisan atau secara tulisan. Keduanya dapat dilakukan dengan baik jika mahasiswa menguasai alat untuk menyampaikannya, yaitu bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia.

Kebutuhan manusia secara umum dapat dibedakan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok dalam suatu aktivitas. Kebutuhan tersebut harus terpenuhi, karena merupakan kebutuhan dasar (*basic need*). Suatu kegiatan tidak akan terlaksana tanpa terpenuhinya kebutuhan dasar ini. Kebutuahan sekunder adalah kebutuhan kedua yang mendukung secara langsung proses suatu kegiatan. Kebutuhan ini perlu dipenuhi agar kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan penunjang. Kebutuhan ini secara tidak langsung menunjang proses suatu kegiatan. Pemenuhan kebutuhan sekunder ini akan berdampak pada pengoptimalan hasil yang diperoleh dari satu kegiatan.

Begitupun dalam proses belajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi, terdapat pula kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Hal-hal yang termasuk kebutuhan primer antara lain, dosen yang layak, mahasiswa, dan ruang kelas. Kebutuhan sekunder di antaranya, yaitu SAP, silabus, dan buku-buku utama. Sedangkan kebutuhan tersier yaitu buku-buku penunjang, contoh-contoh karya ilmiah, media belajar beragam dan memadai, kemudahan mengakses internet, dan laboratorium bahasa.

Pada aspek materi pembelajaran, Hardjono[13] menjelaskan perlunya memperhitungkan beberapa faktor, yaitu:

1. materi tersebut dapat membangkitkan motivasi dalam proses belajar,
2. materi harus sesuai dengan kebutuhan pembelajar,
3. materi harus sesuai dengan tingkat pengetahuan pembelajar,
4. materi harus dapat meyakinkan bahwa apa yang dipelajari berguna bagi hari depannya,
5. materi harus dapat menghilangkan prasangka negatif terhadap bangsa Indonesia,
6. materi harus dapat mengembangkan saling pengertian,
7. materi harus dapat menerangkan keadaan sosial dan masyarakat Indonesia.

---

[13] T. Hardjono, 1988. *Prinsip-prinsip Pengajaran Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Proyek PLPTK Dirjen DIKTI. Depdikbud. hlm. 29.

Dari uraian di atas, dapat dipertegas bahwa materi pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi hendaknya juga harus memperhatikan hal-hal yang disebutkan itu. Pemelajaran Bahasa Indonesia hendaknya harus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan tingkat kemampuannya, harus berguna bagi masa depannya, dan sebagainya.

Pemelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi banyak diisi dengan pengembangan kemampuan menulis untuk para mahasiswanya. Sebagian besar perguruan tinggi yang menentukan materi ini sebagai materi yang akan diberikan kepada mahasiswanya, beralasan karena materi tersebut terkait dengan tuntutan akhir mahasiswa yang harus membuat karya ilmiah (KI)/karya tulis akhir (KTA), tugas akhir (TA) atau sering disebut skripsi. Dalam rangka menyelesaikan skripsi itulah mahasiswa merasa butuh mata kuliah bahasa Indonesia, karena pada sebagian silabus mata kuliah tersebut berisi bagaimana cara-cara mengembangkan sebuah tulisan ilmiah. Materi perkuliahan bahasa Indonesia ini memberikan bekal yang cukup memadai bagi mahasiswa yang akan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan tulis-menulis.

Untuk keperluan itu, para dosen yang mengajarkan mata kuliah ini menggunakan berbagai buku pegangan atau bahan ajar yang cukup bervariasi, ada yang menggunakan buku, seperti berikut.

1. *Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia* (Sabarti Akhadiah, Maidar Arsjad, Sakura Ridwan, 2000).
2. *Komposisi* (Gorys Keraf, 1997).
3. *Menulis Tertib dan Sistematis* (JD. Parera, 1983).
4. *Menulis sebagai suatu Keterampilan Berbahasa* (HG. Tarigan, 1983).
5. *Bimbingan Cakap Menulis* (P. Suparman Natawidjaja, 1976).
6. *Seni Menuangkan Gagasan* (A. Widyamartaya).
7. *Dasar-dasar Penulisan Ilmiah* (E. Zainal Arifin, 2003).
8. *Menuju Ke arah Kemampuan Berbahasa Indonesia* (Sudarno dan Eman A. Rahman, 1982).
9. *Buku Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah* (S. Nasution dan M. Thomas, 1985).
10. *Keterampilan Dasar Menulis* (Suparno dan M. Yunus, 2003.
11. *Menulis Efektif* (M. Atar Semi).
12. *Komposisi, Mengolah Gagasan Menjadi Karangan* (Walija, 1996).

13. *Pengantar Dunia Karang-Mengarang* (The Liang Gie).
14. *Dasar-dasar Komposisi Bahasa Indonesia* (Muchsin Achmadi, 1990).
15. *Bahasa Hukum Indonesia: Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum* (Panuti Sudjiman, 1997).

Selain itu, terdapat beberapa buku lainnya yang dibuat oleh dosen tertentu untuk kalangan atau mahasiswa dosen yang bersangkutan. Buku-buku tersebut dianggap oleh dosen yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswanya dalam mempelajari bahasa Indonesia, khususnya dalam mempelajari atau berlatih keterampilan tulis-menulis. Dikatakan demikian, karena para dosen melihat mahasiswa memerlukan keterampilan dalam mengembangkan gagasan, ide, pikiran, atau pendapat mereka ke dalam sebuah tulisan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai medianya. Para dosen beranggapan, buku yang mereka gunakan itu cukup memadai untuk dijadikan bahan ajar.

E. Isu-Isu Kritis dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi

Mengingat betapa pentingnya bahasa Indonesia bagi para mahasiswa, maka bahasa Indonesia sejak tahun 80-an bahkan beberapa tahun sebelumnya telah menjadi mata ajar/kuliah di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta kepada para mahasiswa di berbagai fakultas sebagai mata kuliah pilihan. Sejak 1998, bahkan sebagian besar perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib. Mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi ini pada umumnya berbobot 2 SKS.

Namun, sungguh disayangkan, di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di beberapa fakultas, sudah menghapus mata kuliah ini dari daftar mata kuliah yang harus diberikan kepada mahasiswanya. Beberapa universitas swasta di Jakarta, khususnya, pada fakultas teknik, hukum, kedokteran, atau keperawatan, tidak lagi memberikan mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah umum. Sebagian lagi di antaranya, hanya memposisikan mata kuliah tersebut sebagai mata kuliah pilihan. Dengan kata lain, mata kuliah bahasa Indonesia oleh sebagian lembaga perguruan tinggi dianggap tidak terlalu memiliki relevansi dengan dunia kerja yang akan digeluti oleh para lulusannya.

Kondisi yang demikian itu, menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia masuk dalam pandangan pengambil keputusan di universitas tersebut ke dalam kategori yang kurang penting. Dengan kata lain, para mahasiswa dipersilahkan mau atau tidak mau belajar bahasa Indonesia, diserahkan kepada mahasiswa bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga pendidikan tersebut tidak bertanggung jawab terhadap kompetensi berbahasa Indonesia para mahasiswanya. Mereka beranggapan, sekali lagi, bahwa itu tanggung jawab individu para mahasiswa.

Pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi sesungguhnya dimaksudkan agar mahasiswa dapat berkomunikasi secara baik dan benar dengan menggunakan bahasa Indonesia resmi/baku baik dalam komunikasi lisan, khususnya lagi dalam komunikasi tulis. Dengan kata lain, pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi bertujuan agar mahasiswa dapat menulis ilmiah atau menulis untuk keperluan akademis. Dengan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia secara tertulis tersebut, akan sangat mendukung proses pembelajaran mahasiswa dalam mata kuliah lainnya.

Berdasarkan pengalaman peneliti mengajar bahasa Indonesia sebagai mata kuliah umum (MKU) di berbagai perguruan tinggi DKI Jakarta dan juga pengamatan seksama selama lebih 20 tahun serta wawancara dengan beberapa dosen dan mahasiswa, masih banyak ditemukan masalah-masalah atau isu-isu kritis yang patut diperbincangkan, baik berupa sarana penunjang, substansi materi, maupun proses belajar mengajar di kelas.

Isu-isu kritis tersebut, di antaranya sebagai berikut.

1. Terbatasnya buku atau bahan ajar yang tersedia, khususnya buku-buku materi bahasa Indonesia untuk mahasiswa non-jurusan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, literatur khusus yang terkait dengan bidang kajian disiplin ilmu tertentu tidak tersedia secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa buku atau bahan ajar bahasa Indonesia yang sesuai dengan bidang studi yang sedang dipelajari mahasiswa tak tergarap oleh para dosen untuk menyediakannya.
2. Terbatasnya media audio dan visual tentang materi bahasa Indonesia. Bandingkan dengan mata kuliah bahasa Inggris yang media audio dan visualnya dapat dengan mudah dijumpai di toko-toko buku tertentu. Hal ini juga yang membuat para mahasiswa kurang tertarik mempelajari bahasa Indonesia. Mereka mengatakan bahwa belajar bahasa Indonesia itu "*ngebetein*" (membosankan).

3. Minimnya kajian/penelitian yang mengkaji kesalahan-kesalahan berbahasa yang sering dibuat oleh mahasiswa dalam menulis ilmiah. Kajian ini sebenarnya akan memberikan masukan berharga bagi mahasiswa dalam memperbaiki cara-cara mereka dalam berkomunikasi secara tertulis. Selain itu, kajian tersebut juga dapat menjadi contoh yang baik bagi mahasiswa lain yang ingin belajar tulis-menulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
4. Bobot 2 SKS yang dimiliki mata kuliah tersebut tidak sebanding dengan waktu yang diperuntukkan bagi penjelasan materi dan waktu untuk latihan yang harus diberikan. Sehingga, padatnya materi dan dan keterbatasan jumlah pertemuan membuat dosen hanya terfokus pada bagaimana menyelesaikan materi yang teoritis tersebut. Akhirnya, dosen sama sekali tidak memberikan latihan yang komprehensif dalam mempraktekkan seluruh komponen keterampilan menulis mahasiswa.
5. Kemampuan menulis mahasiswa masih sangat rendah, menurut peneliti, sebagai dampak dari kurang latihan menulis pada tingkat satuan pendidikan di bawahnya, yaitu, ketika di SMP maupun di SMA. Para dosen di beberapa perguruan tinggi yang sempat penulis menjadi pengajarnya, sering kali mengeluh ketika memberikan bimbingan karya tulis akhir, skripsi, atau tugas akhir. Keluhan yang dimaksud selalu dialamatkan kepada dosen bahasa Indonesia, karena mereka merasa mahasiswa bimbingan mereka itu tidak banyak mengerti tentang tata cara menulis karangan ilmiah. Jika kita ambil secara acak lima atau tujuh karya tulis akhir mahasiswa, lalu mari kita baca bagian pendahuluan atau latar belakang yang dikembangkan oleh para mahasiswa tersebut, maka kita akan mendapatkan kalimat-kalimat yang tidak efektif, kesalahanejaan yang memprihatinkan, pilihan kata yang tidak tepat dan sesuai, dan lain-lain. Sungguh sangat memprihatinkan.
6. Metode yang digunakan oleh sebagian besar dosen masih terbatas hanya ceramah dan sedikit tanya jawab. Jika dosen mau saja sedikit kreatif dalam mengelola pembelajaran di kelas dengan memvariasikan beberapa metode yang telah dipelajarinya selama ini ketika kuliah atau pengalamannya selama ini mengajar, tentunya akan memberi nuansa agak lain bagi mahasiswanya. Salah satu yang patut dipertimbangkan oleh para dosen yaitu, memberikan tugas-tugas menulis surat pembaca di surat-surat kabar yang ada di ibu-kota ini. Jika dimuat di kolom surat pembaca tersebut, tentunya akan jadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi mereka. Ini merupakan laboratorium latihan menulis yang praktis dan tanpa biaya bagi para mahasiswa atau

lembaga pendidikan tersebut. Dengan bantuan redaksi dan tim editor surat pembaca tersebut, dosen akan sangat terbantu dalam mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para mahasiswanya. Tulisan yang berhasil dimuat tentunya diberikan penghargaan yang baik oleh dosen pengampu terkait dengan pemberian nilai untuk mata kuliah tersebut.

7. Jumlah mahasiswa yang terlalu banyak, misalnya, ada yang lebih dari 50 mahasiswa per kelas, biasanya terjadi pada perguruan tinggi swasta. Hal ini mungkin karena terbatasnya tenaga pengajar untuk mata kuliah umum bahasa Indonesia. Dampak dari jumlah yang terlalu besar tersebut membuat kuliah ini menjadi tidak efektif, terutama, tidak adanya waktu untuk memberikan latihan yang memadai termasuk waktu untuk mengoreksi atau memberi masukan untuk setiap pekerjaan mahasiswa.

Indrajati Sidi dan Achmad DS. (dalam Sugono)[14] menegaskan bahwa sistem perguruan tinggi di Indonesia tidak atau kurang membekali lulusannya kemampuan untuk menulis, dan juga suasana perguruan tinggi kita tidak/kurang kondusif bagi para dosen untuk menulis. *Kompas* (17/12/97) menjelaskan antara tahun 1980-1985, terdapat hampir 50% dosen tidak pernah menulis buku atau artikel dalam bahasa Indonesia apalagi dalam bahasa asing (Inggris).

Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan kita semua. Dalam hal ini, banyak yang menyebabkan hal tersebut menjadi sebuah kenyataan. Semua masalah dan hambatan tersebut tidak berdiri sendiri. Terjadi saling keterkaitan di antara banyak masalah tersebut.

F. Penutup

Di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta, pada beberapa fakultas, sudah menghapus mata kuliah bahasa Indonesia dari daftar mata kuliah yang harus diberikan kepada mahasiswanya. Beberapa universitas swasta di Jakarta, khususnya, pada fakultas teknik, hukum, kedokteran, atau keperawatan, tidak lagi memberikan mata kuliah bahasa Indonesia sebagai mata kuliah umum. Sebagian lagi di antaranya, hanya memposisikan mata kuliah tersebut sebagai mata kuliah pilihan. Dengan kata lain, mata kuliah bahasa Indonesia oleh sebagian lembaga perguruan tinggi dianggap tidak terlalu memiliki relevansi dengan dunia kerja yang akan digeluti oleh para lulusannya.

---

14 Dendy Sugono (ed.). 2003. *Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Penerbit Progres, hlm. 42.

Isu-isu kritis dalam pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi di antaranya: terbatasnya buku atau bahan ajar, terbatasnya media audio dan visual, minimnya kajian/penelitian tentang tulisan mahasiswa, bobot 2 sks yang dimiliki mata kuliah tersebut tidak sebanding, kemampuan menulis mahasiswa yang masih sangat rendah, metode yang digunakan oleh sebagian besar dosen masih terbatas hanya ceramah dan sedikit tanya jawab, serta jumlah mahasiswa yang terlalu banyak dalam satu kelas.

Sehubungan dengan begitu banyaknya kendala yang dihadapi dalam pemelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi, maka disarankan perlu melakukan kajian yang komprehensif tentang kebutuhan mahasiswa tersebut, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi dapat diwujudkan. Kajian tersebut hendaknya dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran jelas tentang apa sesungguhnya kebutuhan mahasiswa yang diperlukan untuk kelancaran proses belajar mengajar bahasa Indonesia itu sendiri. Termasuk juga peran mata kuliah tersebut bagi peningkatan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar di perguruan tinggi, khususnya untuk berkomunikasi secara tertulis, misalnya, untuk mengerjakan tugas-tugas akademik yang berbentuk tulis-menulis pada mata kuliah tertentu.

Daftar Pustaka

Akhadiah, Sabarti dkk.2000. *Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia.* Jakarta: Erlangga.

Alwasilah, A. Chaedar. 1997. *Politik Bahasa dan Pendidikan.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Alwi, Hasan dan Dendy Sugono (ed.) 2000. *Politik Bahasa.* Jakarta: Pusat Bahasa.

Arifin, E.Zaenal. 2003. *Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah,* Jakarta: Grasindo.

Basier, Noerlena. 1991. "Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penalaran Ilmiah di Sekolah Menengah Tingkat Atas". *Hasil Penelitian.* Jakarta: Lembaga Penelitian IKIP Jakarta.

Bromley, Karen D'Angelo. 1988. *Language Arts: Exploring Connection.* Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc.

Chaer, Abdul 2000. *Bahasa Baku.* Jakarta: Erlangga.

Chaniago, Sam Mukhtar. 1994. "Pengajaran Bahasa di Victoria, Australia": *Makalah Laporan Kunjungan,* Jakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia/Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Jakarta.

Fajar, A. Malik. 2003. "Bahasa Indonesia, Pendidikan Nasional, dan Kehidupan Berbangsa" *Pidato Pembukaan Kongres Bahasa Indonesia VIII.* Jakarta, 14-17 Oktober 2003.

Finoza, Lamuddin, 2001. *Komposisi Bahasa Indonesia.* Jakarta: Diksi Insan Mulia.

Depdikbud, 1998. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Hamdan, Muhammad dan Wahyu Hari Setyawan. 2004. "Sikap Pemuda Terhadap Bahasa Indonesia". *Debat antarmahasiswa* dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra, Pusat Bahasa. Jakarta: Sastra Indonesia Univ. Nasional.

Hamilton, Alexander. 2002/2003, *Writing Winning Report & Proposal: Menulis Laporan dan Proposal untuk Bisnis.* Semarang: Dahara Prize.

Hardjono, T. 1988. *Prinsip-prinsip Pengajaran Bahasa dan Sastra.* Jakarta: Proyek PLPTK Dirjen DIKTI, Depdikbud.

Hs., Wijono. 2005. *Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.* Jakarta: Grasindo.

Hs., Wijono dan Sintowati, 2003. *Bahasa Indonesia Materi Ajar Mata Kuliah Pengembang Kepribadian di Perguruan Tinggi.* Jakarta: Jurusan MKU UNJ.

Keraf, Gorys. 1983. *Komposisi.* Ende: Nusa Indah.

Kridalaksana, Harimurti. 1982. *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa.* Ende-Flores, Nusa Indah.

Krisanjaya. 1996. "Pemberdayaan Mahasiswa dalam Penulisan Ilmiah" *Makalah Seminar Ilmiah IKIP Jakarta,* Jakarta, 26-27 Agustus 1996.

Nadeak, Wilson, 1983. *Bagaimana Menjadi Penulis yang Sukses.* Bandung: Penerbit Sinar Baru.

Nasution, S dan M. Thomas. 1985. *Buku Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah.* Bandung: Jemmars.

Panggabean, Maruli H. (ed.). 1981. *Bahasa Pengaruh dan Peranannya.* Jakarta: Gramedia.

Parera, Jos Daniel. 1983. *Menulis Tertib dan Sistematis.* Jakarta: Erlangga.

———, 1990. *Linguistik Edukasional.* Jakarta: Erlangga.

Pranoto, Naning. 2004. *Creative Writing: 72 Jurus Seni Mengarang.* Jakarta: Primamedia Pustaka.

Pratikto, Riyono. 1984. *Kreatif Menulis Feature.* Bandung: Penerbit Alumni.

Putra, Nusa. dkk. 1996. "Pembelajaran Keterampilan Menulis Jurusan Non-Bahasa Indonesia". *Hasil Penelitian.* Jakarta: Lembaga Penelitian IKIP Jakarta.

Sampurno, Siti Chamdiah. dkk. 1981/1982. "Kemampuan Membaca dan Menulis Mahasiswa DKI Jakarta". *Laporan Hasil Penelitian.* Jakarta: Pusat Bahasa.

Sapani, Suardi, Yeti Mulyati, Nunny Sulistiany Idris. 1997/1998. *Teori Pembelajaran Bahasa.* Jakarta: Bagian Proyek Penataran Guru SLTP Setara D-III, Depdikbud.

Sharples, Mike. 1999. *How We Write: Writhing Is Creative Design.* New York: Routledge.

Simpen, I Wayan. 1988. "Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Karya Ilmiah Mahasiswa: Sebuah Pengamatan Sekilas" *Majalah Pembinaan Bahasa Indonesia.* No. 2 Th. 9, Juni, Hlm. 102-110, ISSN 0126-4737.

Sudarno dan Eman A.Rahman. 1982. *Menuju ke arah Kemampuan Berbahasa Indonesia.* Jakarta: Lembaga Penerbitan IAIN Syarif Hidayatullah.

Sudjiman, Panuti. 1985. "Kuliah Komposisi sebagai Usaha Meningkatkan Keterampilan Menulis Mahasiswa" *Majalah Pembinaan Bahasa Indonesia*. No. 4 Th. 6, Desember, Hlm. 197-204, ISSN 0126-4737.

———, 1997. *Bahasa Hukum Indonesia: Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum*. Untuk kalangan sendiri.

Sugono, Dendy (ed.). 2003. *Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Penerbit Progres.

———, 2003. "Laporan Pelaksanaan Putusan Kongres Bahasa Indonesia VII" *Makalah Pleno Kongres Bahasa Indonesia VIII*. Jakarta, 14-17 Oktober 2003.

———, 2005. "Dinamika Bahasa dan Sastra Indonesia/Melayu Peneral Jiwa Bangsa" *Makalah Seminar Bahasa dan Sastra Mabbim dan MASTRA*, Mataram, 7-8 Maret 2005.

Suparno dan Muhamad Yunus. 2003. *Keterampilan Dasar Menulis*. Jakarta: Pusat Penerbitan, Universitas Terbuka.

Tarigan, Henry Guntur, 1983. *Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*. Bandung: Angkasa.

Tim Penyusun Buku. 2003 *Jagat Bahasa Nasional: Pandangan Tokoh tentang Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan KOJI.

Universitas Negeri Malang. 2000. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, Laporan Penelitian*. Malang: Biro Akademik, Perencanaan, dan Sistem Informasi bekerja sama dengan Penerbit Universitas Negeri Jakarta.

Penggunaan Bahasa Asing, Perencanaan dan Reformasi Bahasa Indonesia, serta Pendidikan Dwibahasa

Oleh:

Dr. Ganjar Hwia

(Pusat Bahasa)

A. Pendahuluan

Di tengah persaingan global saat ini, Bahasa Indonesia (BI) sebenarnya mempunyai posisi tawar yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kriteria yang mengindikasikan sebuah bahasa itu penting atau tidak penting. Kriteria itu mencakup tiga hal, yaitu (1) jumlah penutur, (2) luas penyebarannya, dan (3) sejauh mana bahasa itu dapat digunakan dalam aneka ragam pemakaian bahasa (Arifin dan Tasai, 2006: 16-17).

Lihatlah, pada tahun 2006, penutur BI adalah 220 juta orang lebih ditambah dengan penutur-penutur yang berada di luar Indonesia[15]. Penutur BI yang berjumlah 220 juta lebih itu tersebar di daerah yang luas, yaitu Sabang—di ujung barat Indonesia, sampai Merauke—di ujung Timur Indonesia. Daerah ini masih ditambah dengan daerah-daerah lain, seperti Malaysia, Brunei, Australia, Suriname, Belanda, Rusia, dan Jepang. BI dapat digunakan pada aneka ragam pemakaian bahasa. BI pun telah menjalankan tugasnya sebagai sarana komunikasi ilmu pengetahuan, budaya, dan sastra. Selain itu, globalisasi telah memosisikan BI bukan hanya menjadi bahasa negara, melainkan juga menjadi bahasa dari suatu *tribe* (suku) yang mengglobal (Hwia, 2006).

[15] Sampai bulan Juli 2006, jumlah penduduk Indonesia adalah 245.452.739 jiwa.

Kini, perikehidupan masyarakat Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, terutama yang berkaitan dengan tatanan baru kehidupan dunia dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), khususnya teknologi informasi. Kondisi ini pun telah menempatkan bahasa asing pada posisi strategis yang memungkinkan bahasa itu memasuki berbagai sendi kehidupan bangsa dan memengaruhi perkembangan BI. Keadaan ini telah membawa perubahan perilaku masyarakat dalam bertindak dan berbahasa.

Dalam kondisi seperti itu, bagaimana prospek BI pada era globalisasi? Pada masyarakat Indonesia, sebetulnya BI dapat memainkan peran filosofis dan politis dalam pembentukan kepribadian bangsa dan dapat memainkan peran strategis dalam penyiapan sumber daya manusia Indonesia untuk memasuki tatanan kehidupan baru globalisasi. Sementara itu, ke luar negara Indonesia, BI dapat memainkan peran sosiologis dalam pengembalian citra Indonesia di dunia internasional, misalnya melalui program pengajaran BI untuk Penutur Asing (BIPA).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, tulisan ini akan membahas isu-isu kritis dalam pendidikan bahasa yang berhubungan dengan penggunaan bahasa asing di tengah pemakaian BI. Karena penggunaan bahasa asing ini merupakan masalah serius dalam perkembangan BI, masalah perencanaan dan reformasi bahasa akan dibahas dalam kaitannya dengan pengajaran BI ini.

Tulisan ini pun akan membahas pendidikan dwibahasa. Pendidikan dwibahasa merupakan fenomena menarik dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Mengapa menarik? Kita dapat melihat bersama, bahwa proses adaptasi dengan globalisasi dan persaingan global biasanya dikaitkan dengan label serba "internasional" serta penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris.

B. Penggunaan Bahasa Asing

Makin meluasnya penggunaan BI, menimbulkan keperluan akan pengembangan kosakata/istilah BI. Kebutuhan akan pengembangan kosakata/istilah itu sudah mulai dibahas dalam Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1938 di Surakarta. Salah satu rekomendasi kongres itu ialah perlunya upaya pengembangan kosakata, khususnya pembentukan istilah berbagai bidang ilmu. Dalam perkembangan setelah Indonesia merdeka, BI dikukuhkan sebagai bahasa negara. Dalam kedudukan itu, BI mengemban fungsi sebagai bahasa pengantar dalam menjalankan administrasi kenegaraan dan melaksanakan pendidikan serta pengembangan iptek.

Di dalam globalisasi, posisi yang harus diambil BI bukan sebagai objek perubahan, melainkan harus menjadi subjek. BI amat potensial menjadi bahasa yang diperhitungkan di dalam dunia global. Jika Indonesia akan hadir sebagai salah satu *global-tribe* di dunia dan kawasan Asia Pasifik, BI harus juga berkembang ke arah itu. BI harus siap menerima peranan yang demikian dan meninggikan posisi tawarnya.

Perluasan penggunaan BI memperbesar kebutuhan akan pengembangan kosakata/istilah itu dalam berbagai bidang ilmu, terutama untuk keperluan pendidikan. Kini, fungsi itu dikukuhkan lagi dalam sistem pendidikan, yaitu bahwa bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Kebutuhan akan kosakata/istilah itu makin mendesak saat bahasa Indonesia menjadi bahasa iptek. Apalagi perkembangan bidang iptek begitu pesat, maka laju perkembangan kosakata/istilah bidang pun harus dipacu mengejar kemajuan bidang tersebut.

Di samping pengembangan kosakata bidang iptek, pengembangan kosakata pun mencakupi bidang kebudayaan. Di seluruh wilayah Indonesia, terdapat 726 bahasa daerah di samping bahasa Indonesia. Dalam hubungan dengan upaya itu, keragaman budaya dan perikehidupan masyarakat Indonesia yang tergambar pada kekayaan bahasa daerah merupakan sumber pengayaan kosakata/istilah bidang tersebut, di samping bahasa daerah memiliki peran untuk membentuk kepribadian bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya akan memokuskan pembahasan tentang penggunaan bahasa asing di Indonesia ini dengan mengambil kasus pengindonesian kata/istilah asing dalam konteks pengembangan kosakata/istilah BI. Saya melihat kasus itu sangat menarik. Lebih dari tiga dasawarsa, Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional—dan tentunya bersama lembaga pendidikan serta para pakar dan masyarakat yang peduli dengan bahasa Indonesia (BI)—telah mengupayakan percepatan pengembangan kosakata BI melalui pengindonesiaan kata/istilah asing. Saya melihat upaya itu bukan kerja gampang, karena di dalamnya ada pengalihan makna, ide, dan konsep-konsep baru dari bahasa asing ke dalam BI yang tentunya tidak semudah membalik telapak tangan untuk diterima oleh penutur BI sendiri.

Saya berpikiran positif, bahwa inilah upaya kita untuk meningkatkan mutu daya ungkap BI di tengah perkembangan iptek yang sangat pesat. Bahkan lebih dari itu, saya berharap dengan kemampuan daya ungkap BI terhadap kata/

istilah asing itu, maka makna, ide, atau konsep-konsep baru dari bahasa asing dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah.

Pengalihan makna, ide, dan konsep-konsep baru dari suatu bahasa ke bahasa lain membawa berbagai dampak. Jika saja saya boleh berandai-andai, misalnya, ketika ada jajak-pendapat tahun 1999, rakyat Timor Lorosae tidak dihadapkan dengan pilihan merdeka atau integrasi, tetapi merdeka atau bergabung dengan Indonesia, mungkin saja mereka akan memilih bergabung dengan Indonesia. Jika Anda seperti saya, mengandaikan mereka akan memilih merdeka dengan alasan masalah bahasa, bukan persoalan politik atau hak asasi manusia, kita punya alasan yang kuat. Bagaimanapun orang akan memilih "merdeka" daripada "tidak merdeka". Kata "integrasi", yang konsep atau idenya masih perlu penjelasan, sangat mungkin akan dipadankan oleh rakyat Timor Lorosae sebagai "tidak merdeka" karena diposisikan sebagai pilihan alternatif dari "merdeka" (Purwoko, 2003: iii).

Agus R. Sarjono, seorang penyair dan esais, pernah bercerita bahwa ketika sebuah jurnal budaya mengangkat sebuah laporan menarik bertajuk *"Mencari Sastra Kontemporer"*, tema yang tampaknya menarik itu segera kehilangan daya tariknya karena satu hal penting: hampir semua awak jurnal itu ternyata tidak memahami dengan baik pengertian istilah *kontemporer*! Akibatnya, tokoh-tokoh yang diwawancara harus lebih dahulu menghabiskan halaman untuk menerangkan kepada para pewawancara apa itu pengertian kontemporer. Bahkan, setelah sekian lama menjelaskan pengertian kontemporer, baik secara estetis maupun historis, Jakob Sumardjo malah disodori oleh pewawancara pertanyaan: *"tolong jelaskan lagi, sebetulnya sastra kontemporer itu apa?"* (Sarjono, 2001: 16—17).

Namun, benarkah pengindonesian kata/istilah asing serta merta membuat kata/istilah asing itu mudah dimengerti? Istilah integrasi atau kontemporer saja masih memerlukan penjelasan. Di samping itu, ada kendala lain, misalnya, walaupun empat tahun lalu telah dibuat panduan pembakuan peristilahan komputer dalam BI[16], istilah-istilah bahasa Inggris-nya tetap dipakai dan sering terasa lebih bergengsi dibandingkan dengan istilah BI-nya. Lihatlah *keyboard, software, hardware, log-on, download, error, save, masukan data, fetch, scan, e-mail, domain*, dan sebagainya, tetap dipakai meskipun ada istilah *papan ketik, peranti lunak, peranti*

[16] Sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2001 tentang *Penggunaan Komputer dengan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia*.

keras, log masuk, unduh, galat, simpan, masukan data, ambil, pindai, pos-el, ranah, dan sebagainya.

Meskipun rambut sama hitam, pendapat kita mungkin berlainan. Masih banyak yang bernada *'minor'* tentang upaya mengindonesiakan kata/istilah asing ini. Memang, bahasa bukan sekadar komunikasi sehingga setiap unsurnya diusahakan menjadi jelas dan komunikatif. Bahasa terkait dengan upaya-upaya mengelola citra –juga gengsi, makna-makna, ide, dan dunia. Lalu, benarkah kendala cara berpikir, tingkah laku, dan pandangan dunia/budaya orang Indonesia sendiri sebagai hambatan menerima pengindonesiaan kata/istilah asing itu? Atau lebih jauh lagi, benarkah kendala cara berpikir, tingkah laku, dan pandangan dunia/budaya orang Indonesia sendiri sebagai hambatan untuk mengutamakan BI di lingkungannya?

Terlepas dari masalah gengsi, saya masih menganggap riskan jika hal tersebut cepat-cepat dikaitkan dengan 'cerminan' rasa kebangsaan kita. Sementara saya menduga, hal itu terkait dengan proses kognitif dalam memahami konsep atau gagasan di balik kata/istilah asing itu. Oleh karena itu, di sinilah saya melihat pentingnya posisi pendidikan untuk mengembangkan kemampuan kognitif berbahasa itu. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa kemampuan kognitif dapat dibangun. Kemampuan kognitif kita, apalagi yang sudah dewasa, dapat dibangun untuk menerima BI sebagai bahasa yang mempunyai daya ungkap untuk bidang iptek. Yang diperlukan adalah bernalar dan berpikir kritis, yang mungkin lebih tepat diartikan sebagai kemauan untuk mengutamakan BI di lingkungannya.

Kasus pengindonesiaan kata atau istilah asing memang bukan sekadar memadankan atau menerjemahkan kata. Sebagai analogi, ada pendapat yang mengatakan bahwa terjemahan yang unggul dari satu bahasa ke bahasa yang lain sukar dicapai, tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa setiap bahasa mempunyai sistem pikirannya sendiri. Sebagai contoh, kita ambil kasus pengamatan manusia tentang warna. Steinberg (1982) mengatakan bahwa kajian silang budaya menemukan tidak ada perbedaan dalam upaya mengamati warna di kalangan penutur beragam bahasa. Bahasa tidak menentukan persepsi penutur, tetapi persepsilah yang menentukan bahasa. Maka, dengan cara yang sama, tidak ada alasan untuk berkata bahwa orang Eskimo telah belajar mengamati macam-macam salju melalui bahasa dan bukan melalui pengalaman hidup mereka. Orang Indonesia sendiri, jika pernah mengamati

salju, dapat menggambarkan beberapa keadaan salju dengan membentuk frasa-frasa seperti *salju halus, salju mencair, salju kotor,* dan sebagainya..

Namun, pengalaman hidup juga tidak semestinya akan mencetuskan bentuk-bentuk kosakata baru. Misalnya, penutur bahasa Inggris tahu ide frasa '*male dog*' (ada juga kata *bitch* untuk anjing betina –yang saya dengar sering dipakai untuk mengumpat— dan kata *dog* untuk pengertian 'anjing' secara umum) dan ide untuk kata umum tunggal *cow* dan *bull* (meskipun ada kata *cattle* untuk kata jamak 'lembu'), meskipun penutur bahasa Inggris sendiri tidak mempunyai kata-kata khusus untuk ide-ide ini.

Oleh karena itu, menurut Lennerberg (1987), pengalaman empiris menunjukkan bahwa proses-proses kognitif yang dikaji ini kebanyakan adalah proses yang bebas dari ciri-ciri sembarang bahasa. Kemampuan kognitif dapat dibangun meskipun pengetahuan bahasa, misalnya untuk kosakata tertentu, tidak ada. Tetapi, keadaan sebaliknya, pengembangan bahasa memerlukan kematangan dan ketentuan kognisi minimum. (Adakah ini yang mempengaruhi sulitnya penutur BI menerima kata/istilah baru karena kurangnya kematangan dan kognisi minimumnya?)

Satu lagi, jika ada yang mengatakan bahwa sistem bahasa membentuk atau mempengaruhi cara berpikir atau tingkah laku kita dalam mengamati dunia sekeliling kita, maka harus dikatakan bahwa penutur beragam bahasa mempunyai lebih dari satu cara untuk melihat dunia sekelilingnya. Penutur semacam ini akan dikatakan mempunyai sistem konsep-tanggapan yang bermacam-macam–sebanyak jumlah bahasa yang dikuasainya. Jika benar bahwa bahasa yang berbeda memberikan kesan yang distingtif dan bermakna tentang cara kita mengamati dunia, penutur beragam bahasa ini pun seharusnya mempunyai cara yang distingtif dan bermakna pula untuk melihat dunianya. Saya kira, anggapan semacam ini tidak pernah dikemukakan oleh siapa pun.

Memang, dalam suatu masyarakat, orang akan memakai kata dan istilah ataupun corak bahasa yang memenuhi keperluan mereka tidak dapat direkayasa pemerintah. Pengaruh asing tidak dapat dihapuskan begitu saja dari leksikon pemakaian sehari-hari. Namun, perhatikanlah perkembangan BI sekarang. Seolah-olah tidak tidak dapat diarahkan.

Sehubungan dengan kasus pengindonesiaan kata atau istilah asing yang dikatakan bukan sekedar memadankan atau menerjemahkan kata, kita dapat mengatakan bahwa memang arti atau padanan kata/istilah asing sukar

diperoleh bukan karena pikiran tidak bersifat sejagat, tetapi karena kata/istilah yang dipilih untuk penggunaan dalam suatu konteks akan dikaitkan dengan implikasi, praandaian, sikap, dan tingkat kesopansantunan (*ethical*) yang berlainan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Oleh karena itu, sungguhpun akan gampang memadankan suatu kata dalam suatu bahasa dengan kata dalam bahasa yang lain dari segi makna harfiahnya, tetapi sangat sukar memadankannya dengan makna sekunder dan implikasinya.

Lihatlah kata *unduh* yang dipakai dalam peristilahan komputer/internet, yang berasal dari bahasa Jawa itu, dipakai untuk menggantikan istilah *download*. Pemaknaan kata ini masih terasa sulit, apalagi jika dikaitkan dengan muatan gagasan dari istilah teknis dalam dunia komputer/internet. Lihatlah muatan gagasan yang dikandung dari *unduh*: 'proses pemindahan data dari komputer utama ke komputer lokal dalam sebuah jaringan internet atau mengambil file dari komputer lain yang sama-sama terhubung pada jaringan lokal'. Jika tingkat abstraksi *download* yang kita dipadankan dengan *unduh* itu, lalu bagaimana dengan abstraksi istilah *spektroskopi*? *Download* masih ada hubungannya dengan "bongkar muat", tapi *spektroskopi* sudah jauh hubungannya dengan "melihat hantu".

Kasus lain, misalnya dalam menerjemahkan sebuah kalimat. Parakitri T. Simbolon (2005) pernah bercerita tentang pengalamannya dalam proses penerjemahan buku *Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia* karya Rudolf Mrazek. Dalam kata pengantar buku itu, Mrazek menulis *"I can not disagree more"* untuk menanggapi sebagian pembaca naskahnya yang berpendapat bahwa karyanya itu merupakan riwayat hidup seorang yang gagal. Sebelum buku itu diterjemahkan ke dalam BI, seorang redaktur kepustakaan populer gramedia (KPG) menerjemahkannya menjadi "*Saya tidak dapat lebih menyangkal lagi*". Perhatikanlah hasil terjemahan itu, dari segi tata bahasa tidak salah memang, tetapi maksudnya jadi sulit dimengerti. Bahkan, kata Simbolon, ada salah satu penerbit yang menerjemahkannya menjadi "*Saya sangat setuju*"! Setelah memahami perkataan itu dari segi logika dan implikasinya, kalimat itu akhirnya oleh Simbolon diterjemahkan "*Saya sangat tidak setuju!*".

Contoh lainnya ialah ketika Simbolon menjadi penerjemah buku *Within Reason* karya Calne. Ketika ada kata *breaking wind* dalam kalimat "*the primal religions dwell on biological functions, such as eating, drinking, sexual intercourse, childbirth, fighting, killing, and dying. Even breaking wind (pts) can be immortalized in religious narratives*". Seperti biasanya, hal-hal seperti itu ia tunjukkan kepada para

redaktur di KPG untuk coba diterjemahkan. Semua menerjemahkannya dengan angin topan. Simbolon *bilang* terjemahan itu kurang logis, karena kalimat yang dimulai dengan "*Even*" jelas menunjukkan bahwa *breaking wind* itu lebih sepele daripada semua yang disebut lebih dulu, seperti "*eating, drinking* ....". Lalu, ia memberi tahu bahwa arti *breaking wind* dalam kalimat itu adalah *'kentut'*! Karena itu pula apabila tidak ada kesejajaran yang tepat bukanlah akibat perbedaan pikiran, tetapi akibat cara menerapkan pikiran ke dalam kata-kata dan struktur bahasa.

Memang, menerjemahkan atau memadankan langsung sebuah kata/istilah asing ke dalam BI dan memilih mana yang perlu dipertahankan dalam bahasa aslinya ketika masuk ke sistem pikiran kita, sungguh upaya yang memerlukan kerja keras akal budi yang mengaitkan sistem pikiran dengan sistem bahasa.

Namun, semua itu bukan upaya yang mustahil. Proses berpikir berkaitan erat dengan nalar. Kekuatan otak tidak berubah sejak *Homo Sapiens*, umat manusia pertama kali muncul 200.000 tahun yang lalu, yang berevolusi adalah nalar (Calne 2005: 25), yakni tata bahasanya argumen. Nalar dan bahasa berkembang sama-sama sejak usia dini dan saling bergantung. Buktinya, antara lain, argumen-argumen dinyatakan lewat proposisi-proposisi, yakni kalimat-kalimat. Artinya, bernalar seperti halnya berbahasa harus dikembangkan lewat pembelajaran, baik formal maupun informal. Selama ini cara berbahasa kita dalam pertuturan sebagai proses berkomunikasi dengan kadar nalar yang rendah. Ini terbukti dengan amburadulnya BI di sekitar kita.

Berbagai masalah yang kini melanda Indonesia jelas lebih disebabkan oleh batas-batas nalar yang disungkupkan oleh kecemasan manusia sendiri. Volume otak orang-orang Indonesia jelas sama dengan otak orang Amerika atau orang mana pun di bumi ini. Bahwa dengan otak yang persis sama itu, hasilnya adalah buah yang berbeda, menunjukkan bahwa tentu ada yang keliru dengan cara kita menggunakan dan memperlakukan otak. Tampaknya kita memang tak cukup membantu otak kita agar bisa tumbuh dan berkembang sesubur-suburnya. Kita tak menopangnya dengan pasokan informasi yang memadai, dengan pengikisan produk kognitif yang kadaluwarsa: pengertian tentang diri, indentitas, dan pandangan dunia yang sungguh sempit dan dangkal. Untuk membeli gengsi, misalnya, kira rela merusak bahasa. Saya teringat sindiran Samuel Mulia dalam "Kilas Parodi"-nya (*Kompas*, 16 Oktober 2005). Ia menulis, *"kalau masih mau jadi dangkal (nalarnya): berbahasa asing jangan lupa. Campurkan saat Anda berbicara BI dengan orang Indonesia!"*

C. Perencanaan dan Reformasi Bahasa

Perencanaan dan reformasi BI adalah upaya yang tidak mungkin dihindari. Setidaknya, pesatnya perkembangan BI dan gencarnya "serangan" dari bahasa asing terhadap BI telah menuntut hal itu. Di samping itu, BI juga berdiri di tengah bahasa-bahasa daerah yang mengelilinginya—ini pun menjadi masalah sendiri.

Mengapa perlu ada perencanaan dan reformasi terhadap BI? BI—yang tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu—mengalami perubahan sejalan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat penuturnya. BI digunakan sebagai alat/sarana dalam kegiatan kehidupan manusia, seperti dalam bidang budaya, ilmu, dan teknologi. Budaya, ilmu, dan teknologi berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Perkembangan budaya, ilmu, dan teknologi itu membuat bahasa juga berkembang untuk memenuhi tuntutan perkembangan budaya, ilmu, dan teknologi (Sugono, 1994:3).

Ibarat manusia, sekarang BI sudah tumbuh dewasa. Seiring perjalan waktu, BI yang mutakhir adalah "sosok" yang modern. BI telah banyak bersentuhan dengan bahasa daerah yang mengelilinginya dan telah banyak menyerap bahasa asing. BI memang telah banyak menyerap kosakata bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Arab, dan Belanda. Bahkan, Remy Sylado (2003) mengatakan "9 dari 10 kosakata BI adalah asing". Lalu, adakah BI yang asli? Bagaimanakah BI yang asli itu? Seperti sudah dikatakan sebelumnya, ibarat manusia, sekarang BI sudah tumbuh dewasa. Oleh karena itu, pertanyaan semacam itu dapat dijawab dengan pertanyaan retoris semacam ini: Apakah Si A yang masih bayi sama dengan Si A yang sekarang sudah tumbuh dewasa? Sejatinya, Si A yang sekarang tetaplah Si A yang dulu masih bayi. Jika Si A itu wanita, maka Si A yang sekarang telah semakin dewasa, cantik, pintar, dan semakin pandai bernalar.

Dengan melihat pesatnya perkembangan BI, tentunya BI tidak bisa dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri seperti binatang dan tumbuhan di hutan. Tetapi, bagaimana caranya? Apakah harus ada peraturan, larangan-larangan kemudian diikuti dengan ancaman-ancaman, sebagaimana yang kini sedang "*trend*" di Indonesia? Peraturan dan perundang-undangan dalam perencanaan dan pengembangan BI tentunya sangat penting. Namun, apabila pemerintah lebih gemar untuk menunjukkan kekuasaannya daripada pelayanannya kepada masyarakat, akan ada ketegangan dalam kehidupan

bernegara. Sebab ide keteraturan yang mengandalkan adanya undang-undang, nanti hanya sebuah mimpi para pembuat peraturan dalam negara yang hukumnya tak berdaya.

Peraturan jelas bukanlah jalan satu-satunya untuk membuat BI kokoh. Kehadiran undang-undang apabila ada jaminan akan mulus serta berkesinambungan pelaksanaannya, pasti mempunyai pengaruh dalam pertumbuhan BI. Tetapi tidakkah unsur keterpaksaan, ketakutan pada sanksi hukum, serta kekangan undang-undang itu, akan juga membuat dampak yang tidak kecil? BI yang tak hanya menjadi bahasa resmi tetapi juga bahasa gaul, bisa jadi akan kehilangan "ke-kreatif-annya", walaupun peraturan dapat meluruskan jalan sehingga perkembangan BI nanti bisa murni, tetapi mungkin peluang perkembangannya menjadi terbatas dan penampilannya menjadi kaku.

Untuk mengembangkan BI dan melawan "gerilya dan teror" kosakata asing di dalam BI, tak bisa hanya membuat "benteng" atau ancaman yang menakutkan. Dalam konteks ini, kita dapat mengandalkan institusi pendidikan. Merujuk pada kegagalan pendidikan BI di sekolah-sekolah dan pergurun tinggi, kita harus meneliti apa sebenarnya yang sudah terjadi dalam pengajaran BI. Penyair Taufiq Ismail dengan majalah *Horisan* dan *Ford Foundation*, di samping melakukan usaha SBSB (*Sastrawan Bicara Siswa Bertanya*, dengan membawa satrawan dan karya sastra ke sekolah) juga mengadakan lokakarya pelajaran mengarang untuk guru-guru. Setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap programnya, ia menemukan para pelajar Indonesia tak pernah membaca, sehingga tidak punya kemampuan mempergunakan bahasa.

Dalam artikel tentang Undang-Undang Kebahasaan, pakar pers dari Lembaga Pers Dr. Sutomo, Atmakusumah Astraatmadja mengatakan bahwa kelemaham berbahasa Indonesia pada masyarakat kita antara lain diakibatkan tidak sempurnanya pengajaran BI di sekolah. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa karena masalah itu warga kita umumnya tidak mahir menulis karangan bahkan tidak pandai menulis surat resmi (*Kompas,* 13 Januari 2007). Dari sinilah kita dapat melihat betapa pentingnya pendidikan bahasa yang bermutu menemukan maknanya yang signifikan.

Selain itu, sebenarnya tanpa ada aturan pun sudah ada beberapa lembaga tak resmi yang mengatur perkembangan BI secara sukarela. Misalnya, bagaimana para sastrawan lewat karya-karyanya mengembangkan dan menjaga BI. Seorang pengarang di dalam menuturkan apa yang hendak disampaikannya, tidak hanya

ingin menjaga isi pikirannya tertuang sempurna, tetapi juga bagaimana bisa menarik, memikat, memukau, dan tak layu oleh zaman. Sebuah karya sastra yang baik tidak hanya dimimpikan dan diupayakan oleh sastrawannya agar menjadi bintang pada zamannya, tetapi juga bisa menembus ke zaman lain. Mampu bicara dengan generasi mendatang tanpa terasa lapuk, agar setiap kali dibaca lagi menjadi selalu baru.

Masalahnya sekarang adalah apakah para pengamat, ahli bahasa, dan para kritisi cukup jeli untuk menangkap dan memanfaatkan "ke-kreatif-an" bahasa yang dicapai para sastrawan itu? Apakah pemerintah, para pejabat, dan kaum terpelajar berkenan melihat dan mengendus bahwa sastra bukan hanya hiburan, tetapi juga adalah ilmu pengetahuan? Masalahnya bukan lagi mengatur "langkah kerja" bahasa, tetapi bagaimana membuat pencapaian-pencapaian sastra dalam bahasa, dianggap aset negara yang kemudian dimanfaatkan oleh bidang lain. Di situlah bahasa tidak hanya akan berhenti sebagai bahasa saja, tetapi juga senjata perjuangan untuk mengangkat harkat bangsa.

Di pusat-pusat pemberitaan dan forum-forum resmi juga ada usaha pemeliharaan BI. Dalam penyusunan skripsi, disertasi, penulisan sejarah, laporan-laporan administratif, pidato resmi, pertanggungjawaban, pembelaan, dakwaan, keputusan hakim, surat-surat pribadi, catatan harian, lamaran dan sebagainya, ada kesempatan memproses pemeliharaan BI.

Lalu, apa yang sebenarnya menyebabkan orang dengan tanpa malu-malu, tanpa perasaan risih, ranpa rasa segan, tanpa berpikir panjang, menyabet kosakata asing? Salah satunya adalah karena kemiskinan kosakata, yaitu ketidaktahuan bahwa BI menyimpan kosakata yang kaya dan tinggal menunggu dipergunakan saja. Di sanalah kiranya perlu digiatkan kembali pelajaran mengarang dan kemampuan bercerita, serta menganjurkan manusia Indonesia dari kelas paling bawah sampai ke orang nomor satu agar banyak membaca, khususnya membaca sastra yang telah menunjukkan banyak pencapaian dalam mengembangkan bahasa.

Mungkin benar, bahwa penyakit BI terparah adalah penyusupan kosakata asing, tetapi itu hanya salah satunya. Di tempat lain, mungkin sekali kosakata itu justru merupakan sebuah pahala yang memperkaya dan menyempurnakan. Apabila kita bersedia bersikap bijaksana, semuanya itu mesti diterima dan kemudian baru dirumuskan permasalahannya dan dicarikan jalan keluarnya. Bukan sebaliknya, memberikan perumusan dan setelah itu baru melihat apa yang terjadi di setiap kasus.

D. Pendidikan Dwibahasa

Telah disebutkan dalam pembuka wacana bahwa proses adaptasi dengan globalisasi dan persaingan global selalu dikaitkannya dengan label serba "internasional" serta penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, oleh kalangan di dunia pendidikan kita. Sehingga tidak dapat dipungkiri banyak bermunculan sekolah yang menggunakan dua bahasa dalam proses pengajarannya, yaitu BI dan bahasa Inggris.

Kenyataan itu berkaitan erat dengan asumsi di tengah masyarakat, yang menganggap bahwa untuk membedakan sekolah "berstandar" nasional dan internasional adalah digunakannya dua bahasa dalam pengajaran. Memang, beberapa kriteria untuk sekolah internasional, antara lain adalah digunakannya bahasa Inggris dalam pengajaran dan siswanya minimal harus menguasai bahasa Inggris yang ditunjukkan dengan skor TOEFL 500. Di samping itu, minimal 70% siswanya harus lulus ujian kompetensi dengan standar internasional.

Meskipun demikian, masih banyak yang belum memahami apa sebenarnya pendidikan dwibahasa ini. Masih banyak yang rancu memahami tujuan pendidikan dwibahasa dan bagaimana pendidikan itu agar efektif dan sukses. Bahkan organisasi profesi dan praktisi pendidikan tampaknya belum benar-benar yakin dengan konsep pendidikan dwibahasa. Tentu saja, ini adalah indikator yang tidak baik. Namun, hal itu dapat dimaklumi.

Stephen Krashen (1999), seorang pakar pendidikan dwibahasa, mengatakan bahwa pendidikan dwibahasa yang telah dibuka di tiga negara bagian di Amerika Serikat secara pelan-pelan telah diragukan efektivitasnya. Ia melihat hal itu sebagai kritikan yang serius terhadap pendidikan dwibahasa, dan yang menyedihkan, para penganjur pendidikan dwibahasa itu mati-kutu untuk mempertahankannya. Mereka tidak dapat memberikan argumentasi terhadap kritikan itu karena pengetahuan tentang konsep pokok pendidikan dwibahasa tidak cukup dikuasai.

Meskipun demikian, pendidikan dwibahasa di Indonesia sendiri tetap menarik minat dan populer. Orang tua masih bergairah mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah yang berdwibahasa. Perkembangan ini membuktikan bahwa masyarakat kita sedang menuju ke arah pendidikan dwibahasa. Kenyataan ini tentu saja telah mempertahankan dan mengesahkan praktik dari pendidikan dwibahasa di negara ini.

Fenomena pendidikan dwibahasa ini pun tengah populer di negara tetangga kita, misalnya di Thailand. Universitas Rangsit di Bangkok, Thailand telah menyadari bahwa lembaga pendidikan tidak dapat menutup mata terhadap arus global dan penggunaan bahasa asing dalam pergaulan atau kompetisi internasional. Hanya saja, mereka juga tidak menghendaki bahasa ibu (bahasa Thai) mereka tergilas dan dilupakan. Untuk mengantisipasinya, universitas tersebut mengadakan program pendidikan master dwibahasa atau dalam dua bahasa. Sejak setahun lalu dibuka pula *Satit Bilingual School of Rangsit University* (sekolah dwibahasa) untuk pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan menengah pertama (Permanasari, 2006).

Model pendidikan dwibahasa itu dianggap lebih baik, di samping dapat sekaligus melayani kebutuhan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga perkawinan campur—karena di Thailand banyak terjadi perkawinan antara warga negara asing dan pribumi. Pada masing-masing level pendidikan, komposisi penggunaan bahasa Thai dan Inggris di dalam kelas diatur. Untuk kelas pendidikan usia dini, di *Satit School* biasanya dimulai pada usia tiga tahun. Komposisi bahasa Inggris lebih banyak, yakni 80—90 persen. Sementara untuk *level secondary* (setara SLTP di Indonesia) sebaliknya, komposisi bahasa Inggris lebih sedikit, hanya 40 persen, sebagian besar menggunakan bahasa Thai (Permanasari, 2006).

Sebenarnya, bagaimanakah konsep pendidikan dwibahasa itu? Secara singkat dapat dikatakan bahwa pendidikan dwibahasa merupakan pendidikan yang menggunakan dua bahasa yang berbeda dalam menyelenggarakan pengajarannya. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, instruksi yang dipakai adalah bahasa Inggris dan satu bahasa yang minoritas, seperti Spanyol atau Cina.

Berikut ini adalah beberapa model program pendidikan dwibahasa (dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Bilingual_education).

1. *Transitional Bilingual Education*. Pendidikan ini menggunakan satu bahasa pribumi peserta didik tidak lebih dari tiga tahun. Hal ini untuk memastikan bahwa para siswa tidak ketinggalan dalam materi pelajaran dasar, seperti matematika, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan alam. Tujuannya adalah untuk membantu peserta didik mengatasi masa transisi ketika mereka akan masuk ke kelas yang hanya menggunakan satu bahasa.
2. *Two-Way or Dual Language Bilingual Education*. Program ini dirancang untuk membantu penutur bahasa yang bukan penutur asli bahasa Inggris. Di AS,

dalam program ini separuh dari peserta didik adalah penutur asli bahasa Inggris dan setengahnya bukan penutur asli. Mereka adalah penutur asli dari suatu bahasa minoritas, seperti Spanyol. Program ini biasanya diijinkan di sekolah AS secara terbatas, walaupun penelitian membuktikan bahwa program ini sangat efektif dalam membantu para siswa belajar bahasa Inggris yang baik dan membantu capaian jangka panjang pembelajaran bahasa Inggris di sekolah (*Center for Applied Linguistics*, 2005; Thomas & Collier, 1997; Lindholm-Leary, 2000).

3. *Late-Exit atau Developmental Bilingual Education*. Pendidikan dwibahasa ini adalah pendidikan yang menggunakan bahasa pribumi dalam jangka waktu tertentu dan dalam proses pengajarannya ditemani oleh pengajar yang berbahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan berbahasa dari dua bahasa itu. Program ini disediakan untuk peserta didik yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris.

Di Indonesia, tampaknya ada kesalahpahaman di tengah masyakat tentang konsep pendidikan dwibahasa ini, seperti berikut.

1. Pendidikan dwibahasa selalu diidentikan dengan berkomunikasi dalam bahasa kedua (bahasa Inggris) dan menekan semaksimal mungkin penggunaan BI sebagai bahasa pertama. Dalam hal ini, kemampuan berkomunikasi dengan bahasa kedua menjadi tujuan utama. Bagaimanapun, seharusnya pendidikan dwibahasa menghargai bahasa pertama (BI).
2. Pendidikan dwibahasa selalu dihubungkan dengan kemampuan berbicara (bahasa Inggris), bukan kemampuan menulis (dalam bahasa Inggris). Pada akhirnya, tujuannya hanya mengejar kelancaran dalam berbicara bahasa Inggris. Meskipun di awal diajarkan menulis, tetapi hanya untuk menguatkan kemampuan berbicara, tujuannya bukan untuk meningkatkan kemampuan menulis.
3. Ada anggapan bahwa pendidikan dwibahasa lebih baik diberikan sejak dini. Para siswa di usia dini dianggap lebih mudah menguasai kemampuan berbahasa Inggris. Meskipun hal itu dianggap benar dari segi ilmu fonologi, penelitian telah menunjukkan bahwa pelajar yang lebih tua pun ketika belajar bahasa Inggris jauh lebih mudah dan lebih cepat dari mereka yang lebih muda.
4. Bahasa pertama (BI) siswa dianggap sebagai penghalang dalam belajar dibandingkan sebagai fasilitator dalam belajar bahasa kedua. Atau

sebaliknya, bagi mereka yang tidak setuju dengan pendidikan dwibahasa, belajar bahasa kedua (bahasa Inggris) dianggap akan merusak bahasa pertama (BI).

Kesalahpahaman ini mengindikasikan kurangnya informasi tentang konsep pendidikan dwibahasa ini kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat umum perlu diberikan informasi yang benar tentang pendidikan dwibahasa ini. Selain itu, para penyelenggara pendidikan dwibahasa pun harus transparan dalam menginformasikan praktik-praktik pendidikannya. Dari segi akademis, penelitian tentang kedwibahasaan ini harus didukung agar masyarakat tahu tentang kegagalan atau sukses dari program itu.

E. Penutup

Dalam penutup paparan ini, saya ingin mengutip pendapat Donald B. Calne (2005) dalam bukunya *Batas Nalar: Rasionalitas dan Perilaku Manusia*. Menurut Calne, nalar, bahasa, dan matematika sama-sama berakar pada asal-usul yang begitu dinamis dan praktis, namun demikian dengan terbentuknya basis data (*database*) budaya kita, dari generasi ke generasi, ketiganya mampu mencapai puncak abstrak yang tak terkira tingginya. Nalar, seperti halnya matematika dan bahasa, lebih merupakan fasilitator daripada inisiator. Kita menggunaan nalar untuk mendapatkan yang kita mau bukan untuk menentukan yang kita mau. Nalar sudah dinaikkan ke tingkat logika simbolik, bahasa ke tingkat puisi metafisik, dan matematika ke tingkat teori probabilitas. Nalar merajut argumen, sedangkan tata bahasa merajut kalimat, dan kosa-kata adalah simbol dari konsep-konsep.

Jika kita masih bertanya mengapa bahasa Inggris, yang banyak menjadi sumber kosakata/istilah itu, lebih "canggih" merajut makna, ide, atau konsep-konsep? Kelebihan ini bisa jadi karena jumlah kosakata bahasa Inggris delapan kali lipat jumlah kosakata BI. Artinya secara leksikal, konsep ihwal dunia para penutur bahasa Inggris jauh lebih banyak daripada konsep serupa yang dimiliki penutur BI(?). Sebagai bahan perbandingan, penutur dewasa bahasa Inggris rata-rata memiliki perbendaharaan kata sekitar 50.000 kata, tetapi jumlah yang sebenarnya jauh lebih beragam. Pendidikan tinggi memberi perbendaharaan sekitar 80.000 kata (Calne 2005: 66).

Di samping itu, budaya literer para penutur bahasa Inggris, misalnya di Amerika Serikat, menjadikan mereka, khususnya kaum terdidik, terbiasa menulis. Para ahli setuju bahwa menulis telah terbukti sebagai kegiatan berbahasa

yang paling mendukung terbentuknya keterampilan bernalar, yaitu kegiatan memecahkan masalah melalui proses linguistik dan kognitif yang kompleks.

Calne (2005: 417) antara lain menyatakan bahwa kemajuan manusia (*human progress*) adalah hasil optimisme yang bertegas-tegas namun tak realistis –bahwa cara-hidup kita yang mutakhir lebih tinggi mutunya dari semua cara hidup sebelumnya. Kita harus percaya diri bahwa kosakata BI keadaannya memang lumayan dahsyat sehingga alih bahasa sejumlah kata/istilah ilmiah dengan kosakata yang ada, atau yang baru, sanggup membuat kita sadar betapa BI memang sudah punya potensi yang sama dengan bahasa Yunani: sama-sama bahasa asing, yang hasratnya untuk diintimi menuntut kerja keras nalar. Nalar memiliki batas yang tak tertembus sehingga nalar bukan saja tak bisa dimintai tanggung jawab, tetapi juga mematok kognitif manusia.

Bahasa Yunani merupakan bahasa yang tegak kukuh sebagai sebuah bahasa yang mengusung wacana besar. Demikian pula dengan bahasa Latin yang menjadi bahasa perantara dari bahasa Yunani *via* bahasa Arab ke pusat kebudayaan Eropa. Namun, dua bahasa itu perlahan-lahan mulai sempoyongan karena tidak banyak lagi orang yang berpikir dan membangun wacana dalam bahasa bersangkutan (Sarjono, 2001: 12).

Sehubungan dengan perencanaan dan reformasi BI, tindakan konkrit yang dapat ditawarkan untuk menjaga kelestariaan dan perkembangan BI adalah pemberdayaan kesadaran manusia Indonesia sendiri. Bukan kesadaran berbahasa, karena itu hanya akibatnya. Bukan juga kesadaran berbangsa, karena itu kemudian menjadi terlalu luas dan abstrak. Karena segala kekurangan juga bisa saja dikembalikan pada biang tipisnya kesadaran berbangsa. Namun, yang lebih tepat adalah kesadaran kepada masalah yang sebenarnya nyata pada bahasa itu sendiri.

Memelihara BI tak mungkin dilakukan di atas meja dan di depan komputer saja. Di tengah semangat kebebasan yang memacu daerah-daerah menonjolkan otonomi dan identitas kedaerahannya, sebenarnya kita sedang menerima pasokan potensi-politis kebahasaan yang luar biasa dari seluruh Tanah Air. Ini adalah masa yang tepat untuk menggali potensi bahasa daerah. Namun, dengan memanfaatkan semangat kebangkitan daerah, perencanaan bahasa pun harus mempertimbangkan pengembangan bahasa daerah. Itu perjalanan panjang.

Daftar Pustaka

Arifin, Zaenal dan Amran Tasai. 2006. *Cermat Berbahasa Indonesia.* Jakarta: Akademika Pressindo.

Astraatmadja, Atmakusumah. 2007. "UU Kebahasaan, Mendesakkah?". *Kompas,* 13 Januari.

Calne. Donald B. 2005. *Batas Nalar: Rasionalitas dan Perilaku Manusia.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Hwia, Ganjar. 2006. "Bahasa-Indonesia Mutakhir dan Pengajaran BIPA". Makalah *WILTA's Term 4 AGM and Workshop* di Perth, Australia Barat, 27-28 Oktober 2006.

Korzybski, Alfred. 1994. *Science and Sanity; an Introduction to non-Aristotelian Systems and General Semantics.* New York: International Non-Aristotelian Library Pub. Co.

Krashen, S.D. 1999. "Bilingual Education: Arguments for and (Bogus) Arguments Against [sic]" diakses dari http://digital.georgetown.edu

Permanasari, Indira. 2006. "Label Internasional, Bukan Berati Lupakan Bahasa Ibu". *Kompas*, 02 Januari.

Purwoko, Herudjati. 2003. *Tiga Wajah Budaya: Artefak, Perilaku, dan Rekayasa.* Semarang: Masscom Media.

Sarjono, Agus R. 2001. *Bahasa dan Bonafiditas Hantu.* Magelang: Yayasan Indonesia Tera.

Simbolon, Parakitri T. 2005. "Masalah Pilihan Kata dalam Penerjemahan" dalam *Diskusi Panel Himpunan Penerjemah Indonesia*, di Pusat Bahasa, Sabtu, 30 April 2005.

Steinberg, Danny D. 1982. *Psycholinguistics: Language, Mind, and World.* New York: Longman Inc.

Sugono, Dendy. 1994. *Berbahasa Indonesia yang Benar.* Jakarta: Puspa Swara.

Tilar, H.A.R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional.* Jakarta: Rineka Cipta.

Penggunaan Bahasa Asing dalam Konteks Pendidikan Bahasa di Indonesia

Oleh:

Suwartono

A. Pendahuluan

Sejumlah bahasa asing, selain bahasa Inggris, telah diajarkan dan dipelajari di Indonesia dewasa ini, seperti bahasa Jerman, Perancis, Belanda, Spanyol, Jepang, dan yang sudah sangat lama, bahasa Arab, atau yang baru mengalami pertumbuhan pesat, bahasa Cina (Mandarin). Sebagai bahasa asing, bahasa-bahasa ini umumnya dipelajari di dalam ruang-ruang kelas, baik pada jalur pendidikan formal melalui lembaga persekolahan dan perguruan tinggi, maupun jalur non-formal seperti kursus dan pelatihan-pelatihan. Barangkali, tidak banyak orang di Indonesia belajar bahasa asing secara informal, yaitu mengembangkan sendiri bahasa asing yang dipelajari di luar ruangan-ruangan kelas. Kondisi pembelajaran seperti ini tentu saja berbeda dengan kondisi yang dijumpai di lingkungan-lingkungan yang menggunakan bahasa-bahasa tersebut sebagai bahasa kedua atau bahkan bahasa pertama.

Lingkungan yang ideal bagi pemerolehan bahasa adalah wilayah yang masyarakatnya, entah sebagian atau seluruhnya, menggunakan bahasa untuk komunikasi sehari-hari. Bukan saja bahasa itu digunakan dalam komunikasi lisan, melainkan sejauh mata memandang, termasuk kultur yang melatari penggunaan bahasa itu juga berperanan dalam penguasaan sebuah bahasa. Singkat dan kongkritnya, belajar bahasa Inggris di negara Inggris (sebagai bahasa pertama) atau di Singapura (sebagai bahasa kedua) akan lebih mangkus dan mangkil dibandingkan dengan di Indonesia.

Lalu, muncul pertanyaan: apakah bahasa asing tidak mungkin dikuasai secara baik di Indonesia? Sebenarnya pertanyaan ini terjawab dalam konteks pembelajaran bahasa asing di sejumlah pondok pesantren terkemuka, seperti Gontor, Jawa Timur. Namun, karena sudah terlanjur ada semacam mitos yang mencerminkan pesimisme masyarakat Indonesia terhadap keberhasilan belajar bahasa asing di luar *alam asli*-nya, dipandang perlu adanya argumen-argumen yang meyakinkan bahwa pembelajaran bahasa asing bisa berlangsung dalam *setting* manapun dan kondisi apapun. Tulisan ini mengkritisi beberapa isu seputar penggunaan bahasa asing di Indonesia yang dikaitkan dengan keberhasilan dalam upaya menguasai bahasa asing.

B. Menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, atau Bahasa Lain: Siapa Takut!

Salah satu wujud nasionalisme bangsa adalah turut merasa bangga apabila identitas negerinya dikenal dan diakui keberadaannya oleh bangsa-bangsa lain. Bahasa Indonesia sebagai salah satu identitas bangsa, yang telah dideklarasikan oleh para *founding fathers* (bapak pendiri) negeri ini perlu dijaga kelestariannya, dikembangkan, bahkan, diupayakan untuk dijadikan sejajar dengan bahasa-bahasa dunia. Tentu tidak ada orang berkebangsaan Indonesia ingin melihat bahasa nasional kita pada suatu masa menjadi *dead/extinct language* – tinggal nama dalam sejarah deretan nama bahasa yang pernah ada di dunia. Kelestarian dan perkembangan bahasa nasional kita menjadi tanggung jawab kita bersama, semua komponen bangsa, bukan hanya pemerintah atau institusi pengembangan bahasa. Setiap kita adalah garda terhadap cagar bahasa dan budaya nasional Indonesia. Seharusnya kita malu bila meninggalkan bahasa Indonesia di tanah asalnya, sebab bahasa Indonesia telah dipelajari di mancanegara, seperti Jerman, Jepang, Korea, Amerika. Bahkan, di Australia, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa asing pertama yang wajib diajarkan di lembaga-lembaga persekolahan.

Sementara itu, sebagai bagian dari masyarakat *global village* yang semakin samar batas-batasnya, bangsa Indonesia mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus membaur dalam pergaulan masyarakat global. Apalagi, dengan adanya kesepakatan-kesepakatan dunia yang berdampak pada persaingan bebas, termasuk dalam bursa tenaga kerja dan perdagangan, kemampuan untuk bergaul dengan masyarakat dunia dipandang penting pada masa mendatang. Oleh karena itu,

kemampuan menggunakan bahasa asing, terutama bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat dunia dalam berinteraksi atau berkomunikasi antarsesamanya juga akan menjadi modal menuju kejayaan pada era mendatang.

Tanggung jawab moral menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri dan upaya menguasai bahasa asing sebagai langkah proaktif terhadap tantangan yang datang dari gejala globalisasi bukan suatu dilema. Pengalaman pembelajar bahasa asing di pondok pesantren dan para pembelajar lain yang berhasil dengan baik dalam menguasai bahasa asing tanpa harus mengesampingkan bahasa yang telah dikuasai sebelumnya, termasuk bahasa daerah, adalah bukti bahwa untuk menguasai bahasa baru tidak harus dilakukan dengan meninggalkan bahasa lama. Memang telah diakui keabsahan pernyataan tentang kecenderungan memboyong kebiasaan-kebiasaan bahasa lama, khususnya dalam tataran bentuk, arti, dan kultur ke dalam bahasa baru, sebagaimana dinyatakan oleh Fries dalam Lado (1957: 1-2): "*...individuals tend to transfer the forms and meanings, and the distribution of forms and meanings of their native language and culture to the foreign language and culture...*". Namun, bila dilihat dari hakikat belajar bahasa untuk mampu menggunakannya dalam kehidupan nyata, kecenderungan tersebut dapat diabaikan.

Globalisasi yang terus bergulir tidak harus ditanggapi dengan merubah wajah kehidupan masyarakat Indonesia. Sepanjang berada di alam Indonesia, bahasa dan kultur yang ideal kita gunakan adalah bahasa dan kultur Indonesia. Kita perlu mencontoh bangsa-bangsa yang kokoh dalam menjaga bahasa dan budayanya di tengah-tengah derasnya arus globalisasi, Jepang, misalnya. Situasi di kota-kota besar di Indonesia sungguh memprihatinkan. Perhatikan saja salah satu sisi yaitu; penggunaan bahasa asing, utamanya, bahasa Inggris dalam penamaan dan reklame. Hal ini sebenarnya tidak memberikan manfaat apapun. *Think globally, but act locally* barangkali dapat dijadikan pedoman kita dalam upaya menguasai bahasa asing. Kesadaran kita terhadap bahasa asing dapat diwujudkan dalam banyak cara. Hal ini merupakan pembahasan bagian berikutnya.

C. Praktik Membuat Sempurna

Seperti proses belajar umumnya praktik dan berlatih mutlak dilakukan dalam pembelajaran bahasa. Kualitas praktik tidak kalah pentingnya dibandingkan kuantitas (Brown, 1980: 61). Hal ini menepis pendapat orang, bahwa dengan cara tinggal di negara berbahasa asing yang kita maksudkan kita pasti mampu berbahasa itu dengan baik. Apa dulu yang kita kerjakan di sana?

Persoalannya adalah praktik menuntut hadirnya motivasi dan kreativitas pembelajar. Pengalaman dari para pembelajar bahasa asing yang berhasil menunjukkan bahwa, mereka umumnya memanfaatkan dan menciptakan kesempatan untuk menggunakan bahasa sasaran dan mempraktikkan apa yang telah mereka kuasai (Rubin & Thompson dikutip oleh O'Malley & Chamot 1990; (Ellis 1985). Ini berarti harus ada saat-saat belajar atau berlatih intensif dan mutlak pintar membaca kesempatan. Seorang pembelajar bahasa asing yang baik mungkin akan memanfaatkan waktu luangnya untuk mencari mitra berkomunikasi dalam bahasa asing (mungkin guru atau teman yang dipandang lebih mampu), menyimak tembang-tembang berbahasa asing sasaran dan berusaha memahami pesan di dalamnya, atau berusaha menemukan penutur asli untuk mencobakan hal-hal yang telah diperoleh dalam belajar bahasa sasaran. Mengikuti lomba-lomba berbahasa asing juga bisa merupakan cara yang bermanfaat. Barangkali, predikat juara bukan prioritas, tetapi pengalaman menggunakan bahasa dalam situasi yang sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat berharga. Mengikuti dan berperan aktif dalam diskusi atau forum-forum berbahasa asing yang diminati, seperti kelompok bicara, asalkan terarah dan terprogram dengan baik, juga akan sangat membantu.

Jelas, sebenarnya banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memperbaiki bahasa asing yang hendak dikuasai. Semuanya berpulang kepada pemelajarnya sendiri. Ketidakalamiahan *setting* atau alam pembelajaran dan pemelajaran dapat ditutupi atau setidaknya dikurangi dengan motivasi dan strategi belajar. Cara-cara tertentu, seperti sering menyimak rekaman percakapan dan melafalkannya berulang-ulang, menulis kosakata atau ungkapan-ungkapan yang baru ditemukan dan mengembangkannya ke dalam ungkapan-ungkapan yang lebih panjang dan berlatih melafalkannya, serta tidak pernah merasa lelah berhubungan dengan kamus merupakan praktik dan upaya yang baik dalam menjaga hubungan dengan bahasa asing itu, yang tidak jarang bisa mengantarkan pemelajar bahasa asing berhasil mencapai kemampuan, terutama, melafalkan hingga mirip dengan penutur aslinya (*native-like*). Dalam sebuah situs internet diberitakan kisah sukses seorang warga Hungaria yang menguasai 16 bahasa asing dalam kurun waktu 25 tahun. Ia belajar dengan cara-cara yang pada dasarnya sama dengan cara-cara yang telah disinggung di atas. Kata kunci kisah sukses pembelajar tersebut adalah '*praktik*'.

D. Penggunaan Bahasa Asing di dalam Kelas Bahasa Asing

Pembelajaran bahasa asing di dalam *setting* pendidikan formal atau non-formal yang diselenggarakan di dalam kelas memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan yang dilakukan di luar kelas, di antaranya keterprograman, ketersediaan narasumber (guru) serta mitra berlatih. Namun demikian, pembelajaran di dalam kelas ini, sebagaimana pembelajaran lain umumnya bukan merupakan satu-satunya alam pembelajaran yang dapat memberikan jaminan keberhasilan dalam belajar bahasa, apalagi bahasa asing. Taraf kemangkusan pembelajaran bahasa asing di dalam kelas bergantung pada beberapa faktor utamanya yang berpusat pada guru. Fungsi guru sebagai fasilitator, inspirator, motivator, dan direktor pembelajaran memainkan peranan sentral dalam mempersiapkan pembelajar yang otonom. Oleh karena itu, bila terselenggara dengan baik dan benar sesungguhnya pendidikan bahasa asing di kelas-kelas memberikan kontribusi terhadap keberhasilan menguasai bahasa asing (Ellis, 1985: 229).

Hal yang perlu mendapatkan sorotan dalam konteks pendidikan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, yang diselenggarakan pada pendidikan formal selama ini adalah penggunaan bahasa selama proses belajar-mengajar berlangsung. Yang terpantau saat ini, baik melalui program praktik mengajar maupun informasi yang dihimpun melalui guru praktikan, siswa dan guru profesional, penggunaan bahasa asing dalam proses belajar-mengajar bahasa sasaran masih sangat kurang. Berdasarkan keterangan dari guru, mereka memilih menggunakan bahasa Indonesia karena bila bahasa Inggris digunakan siswa tidak mengerti, atau karena siswa berkeberatan bila guru meminta mereka menggunakan bahasa Inggris. Ini merupakan masalah serius dalam pembelajaran bahasa asing. Kiranya, ada masalah lain di balik cerita ini:

Guru belum mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa menaruh minat menggunakan bahasa Inggris. Memang pada saat-saat awal berhubungan dengan bahasa asing penggunaan bahasa tersebut untuk berkomunikasi atau berinteraksi tidak perlu dipaksakan. Namun, hal ini tidak perlu berlanjut terus.

Walaupun terbatas, kelas sesungguhnya juga merupakan konteks sosial (Littlewood, 1981: 44-45). Situasi yang wajar adalah bila masyarakat kelas juga mendapatkan kesempatan penuh untuk menggunakan bahasa asing yang sedang dipelajari. Hampir semua jenis pendekatan dan metode pengajaran dalam pembelajaran bahasa menekankan pentingnya penggunaan langsung bahasa yang sedang dipelajari dalam komunikasi dan interaksi sosial kelas (Richards & Rodgers, 1986). Dulay, Burt, dan Krashen (1982) menyarankan agar guru menghindari teknik-teknik yang toleran terhadap terjemahan. Terjemahan dibenarkan hanya bila betul-betul dinilai beralasan, umpamanya pada saat menjelaskan konsep waktu dalam bahasa Inggris.

E. Penutup

Berdasarkan uraian dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai bahasa asing di Indonesia, orang tidak perlu meninggalkan bahasa Indonesia atau bahasa apapun yang telah dikuasai sebelumnya. Bahasa-bahasa lama bukan menjadi penghalang dalam upaya menguasai bahasa baru. Lebih dari itu, bila kita ingin menjadi bangsa yang besar, kita harus tetap bangga pada bahasa nasional dengan cara menggunakannya dalam situasi yang sesuai.

Untuk menjawab tantangan yang datang dari gejala globalisasi, bangsa Indonesia idealnya memiliki kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa dunia, agar tidak melewatkan kesempatan-kesempatan baik yang akan datang dan tentunya melalui komunikasi menggunakan bahasa dunia. Penguasaan bahasa asing mempersyaratkan pengalaman dalam menggunakannya atau mempraktikkannya secara memadai. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mempraktikkan atau berlatih menggunakan bahasa asing, bergantung pada profesionalisme guru (untuk konteks pendidikan formal) dan motivasi serta strategi pembelajar sendiri dalam menggali cara-cara yang dinilai paling mangkus bagi dirinya.

Daftar Pustaka

Brown, H.D. *Principles of Language Learning and Teaching*, New Jersey: Prentice-Hall, 1980.

Dulay, Burt & Krashen. *Language Two*. Oxford: Oxford University Press, 1982.

Ellis, Rod. *Understanding Second Language Acquisition*. Oxford: Oxford University Press, 1985.

"How to Learn Foreign Language". Diakses pada tanggal 6 Januari 2007 dari http://bbs.wwenglish.org/dispbbs.asp?boardID=7&ID=220380&page=7.

Garcia, Ofelia. '*Bilingual Education*.' Dalam Florian Coulmas. *The Handbook of Sociolinguistics*. Oxford: Blackwell Publishers, 1997.

Genesee, Fred. *Educating Second Language Children: the Whole Child, the Whole Curriculum, the Whole Community*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Hamied, F.A. "Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing: Isu dan Realita". Diakses pada tanggal 5 Januari 2007 dari http://www.ialf/bipa/april2001/pembelajaranbahasaindonesia.htm.

Littlewood, William. *Communicative Language Teaching: an Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

Richards, J.C & Rodgers, T.S. *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Tilaar, H.A.R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Wilkins, D.A, 1972, *Linguistics in Language Teaching*, London: Edward Arnold (Publishers), Ltd.

BUKU TERBARU

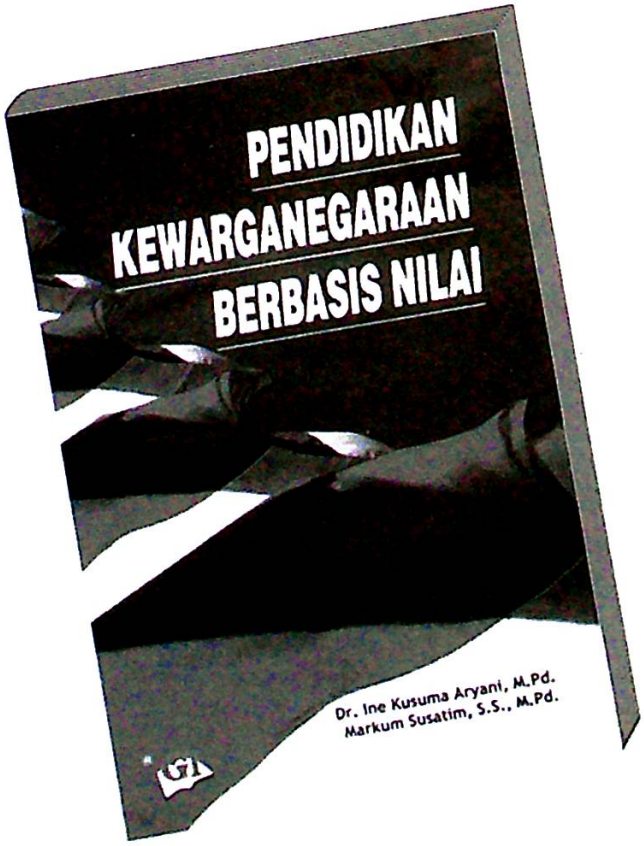

Editor: Sam M. Chan & Prof. Emzir

Isu-Isu Kritis
Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah

Isu sentral mengenai realitas pendidikan di Indonesia sejatinya akan terus berkembang dan menghangat di kawasan cakrawala dunia pendidikan. Berbagai metode dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan bangsa, senantiasa menjadi keniscayaan bagi para praktisi pendidikan agar dapat melakukan inovasi pendidikan untuk men-ciptakan pendidikan yang terbaik bagi bangsa.

Buku ini merupakan kumpulan ide dan solusi dari para praktisi pendidikan yang tersurat mengenai potret pendidikan bangsa di era otonomi daerah untuk dapat dijadikan sebagai benang merah atas kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia. Selain itu, isu mengenai proses penyelenggaraan pendidikan yang berbasis bilingual saat ini tengah marak digalakkan oleh pemerintah. Sehingga, kajian mengenai pendidikan emersi dan pendidikan bilingual menjadi salah satu khasanah pendidikan yang sangat menarik disajikan dalam buku ini.

Secara umum, fokus isu kritis yang dituangkan dalam buku ini dibagi menjadi dua fokus utama, yaitu:

- Isu Kritis Pendidikan
- Isu Kritis Pendidikan Bahasa

Buku ini diperuntukkan bagi para mahasiswa strata satu dan strata dua untuk menambah khasanah potret pendidikan bangsa. Selain itu, buku ini sangat baik bagi para praktisi pendidikan, baik yang berada di tataran teoritis maupun di tataran praktis untuk menumbuhkan semangat menciptakan inovasi pendidikan menuju masa depan yang lebih baik lagi.

ISBN: 978-979-450-597-7

9 789794 505977

Penerbit
GHALIA INDONESIA
Jl. Rancamaya Km. 1 No. 47, Ciawi, Bogor, 16720
Telp. 0251-8240628
Fax. 0251-8243617
www.yudhistira-gi.co.id